



LAPORAN HASIL EVALUASI DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN

KOTA BOGOR
TAHUN 2015-2019

BAPPEDA KOTA BOGOR
TAHUN 2019

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan instrumen penting bagi pemerintah daerah untuk menetapkan prioritas program pembangunan di daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan proses teknokratik, partisipatif dan politik antara pemerintah, legislatif dan masyarakat. Dokumen RPJMD diperoleh dari hasil kajian para perencana di daerah sekaligus pengejawantahan dari kebijakan dan program pembangunan secara efektif dan efisien sesuai dengan isu strategis wilayah, analisis potensi dan kebutuhan wilayah, serta dukungan dari semua pemangku kepentingan dalam pembangunan di Kota Bogor. Hasil perencanaan dalam RPJMD akan berdampak sangat luas terhadap taraf hidup masyarakat terkait dengan seberapa besar program pembangunan serta alokasi anggaran pembangunan bisa memberikan manfaat bagi upaya penyediaan layanan dasar yang lebih baik bagi warganya.

Dalam rangka mewujudkan sistem perencanaan pembangunan serta untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan selaras, efektif, efisien, tepat sasaran dan berkesinambungan, maka diperlukan upaya berkesinambungan untuk mengevaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah yang cermat, tepat, aspiratif dan akuntabel. Sebagaimana amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Bogor, dengan menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor.

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Periode Tahun 2015-2019, berpedoman pada dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor Tahun 2015-2019 Peraturan Daerah ini telah mengamanatkan kepada Pemerintah Kota Bogor untuk melaksanakan program dan kegiatan yang terbagi pada penyelenggaraan Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Urusan Wajib bukan Pelayanan Dasar, Urusan Pilihan, dan Urusan Penunjang. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut akan

merefleksikan Pencapaian Kinerja Misi Pembangunan dan janji Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bogor Periode Tahun 2015-2019.

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien dan efektif. Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah meliputi pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan, terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah. Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah meliputi kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan daerah.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) merupakan perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi rencana pembangunan daerah. Bila hasil pemantauan dan evaluasi ditemukan adanya ketidaksesuaian/peyimpangan, kepala Bappeda berkewajiban untuk melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan. Hasil dari pengendalian evaluasi tersebut dilaporkan kepada Walikota Bogor.

Pengendalian mencakup rumusan visi misi, strategi dan kebijakan, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Bogor. Atas dasar itu maka Bappeda Kota Bogor membuat laporan hasil pengendalian dan evaluasi capaian RPJMD Kota Bogor Tahun 2015-2019.

1.2. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dari kegiatan pengendalian dan evaluasi capaian RPJMD Kota Bogor Tahun 2015-2019 adalah melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan program pada masing-masing agenda pembangunan termasuk evaluasi pendanaan untuk menghasilkan rekomendasi terhadap capaian indikator.

Sasaran yang ditentukan untuk mencapai tujuan tersebut yaitu: menganalisis capaian pembangunan RPJMD sampai dengan pelaksanaan tahun ke-4; mengetahui hasil capaian pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor sampai dengan tahun ke-4, secara makro untuk masing-masing agenda Pembangunan Daerah; melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan program pada masing-masing agenda pembangunan termasuk evaluasi pendanaan; melakukan evaluasi capaian

kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM); melakukan evaluasi capaian kinerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB); dan melakukan evaluasi capaian kinerja BUMD.

1.3. MANFAAT

Manfaat yang bisa diperoleh melalui pengendalian dan evaluasi Capaian RPJMD ini antara lain: 1. Sebagai bahan evaluasi untuk melaksanakan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah untuk periode RPJMD selanjutnya; 2. Sebagai bahan dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah untuk periode RPJMD selanjutnya; 3. Mengoptimalkan program pembangunan sesuai agenda daerah yang terukur dan rasional; dan 4. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi perencanaan dan penganggaran sehingga lebih bermanfaat sebesar-besarnya untuk kepentingan publik.

BAB II
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR MAKRO KOTA BOGOR

2.1. Analisis Pola dan Permasalahan Pembangunan Daerah Kota Bogor

2.1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Bogor

PDRB merupakan indikator makro ekonomi yang digunakan untuk menganalisis kondisi perekonomian suatu wilayah. Nilai PDRB Kota Bogor setiap tahunnya cenderung mengalami peningkatan. Pada 2017 mencapai Rp 38.506,60 juta, meningkat 8,77% dibanding Rp 35.400,80 juta pada tahun 2016. Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) pada tahun 2017 mencapai Rp 28.864,33 juta, mengalami pertumbuhan sebesar 6,04 persen dibanding tahun 2016 yang mencapai nilai Rp 27.221,21 juta. Pertumbuhan ekonomi tahun 2016 menunjukkan trend percepatan bila dibanding tahun 2015 yang tumbuh sebesar 0.63 persen. Pertumbuhan PDRB Kota Bogor tahun 2016 lebih tinggi dibandingkan tahun 2017 yang mencapai 6,74 persen.

Tabel 2.1.

PDRB Berdasarkan Harga Tahun Dasar 2010 Kota Bogor, Tahun 2013-2017

Kode Lapangan Usaha		2013	2014	2015	2016	2017
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	216.320,33	220.689,88	225.137,69	230.145,03	233.030,00
B	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-
C	Industri Pengolahan	4.325.575,49	4.564.569,82	4.843.786,77	5.109.363,13	5.351.640,00
D	Pengadaan Listrik dan Gas	980.512,23	1.025.049,18	898.231,83	903.130,58	831.950,00
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	23.920,45	25.940,03	27.361,22	28.518,60	29.200,00

Kode Lapangan Usaha		2013	2014	2015	2016	2017
F	Konstruksi	2.555.955,9 8	2.696.289,5 2	2.848.754,7 8	3.011.149,2 1	3.237.680,0 0
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.114.427,1 7	5.367.108,8 6	5.650.090,6 3	5.972.855,5 3	6.306.050,0 0
H	Transportasi dan Pergudangan	2.496.952,3 6	2.637.721,2 2	2.893.357,4 9	3.133.215,6 4	3.366.500,0 0
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.002.846,6 7	1.059.403,0 7	1.119.753,2 5	1.209.844,2 4	1.304.030,0 0
J	Informasi dan Komunikasi	1.070.494,4 4	1.270.614,2 1	1.506.674,8 1	1.692.958,8 1	1.919.820,0 0
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.549.250,4 2	1.606.764,7 4	1.676.548,8 6	1.847.070,7 1	1.951.350,0 0
L	Real Estate	490.879,30	525.977,17	555.976,80	601.018,99	639.840,00
M,N	Jasa Perusahaan	456.796,50	477.357,37	516.834,82	560.209,59	590.800,00
O	Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	626.872,86	643.234,24	660.730,22	675.927,01	683.610,00
P	Jasa Pendidikan	587.388,87	656.814,29	718.858,00	772.597,46	826.600,00
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	246.968,00	279.823,32	313.143,35	341.269,24	381.440,00

Kode Lapangan Usaha		2013	2014	2015	2016	2017
R,S,T, U	Jasa Lainnya	739.506,47	777.953,83	843.363,78	912.977,72	1.001.430,0 0
	Produk Domestik Bruto	22.484.667,5 4	23.835.310,7 7	25.298.604,3 1	27.002.251,5 1	28.654.970,0 0

Sumber: BPS Kota Bogor, Tahun 2019

Kontribusi dari setiap sektor dalam perekonomian Kota Bogor merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi sumber pertumbuhan ekonomi Kota Bogor. Berikut pada Tabel 2.2, disajikan data kontribusi setiap sektor dalam perekonomian Kota Bogor.

Tabel 2.2.

**Kontribusi atau Share PDRB Berdasarkan Harga Tahun Dasar 2010 Kota Bogor,
Tahun 2013-2017**

Kode	Lapangan Usaha	2013	2014	2015	2016	2017
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0,96	0,93	0,89	0,85	0,81
B	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-
C	Industri Pengolahan	19,24	19,15	19,15	18,92	18,68
D	Pengadaan Listrik dan Gas	4,36	4,30	3,55	3,34	2,90
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,11	0,11	0,11	0,11	0,10
F	Konstruksi	11,37	11,31	11,26	11,15	11,30
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	22,75	22,52	22,33	22,12	22,01
H	Transportasi dan Pergudangan	11,11	11,07	11,44	11,60	11,75
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,46	4,44	4,43	4,48	4,55
J	Informasi dan Komunikasi	4,76	5,33	5,96	6,27	6,70
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,89	6,74	6,63	6,84	6,81
L	Real Estate	2,18	2,21	2,20	2,23	2,23
M,N	Jasa Perusahaan	2,03	2,00	2,04	2,07	2,06
O	Administrasi Pemerintah,	2,79	2,70	2,61	2,50	2,39

Kode	Lapangan Usaha	2013	2014	2015	2016	2017
	Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib					
P	Jasa Pendidikan	2,61	2,76	2,84	2,86	2,88
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,10	1,17	1,24	1,26	1,33
R,S, T, U	Jasa Lainnya	3,29	3,26	3,33	3,38	3,49
	Produk Domestik Bruto	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
		0	0	0	0	0

Sumber: BPS Kota Bogor, Tahun 2019 (Diolah)

Berdasarkan data share atau pangsa PDRB Berdasarkan Harga Tahun Dasar 2010 Kota Bogor pada tabel di atas, diketahui bahwa di Kota Bogor selama 5 tahun terakhir **sektor yang memiliki kontribusi terbesar adalah sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor**. Sebagai kota perdagangan maka kontribusi sektor ini memang menjadi sangat dominan di Kota Bogor. Letak Kota Bogor yang strategis yaitu merupakan hinterland Kota Jakarta menjadikan Kota Bogor sebagai lokasi yang strategis untuk kegiatan perdagangan. Meskipun demikian kontribusi sektor ini juga terus mengalami penurunan. Hal ini juga menjadi pendorong rendahnya laju pertumbuhan ekonomi Kota Bogor. Sebaliknya sektor yang memiliki **kontribusi terkecil selama 5 tahun terakhir di Kota Bogor adalah sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan**. Hal ini dikarenakan semakin berkurangnya potensi sektor tersebut di Kota Bogor. Berkurangnya luas lahan Pertanian, Kehutanan dan Perikanan diduga menjadi salah satu penyebab semain rendahnya kontribusi sektor ini dalam perekonomian Kota Bogor.

Perubahan pada kondisi PDRB mencerminkan kondisi pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai penambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun. PDRB berdasarkan harga konstan mencerminkan kondisi perekonomian yang tidak dipengaruhi oleh kondisi inflasi.

Pertumbuhan ekonomi wilayah-wilayah sekitar Kota Bogor, maka diketahui bahwa laju pertumbuhan ekonomi Kota Bogor berada di atas laju pertumbuhan Provinsi Jawa Barat,

meskipun masih berada di bawah Kota Depok yang terus berkembang dengan sektor industrinya. Data laju pertumbuhan PDRB wilayah sekitar Kota Bogor dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.3.

Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Barat, 2011-2016 (Persen)

Wilayah Provinsi	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Kabupaten Bogor	5,86	6,01	6,14	6,01	6,09	6,35
Kota Bogor	6,22	6,31	6,04	6,01	6,13	6,73
Kota Bekasi	6,45	6,74	6,04	5,61	5,57	6,08
Kota Depok	6,81	8,06	6,85	7,28	6,64	7,28
Provinsi Jawa Barat	6,50	6,50	6,33	5,09	5,04	5,67

Sumber: BPS masing-masing wilayah Tahun 2019

Catatan : Tahun 2010 ada pergantian harga konstan dari 2000 menjadi 2010

Pertumbuhan ekonomi Kota Bogor berdasarkan PDRB ADHK 2010 menunjukkan pertumbuhan yang menurun yaitu antara tahun 2016 ke tahun 2017. Data laju pertumbuhan ekonomi Kota Bogor dapat dilihat pada Tabel 4.4. Berdasarkan PDRB harga konstan 2010, nilai PDRB Kota Bogor pada tahun 2017 meningkat dibandingkan tahun 2016. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. Namun jika dilihat dari pertumbuhannya diketahui bahwa pada tahun 2017 pertumbuhan ekonomi Kota Bogor adalah sebesar 6,12 persen lebih rendah dari tahun sebelumnya yang mencapai 6,37 persen. Ekonomi nasional yang belum stabil juga berimbas dengan perekonomian masyarakat Kota Bogor.

Tabel 2.4.

Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kota Bogor Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen), Tahun 2013-2017

Ket.	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,13	2,02	2,02	2,22	1,26
B	Pertambangan dan Penggalian	0	0	0	0	0
C	Industri Pengolahan	4,69	5,53	6,12	5,48	4,74
D	Pengadaan Listrik dan Gas	5,44	4,54	- 12,37	0,55	-7,88

Ket.	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
E	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, dan Daur Ulang	7,41	8,44	5,48	4,23	2,4
F	Konstruksi	5,45	5,49	5,65	5,7	7,52
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,99	4,94	5,27	5,71	5,58
H	Transportasi dan Pergudangan	5,05	5,64	9,69	8,29	7,45
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6	5,64	5,7	8,05	7,78
J	Informasi dan Komunikasi	9,41	18,69	18,58	12,36	13,4
K	Jasa Keuagandan Asuransi	10,97	3,71	4,34	10,17	5,65
L	Real Estate	7,19	7,15	5,7	8,1	6,46
M, N	Jasa Perusahaan	9,47	4,5	8,27	8,39	5,46
O	Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	1,36	2,61	2,72	2,3	1,14
P	Jasa Pendidikan	12,06	11,82	9,45	7,48	6,99
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,88	13,3	11,91	8,98	11,77
R, S, T, U	Jasa Lainnya	3,52	5,2	8,41	8,25	9,69
	PDRB TOTAL	6,04	6,01	6,14	6,73	6,12
<i>Sumber: BPS Kota Bogor Tahun 2018</i>						

Perlambatan pertumbuhan ekonomi Kota Bogor pada tahun 2017 dibandingkan Tahun 2016 disebabkan karena melambatnya beberapa lapangan usaha seperti Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; serta Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial. Sementara itu, penurunan pertumbuhan lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian serta Pengadaan Listrik dan Gas juga turut memberikan andil perlambatan pertumbuhan ekonomi Kota Bogor pada tahun 2017.

Semakin rendahnya kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan di Kota Bogor memang merupakan imbas dari semakin rendahnya lahan pertanian di Kota Bogor dikarenakan konversi lahan pertanian (dalam arti luas) ke sektor non pertanian. Luas

lahan produktif di Kota Hujan setiap tahun terus menyusut. **Semakin berkembangnya Kota Bogor sebagai tempat tinggal, maka semakin memicu terjadinya konversi lahan dari lahan pertanian ke lahan perumahan (non pertanian). tidak hanya perumahan tetapi juga konversi ke sektor industri (pabrik pengolahan, kantor-kantor usaha dan sebagainya). Tanah untuk tanaman padi tersebut digunakan sebagai perumahan. Dari total luas wilayah 11.850 hektare, lahan yang digunakan untuk pertanian hanya 2,7 persen atau 321 hektare pada tahun 2017.**

Berdasarkan data laju pertumbuhan ekonomi Kota Bogor terdapat lapangan usaha mengalami **pertumbuhan negatif** yaitu **Pengadaan Listrik dan Gas**. Dengan jumlah penduduk yang terus meningkat, kebutuhan akan listrik dan gas terus meningkat namun tingkat pertumbuhan sektor ini menurun. Hal ini akan menjadi masalah bagi masyarakat. Selama ini diduga terjadi pemenuhan kebutuhan terutama untuk gas dari wilayah-wilayah sekitar Kota Bogor. Meskipun berdasarkan aturan hal tersebut tidak diperbolehkan. Terkait listrik adanya tindakan pemadaman bergilir bukan lagi menjadi hal aneh di Kota Bogor. Kedepannya pemerintah harus lebih memperhatikan pasokan listrik dan gas di wilayah Kota Bogor.

Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh **lapangan usaha Informasi dan Komunikasi yaitu sebesar 11,85 persen**. Dari 17 lapangan usaha yang ada, sebanyak 15 lapangan usaha mengalami pertumbuhan yang positif. Sepuluh lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif sebesar lima hingga sepuluh persen. Sementara lima lapangan usaha lainnya berturut-turut tercatat mengalami pertumbuhan positif namun lebih rendah, yaitu kurang dari lima persen.

Delapan lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif sebesar lima hingga sepuluh persen tersebut antara lain: lapangan usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 11,85 persen, lapangan usaha Jasa Lainnya sebesar 9,78 persen, lapangan usaha Real Estat sebesar 9,31 persen, lapangan usaha Jasa Pendidikan sebesar 8,67 persen, lapangan usaha Jasa Perusahaan sebesar 8,42 persen, lapangan usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 8,38 persen, lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 8,37 persen, lapangan usaha Konstruksi sebesar 7,24 persen, lapangan usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 7,13 persen, dan lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 5,35 persen.

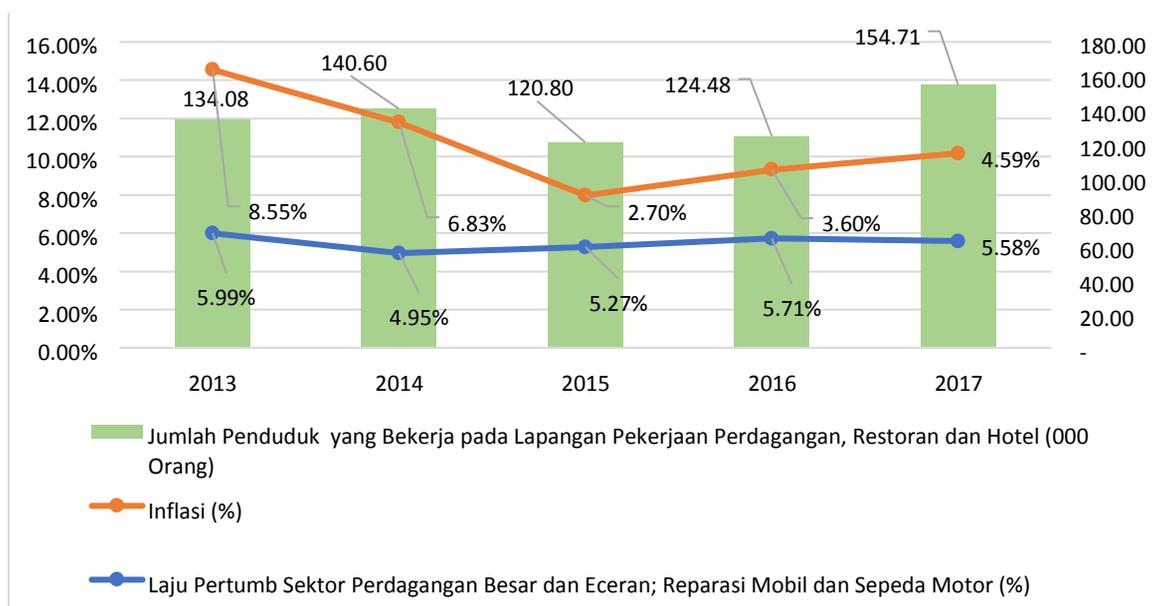
Sedangkan lima lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif kurang dari 5 (lima) persen adalah lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 4,83 persen, lapangan usaha Perdagangan Besar dan eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 4,58 persen, lapangan usaha Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 3,48

persen, lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 1,88 persen, dan lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial sebesar 0,19 persen.

Sebagai sektor yang memiliki kontribusi tertinggi di Kota Bogor, sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor memiliki laju pertumbuhan yang berfluktuasi dan cenderung turun pada tahun 2017. Di sisi lain jumlah tenaga kerja yang terserap pada sektor ini mengalami peningkatan. Hal ini diduga karena adanya dorongan untuk memproduksi lebih banyak saat kondisi inflasi tinggi.

Pada tahun 2016, laju pertumbuhan sektor perdagangan besar ini mengalami laju pertumbuhan yang cukup tinggi yaitu sebesar 5,71%. Peningkatan laju pertumbuhan sektor ini sejalan juga dengan peningkatan inflasi di Kota Bogor. Hal ini diduga karena adanya dorongan untuk memproduksi lebih banyak saat kondisi inflasi tinggi.

Sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor memiliki kontribusi tertinggi terhadap PDRB Kota Bogor, hal ini sejalan dengan kondisi dimana jumlah tenaga kerja yang bekerja di lapangan pekerjaan perdagangan, restoran dan hotel di Kota Bogor terus mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



Sumber: BPS Kota Bogor 2019 (diolah)

Gambar 2.1. Hubungan Laju Pertumbuhan dan Jumlah Pekerja di Sektor Tertinggi, serta Inflasi di Kota Bogor Tahun 2013-2017

PDRB menunjukkan jumlah output yang dihasilkan oleh suatu wilayah, sehingga terkait dengan jumlah tenaga kerja yang bekerja di lapangan usaha yang tersedia. Sejalan dengan hal tersebut, tinggi rendahnya kontribusi sektor-sektor perekonomian di Kota

Bogor juga dapat tergambar pada jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam lapangan usaha sector sektor tersebut.

Rendahnya laju pertumbuhan sektor pertanian, perkebunan dan perikanan juga diduga dipengaruhi oleh kondisi tenaga kerja di lapangan usaha ini yang terus mengalami penurunan. Menurunnya jumlah lahan pertanian di Kota Bogor menjadi salah satu penyebab rendahnya tenaga kerja yang terserap di sektor ini. Sebaliknya Kota Bogor sebagai kota perdagangan dan jasa, maka tenaga kerja banyak terserap di sektor tersebut. Jumlah penduduk Kota Bogor yang bekerja menurut lapangan usaha disajikan pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5.

Penduduk Kota Bogor yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2013-2017

Lapangan Kerja	2013	2014	2015	2016	2017
Pertanian, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan	8.325	6.606	4.981	5.278	3.219
Industri Pengolahan	62.147	54.485	58.416	58.521	71.825
Perdagangan, Restoran dan Hotel	134.076	140.595	120.802	124.479	154.706
Jasa Kemasyarakatan	100.559	105.681	119.126	121.824	105.381
Lainnya (Penggalian, Listrik, Gas dan Air, Angkutan, Pergudangan & Komunikasi)	98.521	107.795	97.658	96.876	113.255
Jumlah	403.628	415.162	400.983	406.978	448.386

Sumber : Kota Bogor Dalam Angka Tahun 2014-2018

Berdasarkan data diketahui bahwa, pada tahun 2013-2017, jumlah penduduk yang bekerja paling banyak terdapat di sektor Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan, dan Hotel, dengan proporsi yang cenderung berfluktuasi sepanjang kurun waktu tersebut. Pada tahun 2013, jumlah penduduk yang bekerja di sektor tersebut adalah sebanyak 134.076 atau sebesar 33,21 persen, kemudian pada tahun 2014 jumlahnya meningkat lagi menjadi 140.595 dengan proporsi menjadi 33,87 persen. Pada Tahun 2015 dan 2016 terjadi peningkatan juga sebesar 3,88 persen, dan naik kembali pada tahun 2017 menjadi 154.706 jiwa dengan proporsi sebesar 34,50 persen.

Jumlah penduduk yang bekerja terbanyak setelah sektor Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan, dan Hotel adalah sektor Jasa Kemasyarakatan berturut-turut diikuti oleh sektor Lainnya, sektor industri pengolahan dan sektor pertanian. Sektor jasa

kemasyarakatan dengan jumlah mengalami fluktuatif selama tahun 2013-2016 mengalami turun-naik, kemudian sampai tahun 2017 sebanyak 105.381 jiwa dengan proporsi menjadi 23,50 persen, tetapi tetap menjadi peringkat kedua. Sektor Lainnya sebagai sektor yang jumlah penduduk bekerjanya terbanyak ketiga, proporsinya terus meningkat selama tahun 2013- 2017, yakni dari 24,40 persen pada tahun 2013 menjadi 25,26 persen pada tahun 2017.

Sektor Industri Pengolahan menduduki posisi keempat justru mengalami penurunan. Pada tahun 2013, jumlah penduduk yang bekerja di sektor industri pengolahan adalah sebanyak 62.147 jiwa dengan *share* sebesar 15,40 persen, kemudian pada tahun 2017 menjadi 71.825 jiwa dengan *share* menjadi sebesar 16,02 persen, terjadi kenaikan sebesar 0.62 persen. Sedangkan pada pertanian mengalami penurunan yang dratis selama tahun 2013-2017 dari jumlah 8.325 jiwa menjadi 3.219 jiwa.

2.1.2 Pendapatan Per Kapita

PDRB per kapita adalah ukuran produktivitas dari faktor-faktor produksi dalam suatu wilayah untuk melakukan transformasi berbagai sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan sumberdaya finansial dalam proses produksi sehingga dapat menghasilkan sejumlah pendapatan dimana pendapatan tersebut belum tentu seluruhnya diterima dan dinikmati masyarakat suatu wilayah tersebut.

PDRB per kapita sering menjadi acuan untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk. Semakin tinggi PDRB per kapita suatu daerah, semakin baik tingkat perekonomian daerah tersebut, walaupun ukuran ini belum mencakup faktor kesenjangan pendapatan antar penduduk. Meskipun masih terdapat keterbatasan, indikator ini sudah cukup memadai untuk mengetahui tingkat perekonomian suatu daerah dalam lingkup makro, paling tidak sebagai acuan memantau kemampuan daerah dalam menghasilkan produk domestik barang dan jasa.

Tabel 2.6.**PDRB per Kapita Kota Bogor dan Pertumbuhannya, 2013-2017**

Tahun	Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rp.)	Pertumbuhan (%)	Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Juta Rp.)	Pertumbuhan (%)
2013	25.750	10,35	22.200	4,16
2014	29.148	11,75	22.695	5,90
2015	32.365	11,04	24.033	6,11
2016	35.401	9,38	25.502	6,74
2017	38.507	8,77	27.221	6,04

Sumber: Kota Bogor Dalam Angka, Tahun 2018

PDRB per kapita Kota Bogor terus mengalami peningkatan selama periode 2013–2017, rata-rata mencapai lebih dari 10% pada tahun 2015. Pada tahun 2016 PDRB per kapita Kota Bogor atas dasar harga berlaku mencapai Rp 35.401 juta kemudian naik menjadi Rp 38.507 juta pada tahun 2017, mengalami sedikit peningkatan dibandingkan tahun 2016 sebesar 8,77% (Tabel 4.6).

Berdasarkan data di atas, juga diketahui bahwa pendapatan per kapita berdasarkan PDRB harga berlaku maupun PDRB Atas Dasar Harga Konstan menunjukkan laju pendapatan per kapita menurun pada 2016-2017. Hal ini juga dikarenakan berbagai kondisi penurunan berbagai sektor penyusun lapangan usaha di Kota Bogor. Meskipun pada tahun-tahun sebelumnya PDRB per kapita mengalami pertumbuhan yang meningkat, peningkatan PDRB per kapita tersebut masih belum menggambarkan secara riil kenaikan daya beli masyarakat Kota Bogor secara umum.

Hal ini disebabkan pada PDRB per kapita yang dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku masih terkandung faktor perubahan harga (inflasi atau deflasi) yang sangat berpengaruh terhadap daya beli masyarakat. Untuk memantau perkembangan daya beli masyarakat secara riil dapat digunakan PDRB per kapita yang dihitung dari PDRB atas dasar harga konstan, yaitu dengan asumsi tidak ada perubahan harga. Dari Tabel 4.6 dapat dilihat bahwa PDRB per kapita yang dihitung dari PDRB atas dasar harga konstan pada tahun 2014 mencapai Rp 22.695 juta, pada tahun 2015 menjadi Rp 24.033 juta dan pada tahun 2016 mencapai Rp 25.502 juta. Sedangkan pada tahun 2017, PDRB per kapita Kota Bogor mencapai Rp 27.221 juta. Dari dua kondisi di atas memberi gambaran bahwa secara riil daya beli masyarakat tumbuh sebesar 6,04% pada tahun 2016.

2.1.3 Analisis Sektor Basis

Pembangunan perekonomian suatu wilayah tentunya tidak terlepas dari kontribusi dan peran setiap sektor yang menyusun perekonomian daerah tersebut. Setiap sektor baik sektor utama maupun bukan, nantinya akan membentuk keragaan perekonomian daerah tersebut. Dalam bagian ini akan dibahas mengenai peran sektor dalam struktur perekonomian dan Pengembangan Kawasan di Kota Bogor berdasarkan indikator ekonomi pendapatan wilayah (PDRB) atas harga konstan tahun 2010 lima tahun terakhir yaitu tahun 2013-2017.

a) Analisis Sektor Basis dalam Perekonomian Kota Bogor

Analisis yang digunakan untuk menganalisis sektor basis dan sektor non basis di wilayah Kota Bogor digunakan analisis *Location Quotient* (LQ) dengan menggunakan data PDRB berdasarkan harga konstan 2000 untuk periode 2013-2017. Pada penelitian ini metode LQ digunakan untuk mengetahui basis dan non basis setiap sektor perekonomian di tingkat Kota (wilayah bawah) terhadap Provinsi (wilayah atas). Nilai-nilai LQ tersebut merupakan rasio antara masing-masing sektor di Kota Bogor dengan peran sektor-sektor tersebut di Indonesia. Nilai-nilai LQ tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.7.

Tabel 2.7.

Nilai LQ Sektor-Sektor Ekonomi di Kota Bogor Berdasarkan Harga Konstan Tahun 2010 pada Tahun 2013-2017

Kode	Lapangan Usaha	Nilai LQ					Kriteria Tahun 2017
		2013	2014	2015	2016	2017	
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0,11	0,11	0,22	0,11	0,10	Non Basis
B	Pertambangan dan Penggalian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Non Basis
C	Industri Pengolahan	0,44	0,44	0,85	0,44	0,44	Non Basis
D	Pengadaan Listrik dan Gas	7,91	7,75	13,88	6,95	4,78	Basis
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,38	1,40	2,65	1,34	1,15	Basis

Kode	Lapangan Usaha	Nilai LQ					Kriteria
		2013	2014	2015	2016	2017	Tahun 2017
F	Konstruksi	1,42	1,40	2,65	1,37	1,37	Basis
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,40	1,41	2,72	1,42	1,46	Basis
H	Transportasi dan Pergudangan	2,53	2,47	4,73	2,42	2,03	Basis
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,88	1,85	3,45	1,76	1,68	Basis
J	Informasi dan Komunikasi	1,70	1,70	3,30	1,67	2,31	Basis
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,86	2,82	5,21	2,64	2,43	Basis
L	Real Estate	1,90	1,93	3,69	1,93	2,14	Basis
M,N	Jasa Perusahaan	5,21	5,05	9,61	4,96	5,02	Basis
O	Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,29	1,31	2,43	1,24	0,99	Non Basis
P	Jasa Pendidikan	1,11	1,08	2,03	1,05	1,00	Basis
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,79	1,73	3,24	1,66	1,77	Basis
R,S,T,U	Jasa Lainnya	1,77	1,69	3,21	1,64	1,70	Basis

Sumber : BPS Pusat dan Kota Bogor (diolah)

Hasil perhitungan nilai LQ dari Tabel 7 di atas dari seluruh sektor perekonomian berdasarkan indikator pendapatan wilayah dalam kurun 5 tahun, yaitu tahun 2013-2017. Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estate; Jasa Perusahaan; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan Jasa Lainnya merupakan sektor basis utama di Kota Bogor pada tahun 2013-2017.

Sektor basis adalah sektor yang mempunyai nilai LQ lebih besar dari satu, artinya suatu sektor telah mampu memenuhi kebutuhan akan sektor tersebut di daerahnya dan mempunyai potensi untuk diekspor ke luar daerah. Sebaliknya jika nilai LQ kurang dari satu berarti daerah yang bersangkutan termasuk sektor non basis dan harus mengimpor dari luar daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Sektor basis terbesar adalah sektor Jasa Perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa sektor Jasa Perusahaan memiliki keunggulan nilai kontribusi dalam perekonomian Kota Bogor, serta layak untuk dikembangkan di Kota Bogor. Jika dilihat di Kota Bogor maka dapat diketahui bahwa jasa perusahaan terutama yang berkaitan dengan pembiayaan berkembang sangat pesat di Kota Bogor.

Berdasarkan nilai LQ tersebut menunjukkan bahwa Kota Bogor telah mampu berswasembada atau setidaknya telah mampu mencukupi kebutuhannya terkait sektor basis yang ada untuk Kota Bogor sendiri dan bahkan dapat memasarkan surplus produksinya ke wilayah lain. Ekspansi yang dilakukan ke luar wilayah tersebut akan memperbesar arus pendapatan ke dalam wilayah sehingga mendorong peningkatan pendapatan masyarakat, meningkatkan volume kegiatan sektor lainnya dan akan memperluas pendapatan wilayah secara keseluruhan.

Berdasarkan kondisi tersebut, prioritas pembangunan sudah saatnya diberikan pada sektor sebagai sektor basis, karena telah terbukti mempunyai keuntungan lokasi berupa keadaan geografis dan agroklimat, sumberdaya alam dan faktor pendukung lainnya yang tidak dimiliki oleh sektor lainnya.

b) Analisis Shift Share Kota Bogor Analisis indeks Rasio Pertumbuhan

Rasio PDRB Kota Bogor dan PDRB Provinsi Jawa Barat dapat ditunjukkan dalam bentuk nilai R_a , R_i , dan r_i . Jika nilai PDRB Kota Bogor dan PDRB Provinsi Jawa Barat tiap sektor diperbandingkan antara dua titik waktu, yaitu tahun 2017 sebagai tahun akhir analisis dan tahun 2013 sebagai tahun dasar analisis, maka setiap sektor mempunyai rasio yang berbeda-beda.

Nilai R_a diperoleh dari selisih antara total PDRB Provinsi Jawa Barat pada tahun 2017 dengan total PDRB Provinsi pada tahun 2013. nilai R_a tiap sektor untuk setiap daerah pada tingkat provinsi memiliki besaran yang sama, karena merupakan pembagian total PDRB, yaitu sebesar 1,64.

Nilai R_i diperoleh dari selisih antara PDRB Indonesia sektor i pada tahun 2017 dengan PDRB Indonesia sektor i pada tahun 2013 dibagi PDRB Provinsi Jawa Barat sektor i

pada tahun 2013. Nilai Ri setiap sektor di Kota Bogor bernilai positif, ini berarti bahwa setiap sektor-sektor perekonomian mengalami pertumbuhan yang positif.

Tabel 2.8.
Nilai Ra, Ri dan ri Kota Bogor

No.	Lapangan Usaha	Ra	Ri	ri
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1,64	1,66	1,08
2	Pertambangan dan Penggalian	1,64	0,95	0,00
3	Industri Pengolahan	1,64	1,58	1,24
4	Pengadaan Listrik dan Gas	1,64	1,80	0,85
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,64	1,88	1,22
6	Konstruksi	1,64	1,68	1,27
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,64	1,52	1,23
8	Transportasi dan Pergudangan	1,64	2,16	1,35
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,64	1,86	1,30
10	Informasi dan Komunikasi	1,64	1,69	1,79
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,64	1,90	1,26
12	Real Estate	1,64	1,49	1,30
13	Jasa Perusahaan	1,64	1,72	1,29
14	Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,64	1,84	1,09
15	Jasa Pendidikan	1,64	2,00	1,41
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,64	2,00	1,54
17	Jasa Lainnya	1,64	1,81	1,35
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	1,64	1,64	1,27

Sumber: BPS Kota Bogor, 2010 (diolah)

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa sektor Transportasi dan Pergudangan memiliki nilai Ri terbesar yaitu sebesar 2,16. Hal ini didukung oleh tingkat pertumbuhan sektor Transportasi dan Pergudangan yang merupakan terbesar di Provinsi Jawa Barat, sedangkan nilai Ri terkecil ditempati sektor Pertambangan dan Penggalian, yaitu sebesar 0,95.

Nilai ri dihitung berdasarkan selisih antara PDRB Kota Bogor sektor i dan pada tahun 2017 dengan PDRB Kota Bogor sektor i pada tahun 2013 dibagi PDRB Provinsi Jawa Barat sektor i pada tahun 2013. Nilai ri Kota Bogor dari masing-masing sektor bernilai positif. Sektor Informasi dan Komunikasi memiliki nilai ri terbesar yaitu 1,79. Sedangkan nilai ri yang terkecil dimiliki oleh sektor Informasi dan Komunikasi yaitu dimana tidak terdapat sektor tersebut di Kota Bogor sehingga nilai r1 bernilai nol.

➤ Analisis Komponen Pertumbuhan Wilayah

Analisis *shift share* diasumsikan bahwa perubahan tenaga kerja/produksi disuatu wilayah antara tahun dasar dengan tahun akhir analisis dibagi menjadi tiga komponen pertumbuhan yaitu komponen pertumbuhan regional/nasional (PR), komponen pertumbuhan proporsional (PP), dan komponen pertumbuhan pangsa wilayah (PPW). Berdasarkan Tabel 4.9, dapat dilihat bahwa komponen pertumbuhan regional semua sektor-sektor perekonomian Kota Bogor bernilai positif.

Tabel 2.9.

Komponen Pertumbuhan Regional Kota Bogor Tahun 2013-2017 (Juta Rupiah)

No.	Lapangan Usaha	Pertumbuhan Regional (Juta Rupiah)
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	137.450
2	Pertambangan dan Penggalian	-
3	Industri Pengolahan	2.748.469
4	Pengadaan Listrik dan Gas	623.017
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	15.199
6	Konstruksi	1.624.053
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.249.705
8	Transportasi dan Pergudangan	1.586.562
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	637.208
10	Informasi dan Komunikasi	680.192
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	984.393
12	Real Estate	311.904
13	Jasa Perusahaan	290.248

No.	Lapangan Usaha	Pertumbuhan Regional (Juta Rupiah)
14	Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	398.315
15	Jasa Pendidikan	373.227
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	156.923
17	Jasa Lainnya	469.882
	Produk Domestik Regional Bruto	14.286.747

Sumber: BPS Kota Bogor, 2018 (diolah)

Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB pada komponen pertumbuhan regional, yaitu sebesar Rp 3.249.705 juta. Hal ini menunjukkan bahwa sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sangat berpengaruh terhadap perubahan kebijakan ekonomi yang terjadi di Kota Bogor. Sebaliknya dari sektor-sektor yang ada di Kota Bogor, maka sektor terkecil di Kota Bogor adalah Pertambangan dan Penggalian serta

Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang. Hal ini menunjukkan Jika terjadi perubahan kebijakan ekonomi di Indonesia, maka sektor pertambangan dan penggalian dan Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang tidak terlalu berpengaruh terhadap perubahan kebijakan ekonomi.

Selanjutnya Tabel 2.10 menggambarkan beberapa sektor-sektor ekonomi di Kota Bogor memberikan kontribusi yang negatif terhadap PDRB. Jika nilai PP suatu sektor ($P_{pi} < 0$), maka dapat diidentifikasi bahwa sektor-sektor tersebut memiliki laju pertumbuhan yang lambat dan memiliki daya saing yang kurang baik jika dibandingkan dengan sektor lain yang PP-nya positif. Sektor-sektor yang memberikan kontribusi negatif terbesar adalah sektor transportasi dan perdagangan memberikan kontribusi terkecil terhadap PDRB Kota Bogor.

Tabel 2.10.

Komponen Pertumbuhan Proporsional Kota Bogor Tahun 2013-2017 (Juta Rupiah)

No.	Lapangan Usaha	Pertumbuhan Proporsional (Juta Rupiah)	Persen
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	- 4.319,01	(0,00)
2	Pertambangan dan Penggalian	-	-
3	Industri Pengolahan	234.210,89	0,12
4	Pengadaan Listrik dan Gas	- 162.990,12	(0,08)
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	- 5.784,18	(0,00)
6	Konstruksi	- 114.560,89	(0,06)
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	603.017,50	0,30
8	Transportasi dan Pergudangan	- 1.303.928,80	(0,66)
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	- 227.651,03	(0,11)
10	Informasi dan Komunikasi	- 59.967,39	(0,03)
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	- 413.497,14	(0,21)
12	Real Estate	73.614,13	0,04
13	Jasa Perusahaan	- 38.835,23	(0,02)
14	Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	- 126.761,55	(0,06)
15	Jasa Pendidikan	- 213.326,85	(0,11)
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	- 91.243,75	(0,05)
17	Jasa Lainnya	- 128.624,02	(0,06)

Sumber: BPS Kota Bogor, 2018 (diolah)

Sedangkan sektor yang memberikan kontribusi yang positif dengan persentase yang lebih dari nol ($PP > 0$) terbesar adalah Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar Rp 603.017,50 Juta (30 persen). Hal ini menunjukkan bahwa sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Perdagangan Besar dan Eceran,

Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, memiliki laju pertumbuhan yang cepat dan memiliki daya saing yang terbaik dari pada sektor-sektor lainnya yang ada di Kota Bogor.

Komponen pertumbuhan selanjutnya adalah komponen pertumbuhan pangsa wilayah. Suatu wilayah mempunyai daya saing wilayah terhadap sektor i apabila PPW-nya positif (PPW>0). Berdasarkan Tabel 4.11, diketahui bahwa sektor yang mempunyai daya saing wilayah yang tinggi adalah sektor Informasi dan Komunikasi

Tabel 2.11.

Komponen Pertumbuhan Pangsa Wilayah Kota Bogor Tahun 2013-2017 (Juta Rupiah)

No.	Lapangan Usaha	Pertumb Pangsa Wilayah (Juta Rupiah)	Persen
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	- 125.059	- 1,54
2	Pertambangan dan Penggalian	-	-
3	Industri Pengolahan	- 1.488.193	- 18,34
4	Pengadaan Listrik dan Gas	-934.569	- 11,51
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	- 15.704	- 0,19
6	Konstruksi	- 1.056.890	- 13,02
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	- 1.455.064	- 17,93
8	Transportasi dan Pergudangan	- 2.020.944	- 24,90
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	- 563.676	- 6,94
10	Informasi dan Komunikasi	109.166	1,35
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	- 995.791	- 12,27
12	Real Estate	- 89.330	- 1,10
13	Jasa Perusahaan	- 195.080	- 2,40
14	Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	- 468.339	- 5,77
15	Jasa Pendidikan	- 347.342	- 4,28
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	- 113.695	- 1,40
17	Jasa Lainnya	- 336.583	- 4,15
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	-8.116.445	- 100,00

Sumber: BPS Kota Bogor, 2018 (diolah)

Sektor yang mempunyai daya saing wilayah yang paling **kurang baik** adalah sektor **Transportasi dan Pergudangan**. Persentase nilai komponen pertumbuhan pangsa wilayah dari sektor tersebut merupakan yang terendah dibandingkan sektor lain yang nilai PPW negatif.

2.2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

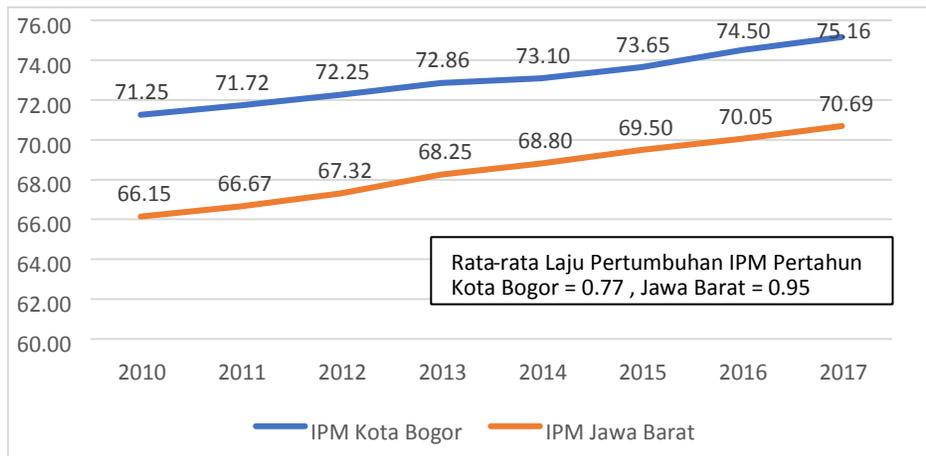
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia yang dapat menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM mengukur pencapaian rata-rata sebuah daerah (kabupaten/kota/Provinsi) dalam 3 dimensi dasar pembangunan manusia. Untuk melihat kemajuan pembangunan manusia, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu kecepatan dan status pencapaian.

Nilai IPM di Kota Bogor dalam beberapa tahun terakhir ini mengalami kenaikan yang melambat. Hal ini dikarenakan komponen-komponen dalam menghitung IPM, seperti Angka Harapan Hidup (AHH), Rata-rata lama sekolah, angka harapan sekolah dan pengeluaran perkapita tidak mengalami kenaikan yang tinggi. Peningkatan nilai dari tahun 2016 ke 2017, untuk AHH meningkat sebesar 0,06 persen, rata-rata lama sekolah naiknya hanya 0,01 persen, angka harapan sekolah naiknya 0,36 persen dan pengeluaran perkapita dari sebelumnya Rp10.662 di 2016 menjadi Rp 10.940 di 2017.

Nilai rata-rata lama sekolah (RLS) di Kota Bogor pada tahun 2017 adalah 10,29. Ini berarti dari jumlah seluruh penduduk usia 5 tahun keatas baik yang masih sekolah ataupun putus sekolah, rata-rata tingkat pendidikannya baru sampai kelas 2 SMA atau belum sampai tamat SMA. Sedangkan angka harapan sekolah (HLS) dari sebelumnya 13,01 meningkat di angka 13,37 atau sudah tamat SMA namun tidak lanjut kuliah.

Secara umum Indeks Pembangunan Manusia Kota Bogor dari tahun 2010 hingga tahun 2017 selalu mengalami peningkatan dari 71,25 (2010) menjadi 75,16 (2017). Selama periode tersebut pencapaian nilai IPM Kota Bogor dinilai cukup baik dengan dapat meningkatkan indeks IPM sebesar 3,91 dengan rata-rata laju pertumbuhan IPM sebesar 0,77 point per tahun. Berdasarkan United Development Programme (UDP) IPM Kota Bogor masuk kategori Tinggi dengan kirsan IPM 70-80. Pencapaian IPM Kota Bogor tergolong baik bila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat yang baru mencapai point 70.69 pada tahun 2017, namun bila dibandingkan laju pertumbuhan rata-rata IPM nya

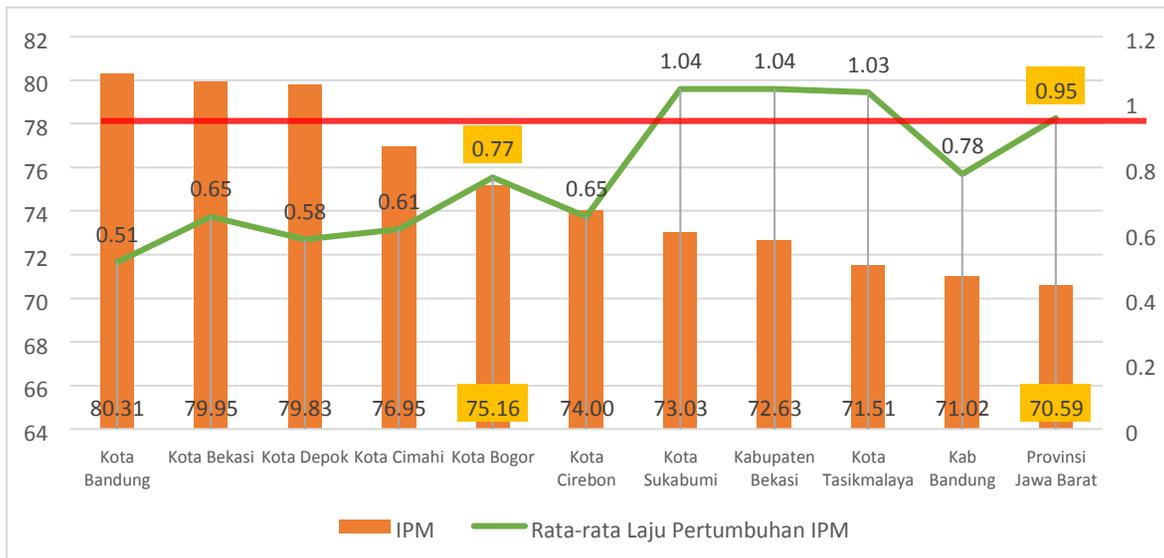
Provinsi Jawa Barat lebih tinggi dibandingkan dengan Kota Bogor yaitu 0.95 pertahun (Gambar 2.2).



Sumber : BPS Kota Bogor dan Jawa Barat (diolah), 2018

Gambar 2.2. Perkembangan IPM Kota Bogor Periode 2010-2017

Pencapaian IPM Provinsi Jawa Barat dipengaruhi oleh Kabupaten/Kota termasuk Kota Bogor yang membantu pencapaian peningkatan IPM Provinsi Jawa Barat. Peringkat IPM Kota Bogor di tahun 2013 menduduki peringkat kelima (5) se Provinsi Jawa Barat (Gambar 2.3). Akan tetapi jika dibandingkan dengan seluruh kabupaten/kota se Indonesia maka peringkat IPM Kota Bogor dalam periode 2014-2017 mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2014, IPM Kota Bogor berada pada peringkat ke 80, kemudian meningkat menjadi peringkat 75 pada tahun 2017 dari 255 kabupaten/kota di Indonesia. Hal ini memperlihatkan bahwa peningkatan perkembangan IPM di daerah lain menunjukkan perkembangan yang relatif lebih baik dibandingkan Kota Bogor. Dan ini perlu menjadi perhatian agar peringkat IPM Kota Bogor secara nasional tidak mengalami penurunan. Berdasarkan data, rata-rata laju pertumbuhan IPM Kota Bogor merupakan tinggi diatas 0.50 dibandingkan dengan 5 Kab/Kota dengan IPM tertinggi se Jawa Barat. Rata-rata laju Pertumbuhan IPM, menunjukkan jumlah peningkatan IPM pertahun dan potensi peningkatannya.

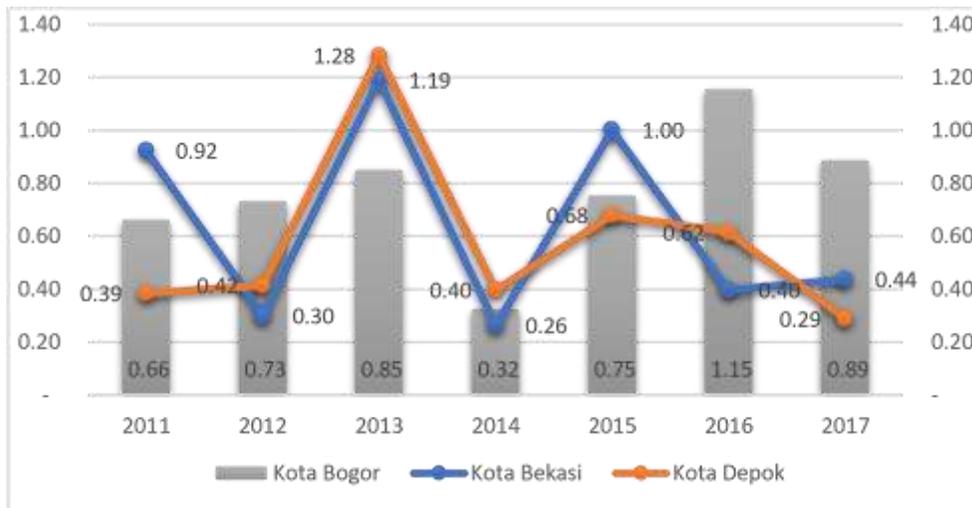


Sumber : BPS Jawa Barat (diolah), 2018

Gambar 2.3. Capaian IPM Tertinggi Kab/Kota di Provinsi Jabar Tahun 2017

Capaian angka IPM suatu daerah seperti Kota Bogor akan menentukan peringkat antar Kabupaten/Kota di provinsi Jawa Barat. Meskipun demikian, untuk menilai keberhasilan pembangunan manusia di suatu daerah tidak mutlak dilihat dari urutan peringkatnya akan tetapi dapat juga berdasarkan besaran nilai reduksi *shortfall*. Berdasarkan ukuran itu terlihat seberapa besar akselerasi capaian pembangunan manusia dalam satu tahun. Nilai reduksi *shortfall* IPM Kota Bogor memiliki percepatan yang fluktuatif dengan kecepatan peningkatan IPM tertinggi terjadi pada periode 2015-2016 sebesar 1,15. Laju pertumbuhan IPM sempat terjadi perlambatan pada tahun 2012-2014 sebesar 0.32 dibawah rata-rata percepatan 0,77 per tahun (Gambar 2.3). Hal ini menunjukkan kecepatan pembangunan di Kota Bogor relatif tidak stabil dan cenderung lambat.

Bila melihat Kota Depok dan Kota Bekasi dimana memiliki kemiripan tipe kota yang serupa dengan kota Bogor yaitu kota yang berbasis jasa dan kota lingkaran luar dari Ibu Kota Negara, perbandingan IPM nya cukup jauh sekitar 5 point dimana Kota Bogor 73 point dan Kota Bekasi dan Depok berada di 78 point. Laju pertumbuhan IPM Kota Bekasi, Depok dan Bogor mengalami perlambatan signifikan pada tahun 2014, kemudian meningkat hingga 2016. Tahun 2017 laju pertumbuhan IPM kembali melambat, namun Kota Bogor laju pertumbuhannya masih lebih baik (0,89) bila dibandingkan dengan kota Depok dan Bekasi yang sangat melambat sekitar 0,29 (Depok) dan 0,44 (Bekasi) (Gambar 2.4).



Sumber: BPS Kota Bogor dan Jawa Barat (diolah), 2018

Gambar 2.4. Perbandingan IPM Kota Bogor, Bekasi dan Depok Periode 2010-2017

Dengan data ini artinya dengan perkembangan kondisi perekonomian dan sosial nasional pada periode 2010-2017, Kota Bogor cenderung dapat mempertahankan percepatan pertumbuhan IPM dibandingkan Kota Depok dan Bekasi. Dalam prakteknya, peningkatan indikator sosial seperti kesehatan dan pendidikan tidak dapat dilakukan dalam jangka pendek. Hal ini berbeda dengan komponen daya beli yang dapat bertambah secara nyata dalam waktu yang relatif singkat seiring dengan keberhasilan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai dampak pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan.

Pencapaian pembangunan manusia diukur dengan memperhatikan tiga aspek esensial yaitu Kesehatan (umur panjang dan hidup sehat), Pendidikan/pengetahuan, dan standar hidup layak/daya beli. Oleh karena itu, peningkatan capaian IPM tidak terlepas dari peningkatan setiap komponennya. Pengukuran IPM terkait dengan indikator-indikator lain sebagai pendukungnya, dimana setiap perubahan pada indikator tersebut memberikan pengaruh terhadap pencapaian pembangunan manusia. Lambatnya laju tingkat pertumbuhan faktor-faktor tersebut, dikarenakan adanya indikator-indikator lain yang juga membentuk faktor-faktor tersebut. Seperti usia harapan hidup masyarakat di suatu daerah, jika dalam daerah tersebut tidak memiliki tingkat sarana dan prasarana kesehatan yang baik, maka akan berdampak pada rendahnya tingkat kesehatan masyarakat, sehingga dapat dikatakan bahwa usia harapan hidup masyarakat tersebut juga akan semakin rendah dan juga mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut juga akan semakin rendah. Sebagai contoh seperti dalam mengukur angka harapan hidup maka terlebih dahulu harus ditentukan tingkat kematian penduduk. Tingkat kematian ditentukan oleh beberapa faktor antara lain ketersediaan pangan,

kemiskinan, keadaan gizi, penyakit menular, keadaan fasilitas kesehatan, kecelakaan, bencana dan kelaparan masal.

2.2.1. Indeks Kesehatan

Usia Harapan Hidup (UHH)

Usia Harapan Hidup (UHH) merupakan salah satu indikator derajat kesehatan yang digunakan sebagai salah satu indikator penghitungan/pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Usia Harapan Hidup memberikan gambaran probabilitas umur maksimal yang dapat dicapai seorang bayi baru lahir hingga dewasa. Indikator ini dipandang dapat menggambarkan taraf hidup suatu kota/kabupaten, sehingga dijadikan salah satu indikator untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Peningkatan Usia Harapan Hidup menunjukkan adanya peningkatan kehidupan dan kesejahteraan penduduk serta meningkatnya derajat kesehatan suatu bangsa. Untuk dapat meningkatkan Usia Harapan Hidup bukan saja diperlukan program pembangunan kesehatan namun diperlukan juga program sosial lainnya seperti program pemberantasan kemiskinan, perbalikan kualitas lingkungan hidup, kecukupan pangan dan gizi.

Indikator Usia Harapan Hidup tidak bisa didapatkan dari sistem pencatatan pelaporan rutin, tetapi melalui estimasi berdasarkan data primer hasil survei atau sensus yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan Dinas Kesehatan Kota Bogor. Berdasarkan Publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) dan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat¹ Capaian Usia Harapan Hidup (UHH) Kota Bogor pada periode 2010-2017 mengalami peningkatan dari 72,54 (2010) menjadi 73,01 (2017), capaian kota bogor berada di atas capaian UHH Provinsi Jawa Barat sebesar 71,29 (2010) menjadi 72,47 (2017). Periode 2010-2014 UHH Kota Bogor relatif stabil di 72,54-72,58 hal ini diduga karena indikator mortalitas sebagai outcome dari indikator derajat kesehatan relatif memiliki nilai yang stabil, dimana yang sebaiknya menurun (Gambar 2.5).

¹ Profil Kesehatan Provinsi Jawa Barat 2010-2017



Sumber : BPS Jawa Barat, 2018

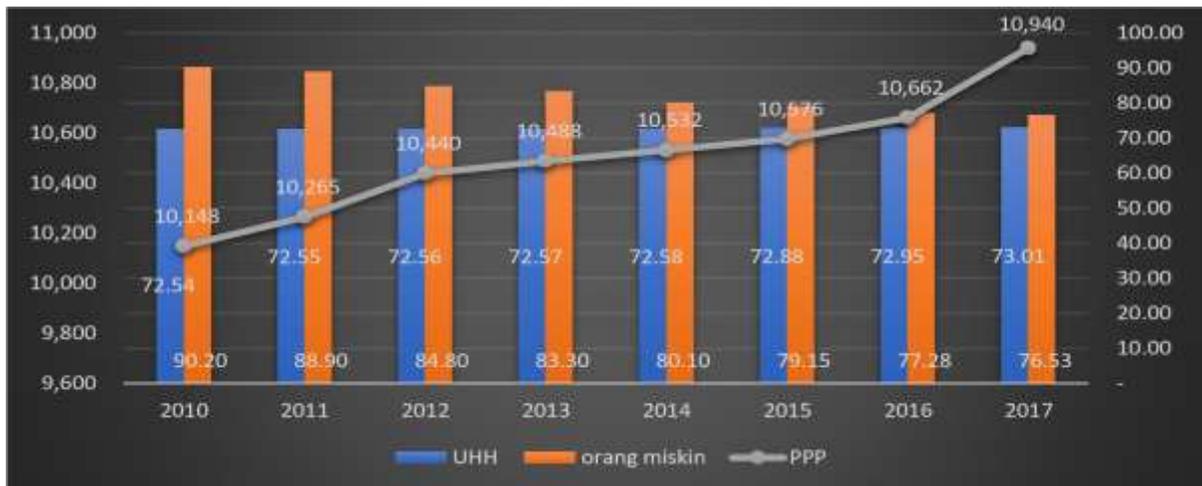
Gambar 2.5. Perkembangan UHH Kota Bogor, Kota Bekasi, Kota Depok dan Jawa Barat Periode 2010-2017

Sebanyak delapan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat mempunyai UHH diatas rata rata Jawa Barat, yaitu (berurutan) Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Bandung, Kota Cimahi, Kab. Bandung, Kab.Bekasi, Kota Bogor, dan Kabupaten Kuningan sebagaimana publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) dan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat². Berdasarkan data tersebut Kota Bogor menempati posisi ke 7 dari 8 Kabuaten/Kota dengan UHH tertinggi dari 27 Kab/Kota di Provinsi Jawa Barat pada periode 2010-2017.

Berdasarkan Data Gambar 4.5, capaian UHH tertinggi di Jawa Barat adalah Kota Bekasi 74,60 tahun dengan laju pertumbuhan 0,10 pertahun, artinya Kota Bekasi dapat menciptakan kondisi sosial dan kesehatan yang cukup baik sehingga masyarakatnya dapat memiliki peluang hidup dengan hingga usia maksimal 74-74,6 tahun.

Bila dibandingkan dengan Kota Bogor hanya terpaut 1-2 tahun yaitu 72-73 tahun. Rata-rata laju pertumbuhan UHH Kota Bogor adalah 0,09 tahun, dimana setiap tahunnya peluang hidup masyarakat Kota Bogor meningkat 0,09 tahun. Adapun demikian laju pertumbuhan UHH pertahun tingkat Provinsi Jawa Barat adalah 0,29 tahun. Pencapaian Usia Harapan Hidup, Kota Bogor selama peridoe tersebut (2010-2017), berdasarkan data turut memiliki korelasi positif oleh penurunan penduduk miskin, dan daya beli masyarakat atau *perchaing pover parity* (PPP). Gambar 4.6. Menjelaskan bahwa populasi penduduk miskin mengalami penurunan dari 90,20 ribu jiwa (2010) menjadi 76,53 ribu jiwa (2017).

² Profil Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2017

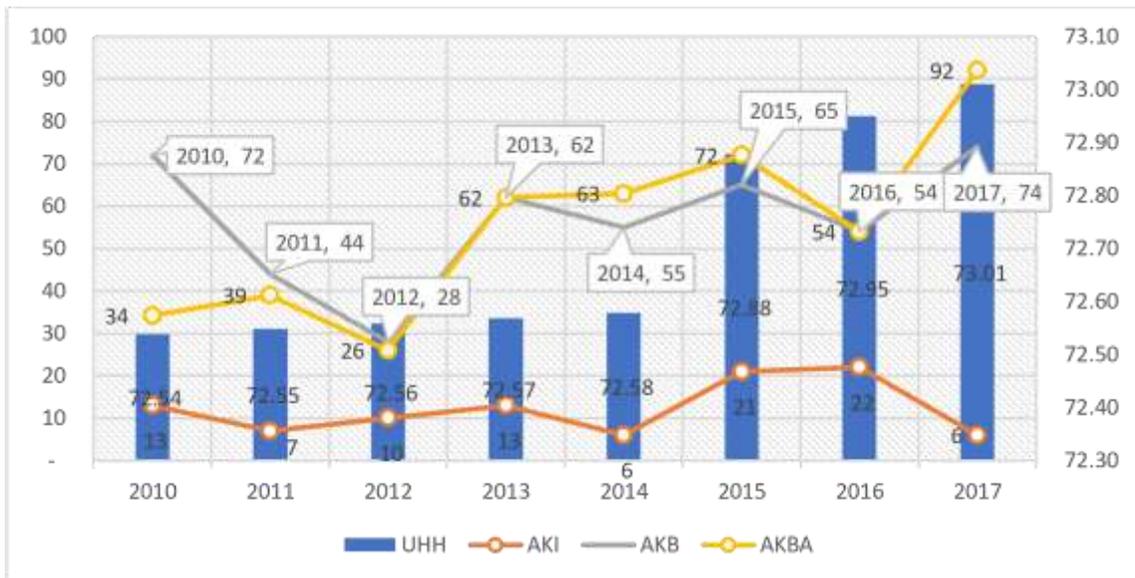


Sumber : BPS Kota Bogor. 2010-2017

**Gambar 2.6. Perkembangan UHH, Orang Miskin dan PPP Kota Bogor
Periode 2010-2017**

Demikian dengan beli masyarakat atau *perchaing pover parity* (PPP), mengalami peningkatan 7.8 % dari Rp 10,148 ribu (2010) menjadi Rp 10,940 (2017). Berdasarkan data tersebut, nampaknya terdapat korelasi positif antara indikator pembangunan tersebut, dimana berkurangnya jumlah penduduk miskin dan peningkatan daya beli sehingga memungkinkan masyarakat memperoleh kesempatan hidup yang lebih lama. Dengan kemampuan membeli lebih baik, masyarakat memiliki daya untuk membeli produk konsumsi dan pengobatan yang lebih baik. Hubungan yang positif antara UHH, Kemiskinan dan PPP bukan menjadikan indikator tersebut menjadi indikator pembentuk UHH, namun dalam perencanaan pembangunan pemerintah dapat mempertimbangkan kondisi tersebut.

Pencapaian Usia Harapan Hidup (UHH) tidak lepas dari Indikator Derajat Kesehatan lainnya yaitu Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Balita (AKBA) suatu daerah. Indikator-indikator tersebut adalah indikator dasar pembentuk UHH individu manusia di suatu daerah. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat² perkembangan Angka Kematian Ibu (AKI) Kota Bogor mengalami penurunan secara jumlah (Gambar 2.7). Selama tahun 2010 telah terjadi kasus 13 kematian ibu dari 1000 populasi Ibu Hamil/Melahirkan/Menyusui yang kemudian turun menjadi menjadi 6 kasus kematian ibu pada tahun 2017. Meskipun angka kematian ibu cenderung menurun, namun kasus kematian Bayi dan Balita masih cukup tinggi.



Sumber : Profil Kesehatan Provinsi Jawa Barat, 2010-2017

Gambar 2.7. Perkembangan UHH, AKI, AKB dan AKBA Kota Bogor Tahun 2010-2017

Kasus Kematian Bayi (AKB) Kota Bogor sebenarnya cenderung turun pada 2012 (28 kasus per 1000 kelahiran bayi) dimana pada 2010 mencapai 72 kasus, namun pada tahun 2013 langsung meroket tajam menjadi 62 kasus. Kasus kematian Balita di Kota Bogor tergolong tinggi dengan rata-rata 55 kasus kematian pada periode 2010-2017. Kasus kematian Balita tertinggi terjadi pada tahun 2010 (72 kasus), tahun 2015 (72 Kasus) dan tertinggi tahun 2017 (92 kasus kematian). Rasio kasus kematian Balita dengan jumlah bayi di Kota Bogor adalah 0,28 % sedangkan bila dibandingkan dengan Kota Depok (0,26 %) dan Kota Bekasi (0,10%).

Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka kematian merupakan indikator *outcome* pembangunan kesehatan. Angka kematian dapat menggambarkan seberapa tinggi derajat kesehatan masyarakat di suatu wilayah. Pada dasarnya penyebab kematian ada yang langsung dan tidak langsung, walaupun dalam kenyataannya terdapat interaksi dari berbagai faktor yang mempengaruhi terhadap tingkat kematian di masyarakat. Berbagai faktor yang berkaitan dengan penyebab kematian, baik langsung maupun tidak langsung, antara lain dipengaruhi oleh tingkat sosial ekonomi, kualitas lingkungan hidup, upaya pelayanan kesehatan dan lain-lain. Di Kota Bogor dan Provinsi Jawa Barat beberapa faktor penyebab kematian perlu mendapat perhatian khusus, diantaranya yang berhubungan dengan kematian ibu dan bayi yaitu besarnya tingkat kelahiran, umur masa paritas, jumlah anak yang dilahirkan serta penolong persalinan. Indikator kematian yang paling sering

digunakan adalah Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Balita (AKBA).

Tabel 2.12.

Perkembangan Derajat Kesehatan Kota Bogor Periode 2010-2017

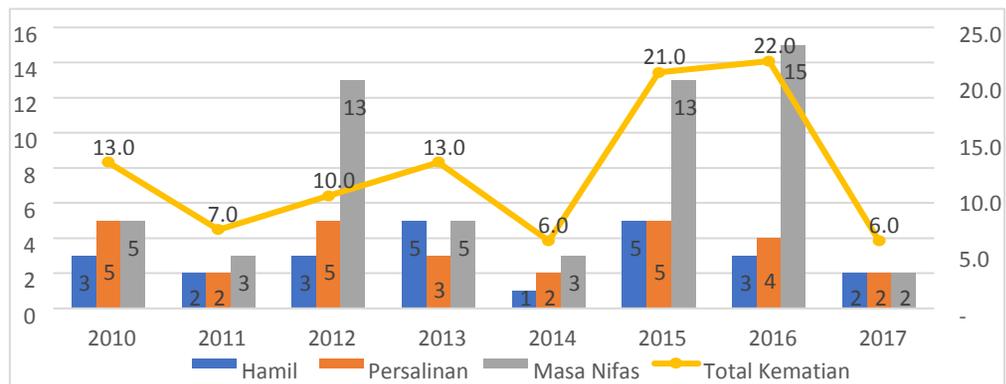
No. Tahun		Usia Harapan Hidup (UHH)	Angka Kematian Ibu (AKI)	Angka Kematian Bayi (AKB)	Angka Kematian Balita (AKBA)
1	2010	72,54	13	72	34
2	2011	72,55	7	44	39
3	2012	72,56	10	28	26
4	2013	72,57	13	62	62
5	2014	72,58	6	55	63
6	2015	72,88	21	65	72
7	2016	72,95	22	54	54
8	2017	73,01	6	74	92
Min		72,54	6	28	26
Max		73,01	22	74	92
Rata-Rata		72,70	12	57	55

Sumber: Profil Kesehatan Jawa Barat 2010-2017

Rata-rata Angka Kematian Ibu (AKI) periode 2010-2017 adalah 12 orang pertahun, dengan rata-rata kematian bayi (AKI) 0-1 Tahun 57 kasus kematian per 100,000 kelahiran bayi di Kota Bogor. Adapun Angka Kematian Rata-rata Balita (1-5 tahun) mencapai 55 balita per tahun, dengan terjadi peningkatan signifikan sebesar 58% dari tahun 2010 (34 kasus) menjadi 92 kasus pada tahun 2017. Angka Kematian Balita sempat turun tajam pada tahun 2016 menjadi 54 kasus dimana sebelumnya 72 kasus pada tahun 2015 (Tabel 4.12). Tinggi atau rendahnya Angka Kematian Ibu mempengaruhi peluang seorang hidup bayi hidup setelah kelahirannya sebagaimana faktor pendukungnya seperti kecukupan ASI, imunisasi dan asupan gizi.

Komplikasi dan kematian ibu maternal serta bayi baru lahir sebagian besar terjadi pada masa di sekitar persalinan. Hal ini antara lain disebabkan pertolongan tidak dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai kompetensi kebidanan. Cakupan persalinan adalah persalinan yang ditangani oleh tenaga kesehatan, angka cakupan ini menggambarkan tingkat penghargaan masyarakat terhadap tenaga penolong persalinan

dan manajemen persalinan KIA dalam memberikan pertolongan persalinan secara professional.



Sumber : Profil Kesehatan Provinsi Jawa Barat, 2010-2017

Gambar 2.8. Perkembangan Kematian Ibu di Kota Bogor periode 2010-2017

Pada tahun 2014 kasus kematian ibu maternal sebanyak 6 kasus, dan meningkat signifikan pada tahun 2015 sebanyak 21 kasus dan tahun 2016 sebanyak 22 kasus dari 20.000 kelahiran hidup yang tercatat, bila dikonversikan ke dalam angka kematian ibu setara dengan 105 per 100 ribu kelahiran hidup. Kematian ibu tersebut terjadi pada ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas, dengan penyebab kematian sebagai berikut: perdarahan 8 kasus (36%), Hipertensi dalam kehamilan 1 kasus (5%), Penyakit jantung & peredarah darah 7 kasus (32%), penyebab lain 6 kasus (27%) (Dinas Kesehatan. 2017³). Penyebab lain ini terdiri dari TB Paru 1 kasus, Lupus 1 kasus, Ileus 1 kasus, Hepatitis 1 kasus dan asma 2 kasus. Dari data di atas menunjukkan bahwa penyebab langsung yang berkaitan dengan kasus kebidanan yaitu perdarahan dan hipertensi dalam kehamilan masih tinggi. Upaya yang dilakukan adalah meningkatkan deteksi dini dan penanganan komplikasi kebidanan, termasuk penanganan kegawatdaruratan kebidanan, tindakan pra rujukan, rujukan efektif dan penanganan di faskes rujukan termasuk fasilitas perawatan intensif (ICU). Penyebab lain yang merupakan penyakit penyerta pada ibu hamil juga tinggi. Hal ini disebabkan pada saat hamil ibu sudah memiliki penyakit lain sehingga terjadi komplikasi hingga kematian.

Pola kematian ibu di Kota Bogor terjadi pada saat masa nifas (60,20%), Persalinan (38,57%) dan waktu hamil (24,49%). Adapun pola kematian ibu di Jawa Barat adalah Persalinan (60,87%), Masa Nifas (30,34%) dan waktu hamil (8,70%). Cukup rendahnya tingkat kematian saat persalinan dibandingkan Jawa Barat dikarenakan jumlah ibu hamil yang melakukan persalinan di fasilitas kesehatan yang dibantu oleh Tenaga Kesehatan

³ Profil Kesehatan Kota Bogor Tahun 2016

Profesional (Dokter, Bidan dan Paramedis) mencapai 94% dari 20,194 persalinan. Hal ini sejalan dengan data mengenai jumlah kematian ibu dari laporan sarana pelayanan kesehatan.

Ditinjau dari sudut pendidikannya, maka diduga terdapat korelasi yang kuat antara pendidikan perempuan dengan besarnya Angka Kematian Ibu. Persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan merupakan salah satu elemen kunci penurunan kematian ibu dan bayi baru lahir. Hal ini penting untuk memastikan ibu melahirkan di tempat yang sesuai, di mana peralatan penyelamatan hidup dan kondisi persalinan yang higienis akan membantu ibu dan bayinya terhindar dari risiko komplikasi yang dapat menyebabkan kesakitan dan kematian ibu (*Kesterton et al., 2010*).

Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka Kematian Bayi (AKB) atau *Infant Mortality Rate (IMR)* adalah Angka yang menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup), selain itu berguna untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orangtua si bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua si bayi. Kemajuan yang dicapai dalam bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian akan tercermin secara jelas dengan menurunnya tingkat AKB. Dengan demikian angka kematian bayi merupakan tolok ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya di bidang kesehatan terutama yang berhubungan dengan bayi baru lahir perinatal dan neo-natal

Berdasarkan kesepakatan internasional AKB merupakan indikator yang menggunakan konsep *rate*, meskipun dalam kenyataannya hanya *ratio*. Angka kematian bayi dan balita juga dapat mencerminkan pola kesehatan suatu daerah, sebab probabilitas peluang hidup bayi (<1 tahun) hingga Balita (1-5 tahun) di suatu kota. Berdasarkan data angka kelahiran selamat dan angka kematian bayi periode 2010-2017, Kota Bogor dibandingkan dengan Kota Bekasi dan Depok memiliki rata-rata kematian bayi (AKB) yang lebih tinggi. Rata-rata pertahun kematian bayi (<1 tahun) di kota bogor adalah 57 bayi dari 1000 bayi yang lahir selamat. Artinya setiap tahun berpeluang wafatnya 1 bayi (<1 tahun) setelah kelahiran yang disebabkan oleh beberapa hal cukup tinggi sekitar 2,91 kasus per 1000 kelahiran hidup (Tabel 2.13).

Tabel 2.13.

Perkembangan Bayi Lahir Hidup dan Angka Kematian Bayi Kota Bogor, Bekasi, dan Kota Depok Periode 2010-2017.

Tahun	Kota Bogor			Kota Bekasi			Kota Depok			
	Ket	Bayi Lahir Hidup	AKB	Probalitas	Bayi Lahir Hidup	AKB	Probalitas	Bayi Lahir Hidup	AKB	Probalitas
2010		20.271	72	3,69	41.516	41	0,87	34.856	114,83	2,89
2011		18.552	44	2,25	45.456	43	0,90	37.130	110,33	2,77
2012		19.999	28	1,43	47.050	47	0,98	40.381	114,00	2,87
2013		18.852	62	3,17	43.809	32	0,67	42.554	113,00	2,84
2014		19.751	55	2,82	48.891	47	0,98	38.597	83,00	2,09
2015		19.012	65	3,33	58.114	76	1,59	40.186	62,00	1,56
2016		19.339	54	2,76	50.620	48	1,00	41.905	92,00	2,31
2017		20.502	74	3,79	47.065	52	1,09	42.665	72,00	1,81
Rata-rata		19.535	57	2,91	47.815	48	1,01	39.784	95,15	2,39

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat (2018)

Perkembangan angka kematian bayi di Kota Bogor sangat fluktuatif dan cenderung meningkat dimana tahun 2010 terjadi 72 kasus hingga tahun 2017 menjadi 74 kasus kematian. Angka kematian sempat turun tahun 2011 dan 2012 yaitu 44 dan 28 kasus, namun kembali meningkat dan cenderung konstan di angka 50-60 kasus pertahunnya. Proporsi kematian kematian bayi berasal dari bayi usia 0-28 hari (Neonatal) sebesar 84,63% atau 2,91/1000 kelahiran hidup. Distribusi penyebab kematian bayi (AKB) usia 0-28 tertinggi adalah 1) Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) 26 kasus (40,6%), 2) Asfiksia 20 kasus (32,3%) dan 3) infeksi sebanyak 7 kasus (11,3 %), icterus 3 kasus (4,7%) dan dan lainnya seperti kelainan bawaan, diare, thalasima dan aspirasi pneumia (12,5%) (Dinas Kesehatan Kota Bogor, 2017⁴).

Berdasarkan jumlah rata-rata bayi/balita di ketiga kota tersebut, Kota bogor masih lebih tinggi tangka kemungkinan terjadinya kasus kematian bayi usia 0-28 hari (Neo-natal) dengan probabilitas kematian 2,91/1.000 kelahiran hidup. Bila dilihat dari jumlah bayi Kota Bogo memiliki rata-rata 20 ribuan Balita sedangkan Kota Bekasi dan Kota Depok berada 40 ribuan balita. Sehingga bila diasumsikan jumlah balita sama (40 ribuan), dengan probabilitas tersebut maka jumlah kasus kematian Balita Kota Bogor akan

⁴ Profil Kesehatan Kota Bogor 2017

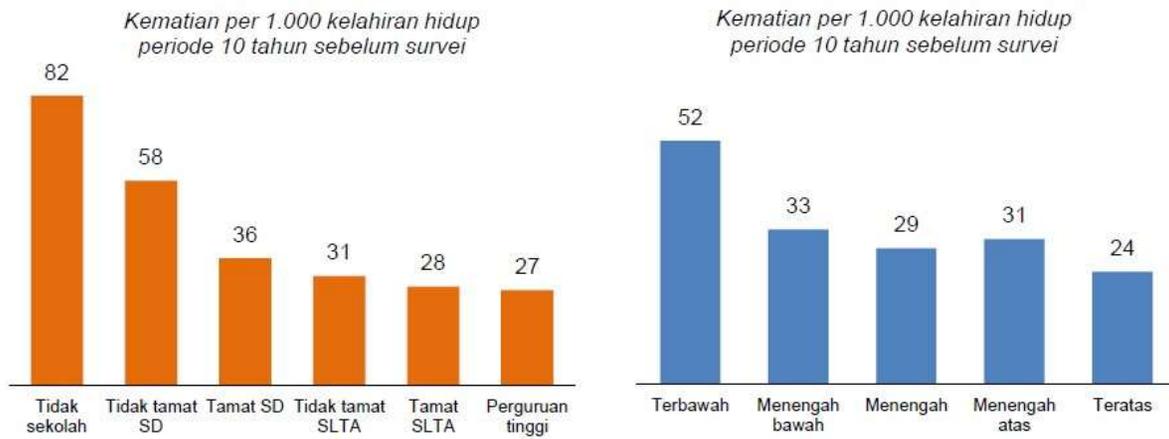
meningkat menjadi 110 kasus kematian atau 5,61/1.000 kelahiran hidup dan ini melebihi rata-rata kematian balita di Jawa Barat yang hanya 4,88 /1.000 kelahiran hidup.

Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian khusus pemerintah kota bogor sebab, anakanak ini adalah masa depan kota bogor dalam 10-25 tahun mendatang akan diketahui hasil dari program pembangunan saat ini. Pemerintah Kota Bogor disarankan dalam penanganan AKB lebih difokuskan pada Bayi Baru Lahir. Walaupun demikian Angka Kematian Bayi di Kota Bogor sebesar 3,73/1.000 kelahiran hidup, sudah jauh melampaui target MDGs yang pada tahun 2015 harus sudah mencapai 17/1.000 kelahiran hidup dan target Nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2018 dengan target 24 per 1.000 kelahiran hidup (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2014) 24 per 1.000 kelahiran hidup. Kota Bogor dan lima kabupaten/kota lainnya (Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Sumedang, Kota Depok proporsi kematian bayi dibawah rata rata di Provinsi Jawa Barat.

Angka Kematian Balita (AKBA)

Anak balita adalah masa anak mulai berjalan dan merupakan masa yang paling hebat dalam tumbuh kembang, yaitu pada usia 12 sampai 59 bulan. Masa ini merupakan masa yang penting terhadap perkembangan kepandaian dan pertumbuhan intelektual. Balita adalah anak yang berumur 0-59 bulan, pada masa ini ditandai dengan proses pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat. Angka kematian Balita adalah Jumlah kematian anak berusia 0-4 tahun selama satu tahun tertentu per 1.000 anak umur yang sama pada pertengahan tahun itu (termasuk kematian bayi), Indikator ini terkait langsung dengan target kelangsungan hidup anak dan merefleksikan kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan anakanak bertempat tinggal termasuk pemeliharaan kesehatannya. Angka Kematian Balita kerap dipakai untuk mengidentifikasi kesulitan ekonomi penduduk.

Secara nasional, berdasarkan Data Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2017, semua indikator kematian anak menunjukkan bahwa kematian pada anak lakilaki lebih tinggi dibandingkan anak perempuan. Kematian anak yang terjadi dari keluarga dengan kelas kekayaan terbawah 2 kali lebih tinggi dibanding anak dari keluarga dengan kelas kekayaan teratas, dan faktor Pendidikan ibu berperan terhadap tingkat kematian anak. AKBA paling tinggi terjadi di antara balita dari ibu yang tidak sekolah (82 per 1.000 kelahiran hidup). AKBA di antara anak dari ibu yang tidak sekolah, tiga kali lebih tinggi dibandingkan anak dari ibu yang lulus perguruan tinggi (SDKI, 2017).

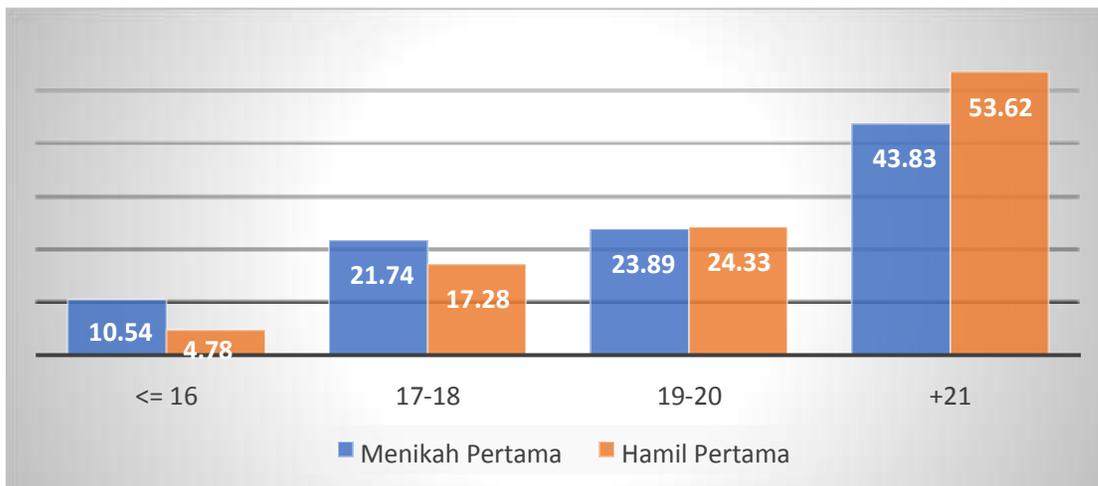


Sumber : Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI), 2017

Gambar 2.9. Perkembangan Kematian Balita Menurut Pendidikan Ibu Dan Kelas Ekonomi/Kekayaan Keluarga (2007-2017)

Berbagai faktor risiko kematian bayi dan anak dipengaruhi oleh karakteristik ibu dan anak dan keadaan kelahiran. Angka kematian anak berdasarkan faktor risiko bio-demografi, yaitu umur saat bersalin, jarak kelahiran dan urutan kelahiran. Anak yang lahir dengan jarak antar kelahiran yang lebih panjang mempunyai risiko kematian yang lebih rendah. Sebagai perbandingan, angka kematian Balita yang lahir dengan jarak antar kelahiran kurang dari 2 tahun adalah 67 per 1.000 kelahiran hidup, sedang untuk bayi yang lahir empat tahun atau lebih setelah kelahiran sebelumnya adalah 30 per 1.000 kelahiran hidup.

Tingkat pendidikan memiliki pengaruh penting dalam tinggi rendahnya kesehatan atau kematian dalam keluarga. Semakin tinggi pendidikan yang dimiliki oleh ibu, maka semakin mudah seseorang tersebut akan menerima hal yang baru mengenai kesehatan dirinya dan keluarganya (anak dan suaminya). Sebaliknya semakin rendah tingkat pendidikan yang dimiliki oleh ibu, maka semakin sulit orang tersebut menerima informasi baru. Berdasarkan Data SDKI 2017, ibu yang memiliki pendidikan tidak sekolah/tidak tamat cenderung memiliki anak lebih dari 4-6 dengan jarak antar kelahiran 2 dan <2 tahun. kondisi tersebut menimbulkan pengalihan fokus ibu dari yang harus diberikan kepada anak balita yang masuk usia ke 2- 3 tahun kepada anak bayinya yg baru lahir <0 tahun. Dengan fokus ibu yang beralih, di tambah faktor ekonomi keluarga yang memiliki kecenderungan menengah bawah dan terbawah menjadi indikasi penyebab semakin tinggi rentang kematian balita tinggi pada kategori tersebut.



Sumber : Susesna 2016 (BPS)

Gambar 2.10. Persentase Usia Pernikahan dan Kehamilan Pertama Perempuan berusia > 10 Tahun di Kota Bogor Tahun 2016

Bila dibandingkan dengan Kota Bogor, berdasarkan data Susenas 2016 (Gambar 4.10) rata-rata penduduk Kota Bogor yang tercatat hingga tahun 2016 melakukan pernikahan dini < 25 tahun relatif tinggi. Berdasarkan data, penduduk yang menikah pada usia aktif sekolah < 18 tahun mencapai 32,28 % (10,54 usia <= 16 dan 21,74 usia 17-18), dimana 4,78 % hamil pertama pada usia <= 16 tahun dan 17,28 % hamil pertama pada usia 17-18. Dengan demikian rata-rata Ibu yang hamil dan menyusui di Kota Bogor tercatat memiliki pendidikan min SMP/SMA (berdasarkan usia aktif sekolah) mencapai 32,28 % dari jumlah populasi wanita di Kota Bogor. Kondisi ini menjelaskan bahwa tingkat usia pernikahan dini di kota Bogor masih relatif tinggi, hal ini mempengaruhi nilai/angka partisipasi sekolah maupun tingkat pendidikan pada angkatan kerja.

Faktor pendidikan juga mempengaruhi rasa ingin tahu seorang ibu terkait kondisi yang sedang dialami anaknya. Dengan perkembangan teknologi, memungkinkan seorang ibu yang memiliki pendidikan lebih baik mengakses informasi kesehatan yang dilakukan pemerintah. Adapun ibu yang memiliki pendidikan rendah cenderung menunggu dan mencari informasi dari sekitar lingkungan keluarga saja dan tidak berkeinginan mencari keluar zona keluarga. Tingkat pendidikan juga memiliki hubungan yang dekat dengan tingkat pendapatan atau ekonomi keluarga, semakin tinggi tingkat pendidikan memiliki peluang tingkat ekonomi yang lebih tinggi. Meskipun PPP Kota Bogor cenderung naik, namun nampaknya pengalihan pengeluaran untuk kesehatan masih rendah dibandingkan dengan pengeluaran konsumsi lainnya, yang mungkin ini menyebabkan angka kematian balita masih cukup tinggi.

Upaya Peningkatan Kesehatan Keluarga dan Masyarakat Imunisasi Bayi

Imunisasi adalah pemberian kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit dengan memasukkan sesuatu ke dalam tubuh agar tubuh tahan terhadap penyakit yang sedang mewabah atau berbahaya bagi seseorang. Imunisasi berasal dari kata imun yang berarti kebal atau resisten. Imunisasi terhadap suatu penyakit hanya akan memberikan kekebalan atau resistensi pada penyakit itu saja, sehingga untuk terhindar dari penyakit lain diperlukan imunisasi lainnya.

Imunisasi adalah kebijakan dan program yang dapat dan perlu dilakukan pemerintah daerah sebagai bentuk upaya peningkatan kesempatan hidup (UHH) bayi yang baru lahir hingga dewasa nantinya. Tujuan dari diberikannya suatu imunitas dari imunisasi adalah untuk mengurangi angka penderita suatu penyakit yang sangat membahayakan kesehatan bahkan bisa menyebabkan kematian pada penderitanya. Beberapa penyakit yang dapat dihindari dengan imunisasi yaitu seperti Hepatitis B, Campak, Polio, Difteri, Tetanus, Batuk Rejan, Gondongan, Cacar Air, TBC, dan lain sebagainya. Imunisasi biasanya lebih fokus diberikan kepada anak-anak karena sistem kekebalan tubuh mereka masih belum sebaik orang dewasa, sehingga rentan terhadap serangan penyakit berbahaya. Imunisasi tidak cukup hanya dilakukan satu kali, tetapi harus dilakukan secara bertahap dan lengkap terhadap berbagai penyakit yang sangat membahayakan kesehatan dan hidup anak.

Tabel 2.14.

Pencapaian Upaya Imunisasi Bayi Kota Bogor Periode 2008-2017

No.	Tahun	Capaian Imunisasai (%)				
		HB 0	BCG	DPT/HB III	Campak	Polio 4
1	2008	82.87	98.08	90.65	93.99	88.68
2	2009	90.19	105.74	100.12	101.44	98.43
3	2010	91.91	106.76	100.64	92.59	96.58
4	2011	96.58	100.56	96.37	95.25	93.24
5	2012	101.42	107.44	99.90	98.71	99.91
6	2013	75.90	98.03	86.00	89.21	94.98
7	2014	98.66	97.76	96.07	93.30	93.30
8	2015	96.21	97.53	95.82	95.37	96.92
9	2016	96.24	98.65	94.99	92.98	95.86
10	2017	96.17	98.77	94.49	92.63	92.42
Rata-Rata		92.62	100.93	95.51	94.55	95.03

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2017

Upaya pemerintah Kota Bogor, mendorong imunisasi bayi tergolong sangat baik dimana rata-rata capaian pemberian imunisasi bayi mencapai 95,73 % dari jumlah

19.701 bayi di Kota Bogor. Berdasarkan Tabel 4.14. Capaian tertinggi adalah Imunisasi BCG 100%, dan terendah adalah HB < 0 (92,62 %), hal ini sangat miris dan membingungkan sebab jarak pemberian HB > 0 th dan BGC berdekatan. Pemberian HB < 0 biasa diberikan maksimum 1 bulan setelah lahir bahkan beberapa rumah sakit diberikan sebelum bayi pulang atau maksimum 1 minggu setelah lahir. Berdasarkan data tersebut sebagian besar penduduk kota bogor sudah sadar terhadap pentingnya imunisasi. Namun pemerintah harus terus mendorong pemberian imunisasi kepada anak melalui berbagai promkes di puskesmas dan posyandu, sehingga masyarakat lebih teredukasi akan penting dan manfaat imunisasi pada bayi dan masa depannya.

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

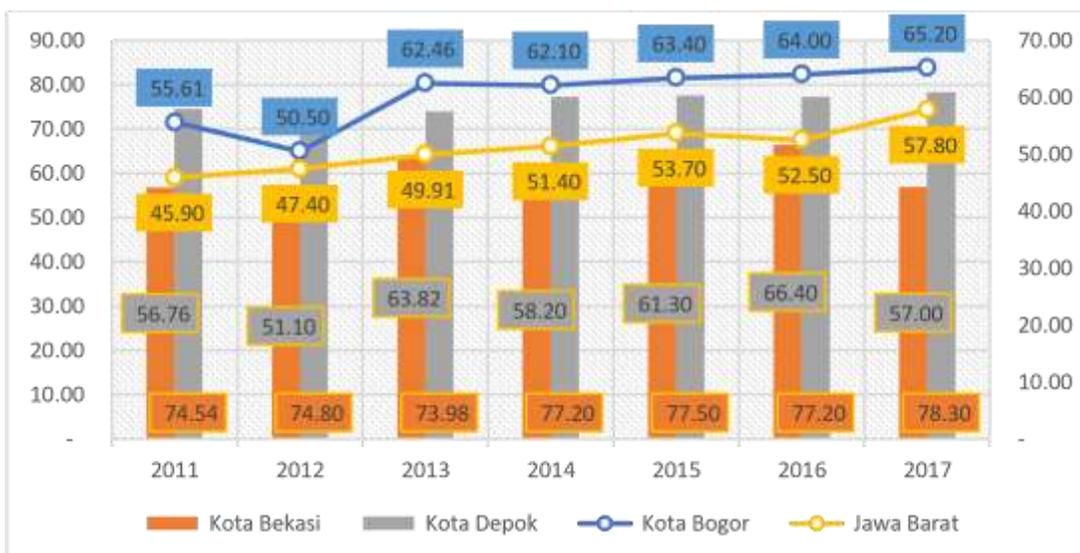
Pembangunan kesehatan untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya juga memerlukan peran masyarakat. Melalui konsep Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM), masyarakat berperan serta aktif dalam penyelenggaraan upaya kesehatan. Bentuk UKBM antara lain Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), dan RW/desa/kelurahan siaga aktif.

Desa/kelurahan/ siaga aktif adalah desa/kelurahan/ yang mempunyai Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) atau UKBM lainnya yang buka setiap hari dan berfungsi sebagai pemberi pelayanan kesehatan dasar, penanggulangan bencana dan kegawat daruratan, surveilans berbasis masyarakat yang meliputi pemantauan pertumbuhan (gizi), penyakit, lingkungan dan perilaku sehingga masyarakatnya menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) adalah Rumah tangga yang seluruh anggotanya berperilaku hidup bersih dan sehat, yang meliputi 10 indikator, yaitu 1) pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan, 2) bayi diberi ASI eksklusif, 3) balita ditimbang setiap bulan, 4) menggunakan air bersih, 5) mencuci tangan dengan air bersih dan sabun, 6) menggunakan jamban sehat, 7) memberantas jentik di rumah sekali seminggu, 8) makan sayur dan buah setiap hari, 9) melakukan aktivitas fisik setiap hari, dan 10) tidak merokok di dalam rumah. Apabila dalam Rumah Tangga tersebut tidak ada ibu yang melahirkan, tidak ada bayi dan tidak ada balita, maka pengertian Rumah Tangga ber-PHBS adalah rumah tangga yang memenuhi 7 indikator. Kriteria rumah tangga dengan PHBS baik adalah rumah tangga yang memenuhi indikator baik, sebesar 6 indikator atau lebih untuk rumah tangga yang punya balita dan 5 indikator atau lebih untuk rumah tangga yang tidak mempunyai balita

Pelaksanaan Program Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap penanggulangan masalah kesehatan melalui pencegahan terjadinya kesakitan maupun kematian. Program PHBS adalah upaya untuk pengalaman belajar bagi perorangan, keluarga, kelompok dan masyarakat, untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku hidup bersih dan sehat, yang menjadikan seseorang atau keluarga dapat turut menangani masalah di bidang kesehatan serta berperanaktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakatnya. PHBS mencakup tatanan Rumah Tangga, Sekolah, Tempat Kerja, Tempat Umum dan Sarana Kesehatan.

Berdasarkan data Profil Kesehatan Jawa Barat periode 2010-2017 (Gambar 2.11), Kota Depok merupakan kota dengan populasi keluarga ber-Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS). Adapun Kota bogor berada di peringkat 7 dari 10 Kabupaten/Kota yang memiliki populasi keluarga ber-Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS). Berdasarkan cakupan jumlah keluarga yang dipantau secara rata-rata (2010-2017) di ketiga kota tersebut, populasi yang terpantau terbanyak adalah kota Bogor 60,27% keluarga, Kota Depok 78,30% dan Kota Bekasi 31,12% sedangkan se-Jawa Barat hanya 55,61 keluarga yang dipantau Perilaku Hidup Bersih dan Sehat nya.



Sumber : Profil Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2017

Gambar 2.11. Persentase Rumah Tangga / Keluarga Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di Kota Bogor dan Depok Periode 2010-2017

Sebagai perbandingan dengan yang terbaik (Kota Depok), Kota Bogor secara jumlah keluarga yg dipantau sudah mencapai 100% pada tahun 2017, namun pencapaian indikator PHBS yang mengalami peningkatan yang lambat sekitar 0,69 % pertahun. Bila

berdasarkan 10 Indikator atau 7 Indikator PHBS (tanpa ibu melahirkan, bayi dan balita), nampaknya terdapat beberapa indikator sudah belum mencapai angka maksimal, sebagai contoh Penduduk dengan Akses Sanitasi Layak (Jamban Sehat)⁵ pada tahun 2017 Kota Bogor Hanya 65,7 % dimana Kota Depok 84,2%, Kota Bekasi 97,3% dan rata-rata Jawa Barat 69,6%.

Berdasarkan tingkat pengeluaran per-kapita keluarga, semakin sejahtera tingkat sosial ekonomi keluarga semakin besar proporsi pencapaian keluarga bersih dan sehat. Penerapan PHBS di rumah tangga diharapkan mengurangi risiko terjadinya kematian bayi karena tidak ditolong oleh tenaga kesehatan, meningkatkan daya tahan tubuh dengan ASI. Pencegahan penyakit degeneratif dengan berolah raga, mengkonsumsi makanan bergizi. Pencegahan penyakit pernafasan dengan tidak merokok dan tinggal di tempat yang tidak terlalu padat hunian. Ketersediaan air bersih, jamban dan lantai mengurangi risiko kejadian penyakit berbasis lingkungan, seperti diare, penyakit kulit, dan lain-lain.

2.2.2. Indek Pendidikan

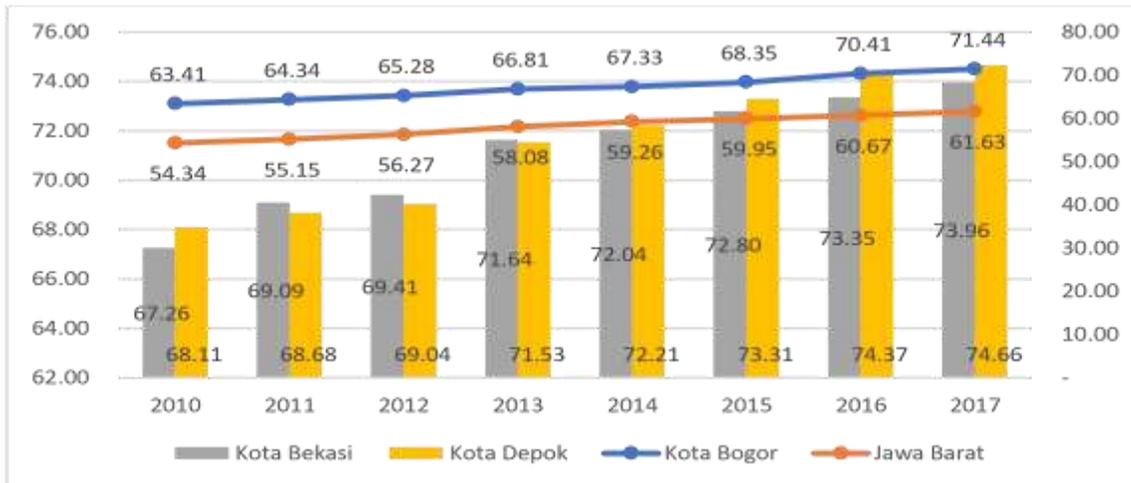
Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah

Pendidikan yang semakin tinggi merupakan cerminan kualitas manusia yang secara langsung dapat memberikan peluang kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan pembangunan daerah khususnya pembangunan sumberdaya manusia melalui dimensi pengetahuan menjadi salah satu indikator dalam Indeks Pembangunan Manusia suatu daerah. Oleh karena itu peningkatan mutu pendidikan harus terus diupayakan, dimulai dengan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada penduduk untuk mengenyam pendidikan, hingga pada peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan.

Indeks Pendidikan adalah salah satu komponen pembentuk IPM. Indeks pendidikan yang merepresentasikan Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Kedua indikator ini dapat dimaknai sebagai ukuran kualitas sumberdaya manusia. Harapan Lama Sekolah (HLS) dapat didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang dan dihitung pada usia 7-24 tahun karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar. Sedangkan Rata-rata Lama sekolah

⁵ Profil Kesehatan Provinsi Jawa Barat, 2018

(RLS) menggambarkan rata-rata jumlah tahun yang dijalani penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal.

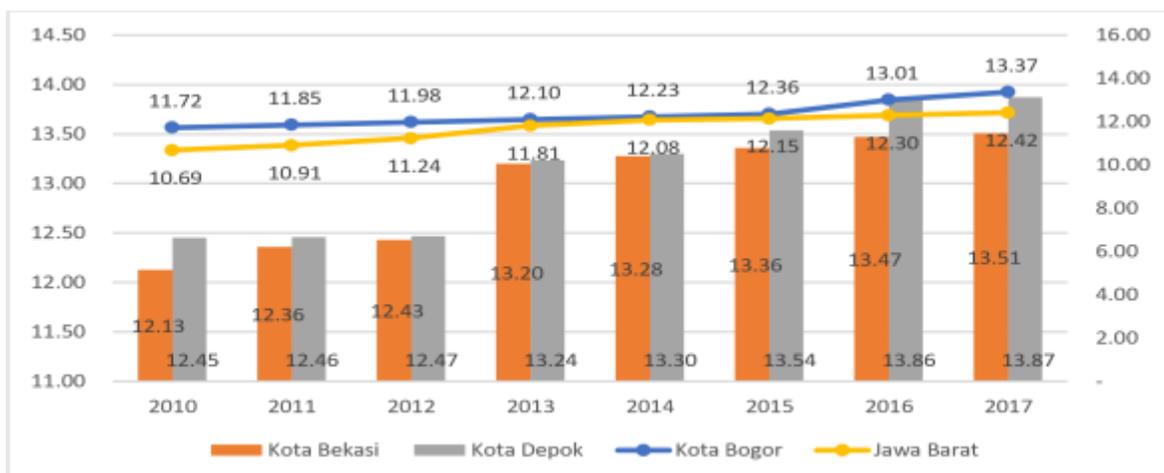


Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2017

Gambar 2.12. Capaian Indeks Pendidikan di Kota Bogor dan Provinsi Jawa Barat Periode 2010-2017

Berdasarkan capaian Indeks Pendidikan Kota Bogor (67,17) sudah diatas rata-rata Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat yaitu 58,17 (Gambar 2.12). Meskipun demikian capaian Kota Bogor masih dibawah capaian Kota Bekasi (71,19) dan Kota Depok (71,49). Dengan Kondisi Geografis dan Demografis yang serupa bahkan dengan model kota yang sama (kota berbasis jasa), menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah Kota Bogor dalam mengenjot Indeks Pendidikan menjadi setara di level 70 an.

Capaian Indeks Pendidikan sebagaimana disampaikan sebelumnya bahwa, Indeks Pendidikan merepresenstasikan dimensi Pendidikan Dasar hingga Menengah yang disediakan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat usia sekolah. Sebagaimana upaya pemerintah pusat mendorong indeks Pendidikan dengan meningkatkan program belajar 9 tahun menjadi wajib belajar 12 tahun. Presiden Republik Indonesia melalui Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 telah menginstruksikan kepada Menteri, Kepala Lembaga Negara, dan Kepala Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Program Keluarga Produktif melalui Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS), Program Indonesia Sehat (PIS) dan Program Indonesia Pintar (PIP). Program Indonesia Pintar (PIP) bertujuan untuk meningkatkan akses bagi anak usia 6 sampai dengan 21 tahun, dan memperluas kesempatan masyarakat untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah, dan mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah (*drop out*).



Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2017

Gambar 2.13. Capaian Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kota Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi dan Jawa Barat Periode 2010-2017

Indeks pendidikan dibentuk oleh Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dan RataRata Lama Sekolah (RLS). Kedua angka tersebut merepresentasikan capaian pendidikan penduduk sebuah daerah sebagaimana tersedia dan memungkinkan untuk diikuti. Berdasarkan capaian Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) selama periode 2010-2017 mengalami peningkatan yang cukup baik dari 11,72 tahun (2010) menjadi 13,37 (2017) (Gambar 2.13). Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) menggambarkan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Dengan capaian HLS 12,33 tahun, menggambarkan pembangunan secara sistem pendidikan di Kota Bogor sudah mengarahkan dan memungkinkan anak-anak akan tetap bersekolah pada umur-umur yang sama dengan waktu yang sesuai untuk menempuh jejang pendidikan.

Capaian HLS Kota Bogor pada periode 2010-2017 sudah berada diatas Provinsi Jawa Barat, namun masih berada di bawah Kota Bekasi dan Kota Depok. Kota Bekasi dan Kota Depok sudah mencapai 13 tahun sejak 2013, adapun Kota Bogor baru mencapai 12,10 pada tahun tersebut. Meskipun demikian laju pertumbuhan HLS Kota Bogor relatif lebih baik (0,24 tahun) dibandingkan dengan Kota Bekasi (0,20 tahun) dan Kota Depok (0,20 tahun), sehingga Kota Bogor dapat mengejar hingga 13,37 (2017).

Rata-rata lama sekolah (RLS) mengindikasikan makin tingginya pendidikan yang dicapai oleh masyarakat (berbagai usia) di suatu daerah. Semakin tinggi rata-rata lama sekolah berarti semakin tinggi jenjang pendidikan yang dijalani oleh penduduk Kota Bogor. Asumsi yang berlaku secara umum bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin tinggi pula kualitas seseorang, baik pola pikir maupun pola tindakannya. (Tobing dalam Hastarini, 2005), mengemukakan bahwa orang yang memiliki

tingkat pendidikan lebih tinggi, diukur dengan lamanya waktu untuk sekolah akan memiliki pekerjaan dan upah yang lebih baik dibanding dengan orang yang pendidikannya lebih rendah.



Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2017

Gambar 2.14. Capaian Rata-Rata Lama Sekolah (RSL) di Kota Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi dan Jawa Barat Periode 2010-2017

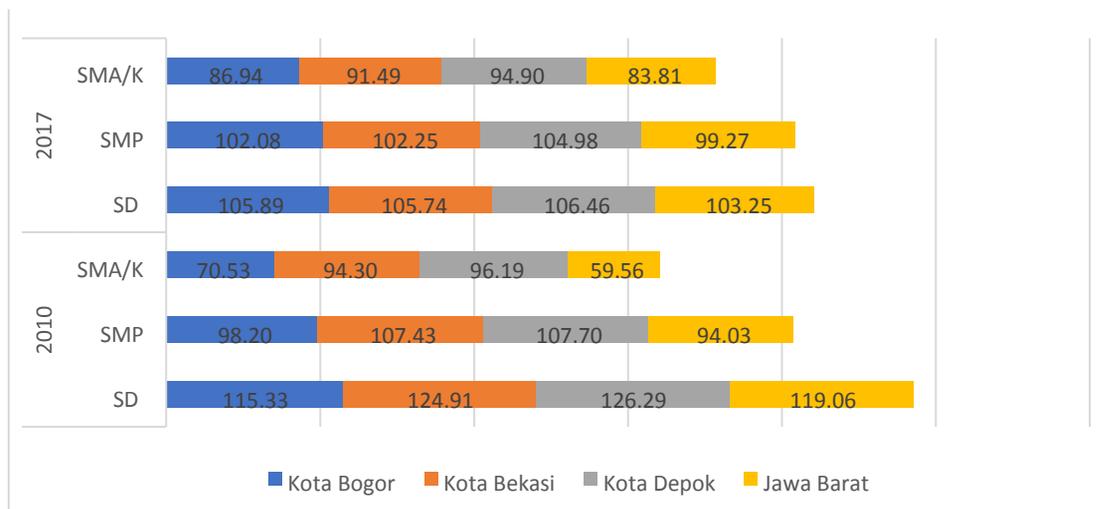
Secara sistem (HLS) sudah mengarah pada pencapaian wajib belajar 12 tahun, namun Rata-rata Lama Sekolah (RSL) penduduk Kota Bogor masih belum mencapai waktu wajib belajar tersebut. Capaian Rata-Rata Lama Sekolah (RSL) periode 2010-2017 penduduk Kota Bogor selama rentang usia 7 - 18 tahun (usia sekolah) masih dibawah wajib belajar 12 tahun sekolah atau 10 tahun (Gambar 4.14). Dengan angka capaian RLS ini rata-rata Pendidikan masyarakat Kota Bogor hanya sampai tamat Sekolah Menengah Pertama atau *Drop Out* Sekolah Menengah Atas (kelas 11). Meskipun demikian capaian RLS Kota Bogor masih diatas rata-rata provinsi Jawa Barat (7,70 tahun), namun masih sedikit lebih rendah dari Kota Depok (10,45) dan Kota Bekasi (10,55).

Bila dibandingkan dengan Kota Depok (HLS = 13,15 tahun, RLS = 10,49) dan Bekasi (HSL = 12,97 tahun, RSL = 10,45), Kota Bogor masih harus mengejar ketertinggalan ini, meskipun di tataran jawa barat sudah diatas rata-rata. Kota Bogor juga harus mendorong pencapaian wajib belajar 12 tahun bagi seluruh warganya sebab atas capain tersebut, Kota Bogor masih belum dapat memberikan peluang yang lebih kepada warganya untuk mengenyam pendidikan, meskipun cukup banyak program-program yang mendorong terciptanya kesempatan itu seperti BOS, dan Beasiswa lainnya.

Partisipasi Sekolah

Keberhasilan pembangunan daerah ditentukan oleh sumberdaya manusia yang berkualitas. Pendidikan merupakan salah satu cara meningkatkan kualitas SDM tersebut. Oleh karena itu peningkatan mutu pendidikan harus terus diupayakan, dimulai dengan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada penduduk untuk mengenyam pendidikan, hingga pada peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan. Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk yang memanfaatkan fasilitas pendidikan dapat dilihat dari persentase penduduk menurut partisipasi sekolah.

Angka Partisipasi Sekolah adalah ukuran daya serap **lembaga pendidikan** terhadap penduduk usia sekolah. Semakin tinggi angka partisipasi maka semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan. Indikator berikutnya adalah Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkan partisipasi prosentasi jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang penduduknya (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah sesuai jenjang pendidikan tersebut.



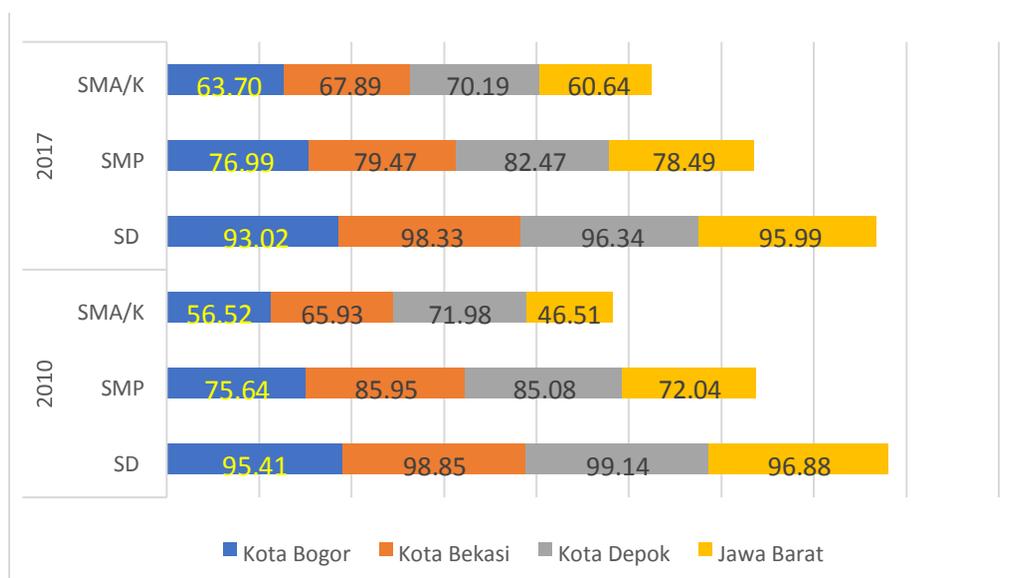
Sumber : Kemedikbud. 2019

Gambar 2.15. Capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) Kota Bogor, Depok, Bekasi dan Jawa Barat Periode 2010-2017

Perbandingan capaian APK Kota Bogor pada tahun 2010 dan tahun 2017 menunjukkan bahwa capaian Kota Bogor sudah lebih baik dari Provinsi Jawa Barat, namun bila dibandingkan dengan Kota Bekasi dan Depok, Kota Bogor masih relatif tertinggal (Gambar 4.15). Capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) tingkat Sekolah Dasar secara umum (Bogor, Depok, Bekasi dan Jawa Barat) mengalami penurunan dari tahun 2010 ke tahun 2017. Capaian APK Pendidikan Dasar pada tahun 2017 Kota Bogor relatif lebih baik (105,89) dibandingkan dengan Kota Bekasi (105,74) dan masih sedikit lebih rendah dari

Kota Depok (106,46). Adapun capaian APK pendidikan Menengah (Pertama dan Atas), Kota Bogor (102,08 (SMP), 86,94 (SMA)) masih lebih rendah dari Kota Depok (102,25 (SMP), 91,45 (SMA)) dan Bekasi (104,98 (SMP), 94,90 (SMA)).

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada terhadap jumlah penduduk usia sekolah sesuai jenjang pendidikan tersebut. Bila APK digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan pada suatu jenjang pendidikan tertentu tanpa melihat rentang usia, maka APM mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu. Bila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu maka APM akan mencapai 100.



Sumber : Kemedikbud. 2019

Gambar 2.16. Capaian Angka Partisipasi Murni (APM) Kota Bogor, Depok, Bekasi dan Jawa Barat Periode 2010-2017

Secara umum capaian Angka Partisipasi Murni (APM) berbagai jenjang (pendidikan dasar dan menengah di Provinsi Jawa Barat belum mencapai 100%. Senada dengan APK, berdasarkan data yang disajikan pada Gambar 4.16, terdapat penurunan nilai/angka APM khususnya pada jejang Pendidikan Dasar di Kota Bogor yaitu dari 95,41 (2010) menjadi 93,02 (2017), namun untuk pendidikan menengah cenderung meningkat sekitar 1 hingga 5 persen selama 2010-2017. Meskipun capaian nilai APM Kota Bogor (2017) pada jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Pertama berada di bawah APM Jawa Barat, namun APM Menengah Atas/Kejuruan relatif lebih baik dari Provinsi Jawa Barat.

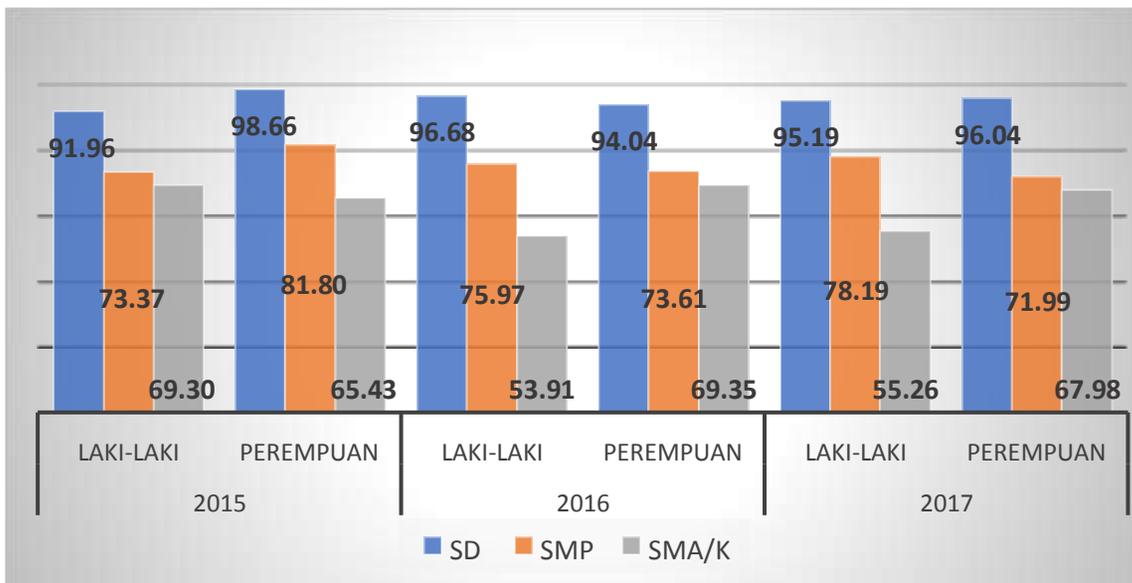
Capaian APM pendidikan dasar Kota Bogor yang cenderung menurun dapat diakibatkan berbagai sebab seperti, faktor ekonomi keluarga, anak yang masuk sekolah

tahun pertama masih dibawah usia <7 tahun (6-6.5 tahun), kuota (kapasitas) sekolah dasar yang belum dapat menampung, persaingan dengan penduduk luar Kota Bogor. Faktor kapasitas dan persaingan antar penduduk sekitar Bogor nampaknya lebih mengemuka, sebab beberapa Sekolah Dasar (negeri atau swasta) di Kota Bogor menjadi primadona seperti SD Aliya, Polisi, Regina Pacis, Umul Quro, Insan Kamil dan lainnya, meskipun demikian diperlukan kajian lebih mendalam terkait kondisi tersebut. Kondisi ini harus menjadi perhatian khusus pemerintah Kota Bogor sebab, pemerintah harus menghadirkan Pendidikan Dasar yang baik dan terjangkau (lokasi dan keterterimaan) bagi seluruh anak-anak usia sekolah di Kota Bogor.

Senanda dengan APM Pendidikan Dasar, Capaian APM Menengah Pertama meskipun mengalami peningkatan 1,35 dari 75,64 (2010) menjadi 76,99 (2017), tetap masih berada dibawah capaian APM Provinsi Jabar yaitu 78,49 (2017). Sedangkan Capaian APM Pendidikan Menengah Atas/Kejuruan Kota Bogor pada tahun 2017 (63,70) sudah berada diatas Provinsi Jawa Barat (60,64). Meskipun demikian kembali bila dibandingkan dengan Kota Depok dan Kota Bekasi capaian APM menengah (pertama dan atas), capaian Kota Bogor masih lebih kurang dapat berasing (relatif lebih rendah). Rendahnya capaian APM ini diindikasikan dipengaruhi oleh berbagai sebab diantaranya, **faktor ekonomi keluarga** (prioritas pengeluaran dan bekerja), **pernikahan dini** (usia sekolah menengah), ataupun **faktor ketersediaan dan keterterimaan** pada sekolah menengah (negeri dan swasta) yang ada di Kota Bogor.

Berdasarkan capaian APM kota bogor berdasarkan jenis kelamin pada tahun 2015-2017 (Gambar 4.17) didapati bahwa populasi anak perempuan pada jenjang Pendidikan Dasar (SD) lebih didominasi anak perempuan (96,25) dibandingkan anak laki-laki (95,19).

Sedangkan untuk capaian APM Gender pada jenjang menengah sedikit berbeda, dimana pada capaian APM laki-laki pada jenjang menengah pertama memiliki tren meningkat ((73,37 % (2015), menjadi 78,19% (2017)), sedangkan capaian APM perempuan cenderung menurun ((81,80 % (2015), menjadi 71,99% (2017)). Adapun Capaian APM menurut gender pada jenjang pendidikan menengah atas memiliki tren berbanding terbalik dengan APM SMP, dimana APM laki-laki cenderung menurun (69,30 % (2015), menjadi 55,26% (2017)), sedangkan APM perempuan cenderung meningkat (65,43 % (2015), menjadi 67,98% (2017)).



Sumber : Statistik Kesejahteraan Kota Bogor. 2018

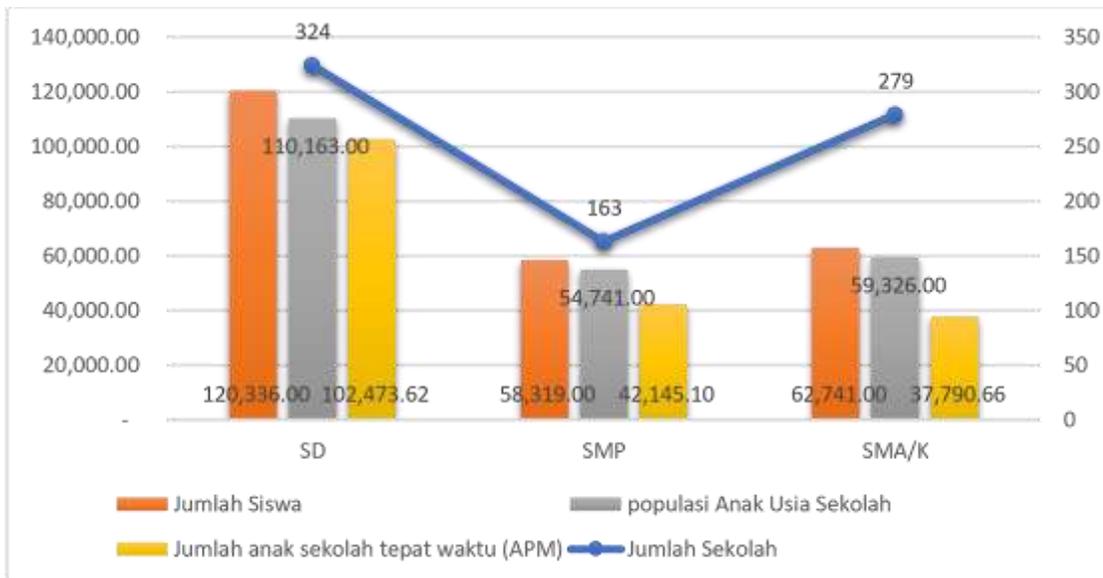
Gambar 2.17. Capaian Angka Partisipasi Murni (APM) Kota Bogor Berdasarkan Jenis Kelamin Periode 2015-2017

Menjadi perhatian khusus adalah tingkat partisipasi murni (APM) laki-laki cenderung menurun, di setiap jenjang pendidikan 94,61 (SD), 75,84 (SMP), dan 59,49 (SMA). Bila dibandingkan dengan APM perempuan yang sedikit lebih tinggi 96,25 (SD), 75,80 (SMP), 67,59 (SMA/K). Patut diduga bahwa 40% penduduk laki-laki usia sekolah SMA/K (15-18) lebih memilih bekerja atau berusaha dibanding melanjutkan sekolah, sebaliknya lebih dari 33% penduduk perempuan lebih memilih bekerja atau menikah (ibu rumah tangga). Bila dihubungkan dengan Persentase Usia Pernikahan dan Kehamilan Pertama Perempuan berusia > 10 Tahun di Kota Bogor (Gambar 4.10), bahwa didapatkan usia sekolah 10-18 (SMP dan SMA/K) telah terjadi pernikahan dini sekitar 32,28 persen dari jumlah populasi perempuan, yang mendorong sang ibu untuk berhenti sekolah dan hamil (22,06 %). Adapun penurunan populasi anak laki-laki yang bersekolah cenderung menurun pada pendidikan menengah, diduga karena faktor ekonomi (membantu orang tua bekerja).

Capaian dan kondisi APK dan APM Kota Bogor tersebut mungkin disebabkan dari beberapa kendala, seperti faktor ekonomi keluarga, sarana pendidikan baik secara jumlah atau lokasi sekolah. APK dan APM dapat menjadi landasan yang cukup kuat bagi pemerintah Kota Bogor dalam melakukan evaluasi program dan infrastruktur pendidikan di Kota Bogor. Sebagaimana pembagian urusan dan wewenang antara pemerintah pusat dan daerah, maka pemerintah Kota Bogor meningkatkan koordinasi dengan pemerintah provinsi dalam upaya mendorong peningkatan pencapaian program wajib belajar 9 dan 12 tahun khususnya pada jenjang pendidikan menengah (SMP dan SMA/K).

Sarana Pendidikan

Dalam menciptakan sumberdaya manusia dalam bidang Pendidikan, investasi dan sarana yang terpenting untuk disiapkan oleh pemerintah daerah adalah Sekolah dan Guru. Sekolah adalah suatu lembaga yang memang dirancang khusus untuk pengajaran para murid (siswa) di bawah pengawasan para guru. Kebanyakan dalam sebuah negara mempunyai model sistem pendidikan formal yang mana hal ini sifatnya wajib. Berdasarkan data yang disajikan pada Gambar 4.17 bahwa jumlah Sekolah dari jenjang SD hingga SMA/SMK pada tahun 2017 cenderung menurun. Dimana jumlah sekolah SD di Kota Bogor dengan Status Negeri dan Swasta adalah 324, kemudian Sekolah Menengah Pertama (SMP) adalah 163, Sekolah Menengah Atas/Kejuruan adalah 279 (SMA, 174 sekolah dan SMK, 105 sekolah).



Sumber : BPS 2018 dan Kemendikbud 2018 (diolah)

Gambar 2.18. Cakupan Jumlah Sekolah, Jumlah Siswa dan Jumlah anak sekolah tepat waktu (APM) dan Populasi Penduduk Usia Sekolah (7-18 tahun) Kota Bogor Tahun 2017

Berdasarkan sebaran populasi siswa seluruh jenjang (SD, SMP dan SMA/K) cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan populasi anak usia sekolah dan jumlah anak sekolah tepat waktu (APM). Namun bila dilihat lebih mendalam terdapat ketimpangan antara jumlah siswa dan populasi penduduk usia sekolah dan jumlah anak yang sekolah tepat waktu (APM). Berdasarkan jenjang pendidikan Dasar (SD), dengan jumlah anak yang masuk sekolah tepat waktu hanya 105 ribu jiwa sedangkan populasi siswa SD di Kota Bogor adalah 120 ribu, artinya ada 17,8 ribuan anak di luar Kota Bogor yang bersekolah di Kota Bogor, sedangkan 7,7 ribu lainnya (jumlah siswa penduduk usia

sekolah SD) tidak bersekolah atau telat (menunda sekolah pada tahun selanjutnya) karena kurangnya kursi (kapasitas) di sekolah SD.

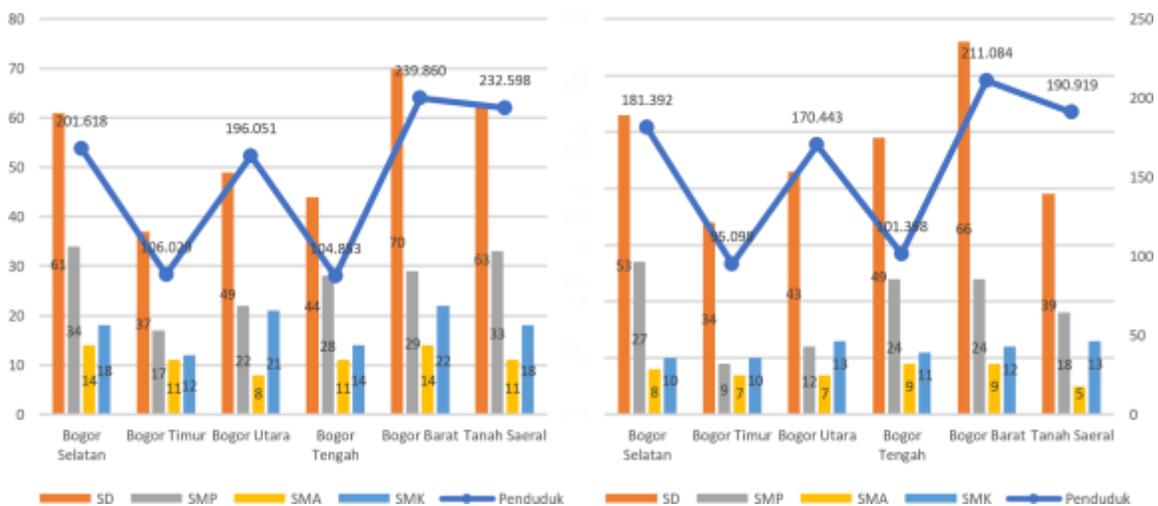
Senada pada jenjang pendidikan menengah (pertama dan atas) terdapat ketimpangan antara jumlah siswa yang bersekolah dengan jumlah anak yang bersekolah tepat waktu di Kota Bogor. Bila dilihat dari data pada jenjang menengah pertama, jumlah populasi anak usia sekolah berjumlah 54,7 ribu dimana jumlah siswa aktif 58.3 ribu, sedangkan jumlah anak yang tepat waktu bersekolah hanya 42,1 ribu artinya pertama ada kelebihan jumlah anak yang bersekolah di Kota Bogor sejumlah 3,5 ribu bila dibandingkan dengan populasi anak usia sekolah, kedua dari 58,3 ribu siswa tersebut hanya 42,1 ribu yang merupakan anak sekolah Kota Bogor sedangkan 16,2 ribu lainnya kemungkinan adalah anak diluar Kota Bogor yang bersekolah di Kota Bogor.

Pola yang sama terjadi pada jenjang pendidikan menengah atas, dimana berdasarkan jumlah siswa yang aktif sekolah di Kota Bogor (62,7 ribu siswa) hanya 58% (37,8 ribu) anak Kota Bogor yang bersekolah tepat di sekolah Kota Bogor, sedangkan 42% (24,9 ribu lainnya) diduga adalah penduduk usia sekolah kota lain yang bersekolah di Kota Bogor. Sehingga terdapat 21,5 ribu dari sisa populasi usia sekolah menengah atas (15-18 tahun) di kota bogor tidak bersekolah yang dikarenakan berbagai penyebab salah satunya adalah kapasitas/cakupan keterterimaan di sekolah SMA/K di Kota Bogor.

Kondisi ketimpangan tersebut menjadi harus perhatian khusus bagi Pemerintah Kota Bogor, hal ini berhubungan langsung dan tidak langsung pada pencapaian RLS, HLS, APK dan APM. Secara perhitungan RSL dan HLS memang didasari oleh capaian/perolehan ijazah terakhir penduduk suatu daerah, namun apabila ketimpangan antara keterterimaan penduduk usia sekolah dengan jumlah sekolah dan jumlah penduduk sekolah tepat waktu di sekolah dimasa depan akan menyisakan pekerjaan yang tidak ada habisnya dalam mencapai nilai RSL, karena adanya selisih jumlah penduduk yang tidak tamat belajar 12 tahun pada usia seharusnya. Artinya dengan meningkat nilai APM yang dipergaruhi oleh keterterimaan penduduk usia sekolah tepat waktu, secara bertahap akan mengurangi jumlah penduduk yang dimasa depan harus mengejar ijazah nya pada usai produktif bekerja atau lanjut.

Melihat sebaran penduduk berdasarkan kecamatan dan sebaran sekolah (SD, SMP, SMA, dan SMK) disetiap kecamatan pada tahun 2017 hampir merata, namun polarisasi populasi penduduk masih terkonsentrasi di Bogor Barat (239,86 ribu jiwa) dan Tanah Sareal (231,60 ribu jiwa) sedangkan sekolah terkonsentrasi di Bogor Barat (135 sekolah) dan Bogor Selatan (127 sekolah) (Gambar 4.19). Jumlah Sekolah Dasar tahun 2017 terbanyak berada di Kecamatan Bogor Barat (70 sekolah) dan Tanah Sareal (63

sekolah). Bila dibandingkan dengan tahun 2010, Kecamatan Hanya memiliki 39 Sekolah Dasar (Segeri dan Swasta), artinya dalam 7 tahun (2010-2017) Pemerintah Kota Bogor berupaya mendorong peningkatan jumlah sekolah dengan harapan dapat dapat menampung populasi penduduk usia sekolah wajib belajar 12 tahun.



Sumber: BPS Kota Bogor Tahun 2018

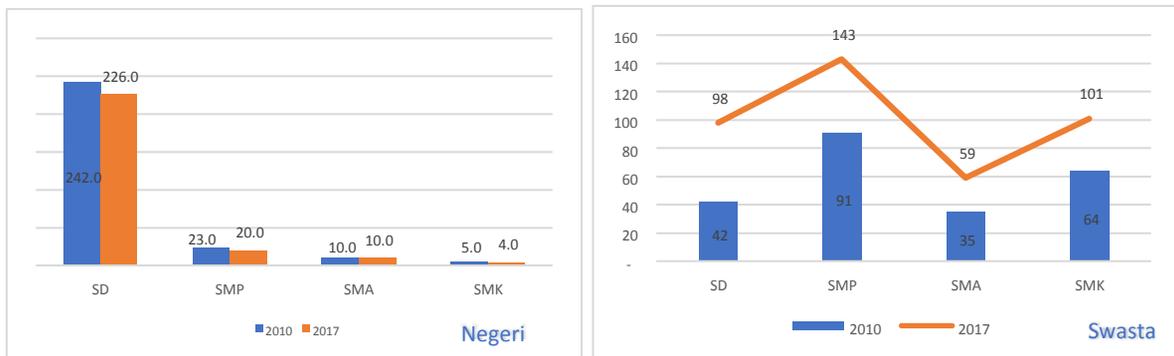
Gambar 2.19. Sebaran Penduduk dan Sekolah (Dasar dan Menengah) berdasarkan Kecamatan di Kota Bogor Tahun 2010 dan 2017

Berdasarkan data pada Gambar 4.19, konsentrasi Sekolah (berbagai jenjang) tertinggi berada di Kec. Bogor Barat dengan 135 Sekolah, Kecamatan Bogor Selatan dengan 127 Sekolah dan Kecamatan Tanah Sareal dengan 125 Sekolah. Pertumbuhan tersebut nampaknya dilakukan untuk memenuhi peningkatan jumlah penduduk Kota Bogor periode 2010-2017 terutama di Kecamatan Bogor Barat (239.860 jiwa), Kecamatan Tanah Sareal (232.598 Jiwa) dan Kecamatan Bogor Selatan (201.618 jiwa).

Jumlah Sekolah di semua jenjang pendidikan (Dasar, Menengah Pertama, Atas dan Kejuruan) mengalami peningkatan yang cukup baik dan menyebar di setiap Kecamatan. Peningkatan Sekolah Menengah Pertama meningkat 43% dari 114 sekolah menjadi 163 sekolah, Sekolah Menengah Atas meningkat 53% dari 45 sekolah menjadi 69 sekolah, dan Sekolah Menengah Kejuruan meningkat 52% dari 69 Sekolah menjadi 105 sekolah. Berbanding antara tahun 2010 dan 2017, konsentrasi Sekolah Menengah Pertama berpindah dari Kecamatan Bogor Barat dan Tengah (masing-masing 14 sekolah) pada tahun 2010, menjadi Kecamatan Bogor Selatan (34 sekolah) dan Tanah Saeral (33 sekolah).

Peningkatan jumlah sekolah pada jenjang SMA dan SMK merupakan yang tertinggi dai antara jenjang lainnya yaitu > 50%, konsentrasi sekolah tidak berbeda jauh. Konsentrasi SMA pada tahun 2010 ada di Kecamatan Bogor Barat dan Bogor Tengah

(masing-masing 9 sekolah) menjadi terkonsentrasi di Kecamatan Bogor Barat dan Bogor Selatan (masing-masing 14 sekolah). Sedangkan jenjang SMK, tahun 2010 sekolah terkonsentrasi di Kecamatan Bogor Utara dan Tanah Sareal (masing-masing 13 sekolah) menjadi terkonsentrasi di Kecamatan Bogor Barat (22 SMK) dan Bogor Utara (21 SMK).



Sumber: BPS Kota Bogor Tahun 2017

Gambar 2.20. Perkembangan Sekolah Negeri dan Swasta Berbagai Jenjang di Kota Bogor Tahun 2010 dan 2017

Bila dilihat status sekolahnya yaitu Negeri dan Swasta, selama 2010 dan 2017 telah terjadi peningkatan sejumlah 22,5% (149 sekolah) di berbagai jenjang pendidikan. Peningkatan jumlah sekolah lebih di karenakan jumlah sekolah swasta dalam 8 tahun terakhir bertambah, sedangkan jumlah sekolah swasta cenderung menurun secara jumlah. Jumlah Sekolah Swasta di berbagai jenjang meningkat sebesar 73% atau dari 232 Sekolah pada tahun 2010 menjadi 401 sekolah pada tahun 2017. Sebaliknya jumlah Sekolah Negeri di berbagai jenjang justru berkurang 7 persen atau dari 280 sekolah menjadi 260 sekolah.

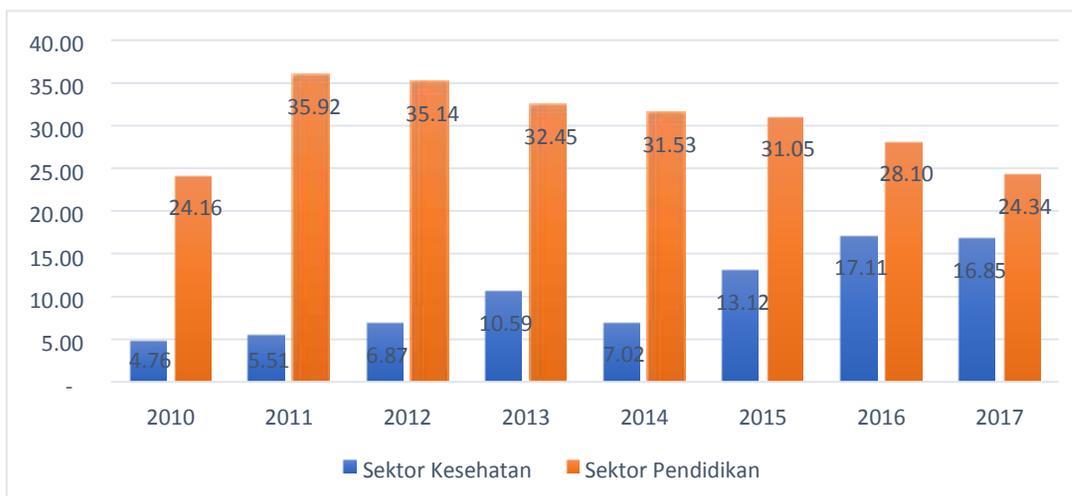
Kondisi ini perlu menjadi perhatian khusus pemda Kota Bogor, sebab pola pikir masyarakat Kota Bogor kualitas pendidikan masih berada di Sekolah Negeri dibandingkan Swasta. Jenjang Sekolah Negeri yang tidak mengalami perubahan hanya Sekolah Menengah Pertama tetap 10 Sekolah dan tersebar merata diseluruh Kecamatan. Sekolah Menengah Pertama mengalami penurunan atau perubahan dari 22 sekolah tahun 2010 menjadi 20 sekolah pada tahun 2017. Penurunan tersebut mungkin dikarenakan adanya pengabungan sekolah atau penurunan status sekolah. Informasi terkait perubahan sekolah masih belum diketahui, namun ini dapat menjadi salah satu fokus pembangunan Pendidikan Kota Bogor.

Jumlah sekolah yang meningkat dalam 8 tahun terakhir masih belum cukup meningkatkan angka RLS dan APM, yang juga mempengaruhi peningkatan nilai IPM Kota Bogor. Penuntasan buta huruf dan penurunan angka rawan putus sekolah tampaknya harus terus ditingkatkan dan menjadi prioritas utama dengan diiringi pembangunan serta

revitalisasi gedung-gedung sekolah sebagai upaya meningkatkan partisipasi murid secara berkelanjutan. Komposisi penduduk yang relatif besar di usia muda memerlukan persiapan sarana penunjang pendidikan yang memadai. Pencapaian tingkat pendidikan yang cukup baik saat ini merupakan cermin dari keberhasilan perencanaan pembangunan di masa yang lalu. Yang perlu dilakukan saat ini adalah memelihara dan mempertajam upaya-upaya positif yang sudah dirintis di masa lalu sehingga dapat dihasilkan capaian pendidikan lebih baik. Jika aspek pendidikan tidak ditangani secara baik dan lebih dini dikhawatirkan pada rentang waktu yang akan datang berdampak cukup serius pada pencapaian Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah.

Alokasi Anggaran

Berdasarkan amanat undang-undang, Alokasi Anggaran Wajib sektor kesehatan adalah 10% dan sektor pendidikan 20% dari total anggaran/realisasi anggaran Pemerintah (APBN/APBD). Jumlah Alokasi Anggaran Kesehatan dan Pendidikan di Kota Bogor sudah baik (rata-rata 40,57%, 10,23% Sektor Kesehatan dan 30,34 sektor pendidikan) dari total realisasi APBD Kota Bogor tahun 2010-2017 (Gambar 2.21). Porsi Anggaran Kesehatan mengalami peningkatan dari 4,76% (2010) menjadi 16,85% (2017), namun yang digunakan untuk program kesehatan sisi preventif dapat dikatakan hanya 6-7% (Dinas Kesehatan), 10% sisanya untuk anggaran RSUD dan BLUD (mulai 2013) hal ini masih kurang 10% (amanat undang-undang). Adapun Sektor Pendidikan sudah sangat baik yaitu rata-rata 30,34% pertahun dimana amanat undang-undang hanya 20%. Namun yang perlu menjadi perhatian adalah porsi Belanja Tidak Langsung (72,43%) dan Tidak Langsung (15,07%). Adapun demikian tahun 2017 tercatat BL meningkat 80% dari 18% menjadi 32,84% dari total anggaran pendidikan Kota Bogor. Dengan anggaran yang cukup, diharapkan pemerintah kota bogor dapat memaksimalkan pencapaian atribut-atribut yang mendukung pencapaian IPM dari sektor Kesehatan dan Pendidikan.



Sumber: BPKAD Kota Bogor Tahun 2019

Gambar 2.21. Alokasi Anggaran Sektor Kesehatan dan Pendidikan dalam APBD Realisasi tahun 2010-2017

2.2.3. Indek Hidup Layak

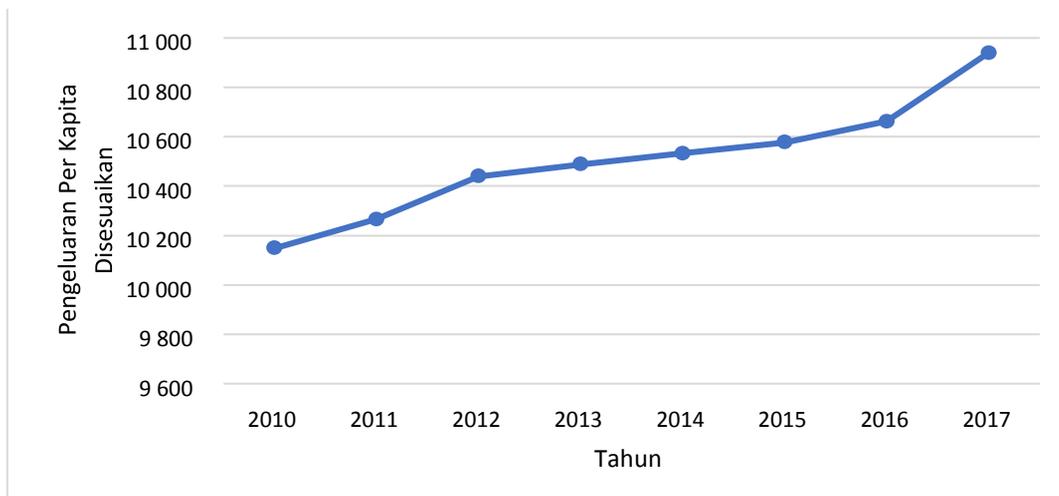
Purchasing Power Parity (PPP)

Kemampuan Daya Beli Penduduk atau Purchasing Power Parity (PPP) merupakan suatu indikator yang digunakan untuk melihat kondisi ekonomi masyarakat dalam menghitung IPM. Kemampuan daya beli ini lebih mencerminkan kemampuan masyarakat secara ekonomi dalam memenuhi kebutuhan konsumsinya, dan sangat jauh berbeda dengan PDRB per kapita atau yang dikenal dengan income per capita. Untuk mengukur standar hidup layak, data PDRB per kapita tidak dapat digunakan karena bukan ukuran yang peka untuk kemampuan daya beli penduduk. Oleh sebab itu, penghitungan daya beli penduduk menggunakan konsumsi per kapita yang kemudian disesuaikan

Daya beli merupakan kemampuan masyarakat dalam membelanjakan uangnya dalam bentuk barang maupun jasa. Kemampuan ini sangat dipengaruhi oleh harga-harga riil antar wilayah karena nilai tukar yang digunakan dapat menaikkan atau menurunkan nilai daya beli. Dengan demikian kemampuan daya beli masyarakat antar wilayah masih belum terbanding. Untuk itu perlu adanya standarisasi. Dengan demikian, satu rupiah di suatu wilayah memiliki daya beli yang sama dengan satu rupiah di Jakarta. Dengan adanya standarisasi ini maka kemampuan daya beli masyarakat antar wilayah dapat dibandingkan.

Purchasing Power Parity (PPP) atau kemampuan daya beli masyarakat yang diukur berdasarkan konsumsi per kapita riil. PPP adalah suatu alat ukur yang menggambarkan tingkat keberdayaan masyarakat didalam memenuhi kebutuhan hidup sesuai dengan konsumsi riilnya, tanpa memperhatikan asal atau sumber penerimaannya, apakah itu

berupa pemberian atau hasil pendapatannya. Oleh karena itu PPP merupakan alat ukur yang dianggap lebih mewakili tingkat kesejahteraan penduduk sesuai dengan pola kebiasaan dan kemampuan untuk dapat mengakses terhadap setiap tingkatan kebutuhan berdasarkan kemampuannya. Indeks Daya Beli Masyarakat sebagai komponen utama IPM merupakan indikator dengan fluktuasi perubahan yang dinamis, sebab indeks ini sangat dipengaruhi oleh kondisi eksternal Kota Bogor, seperti kebijakan fiskal dan moneter. Berikut ini disajikan data PPP Kota Bogor tahun 2013-2017.

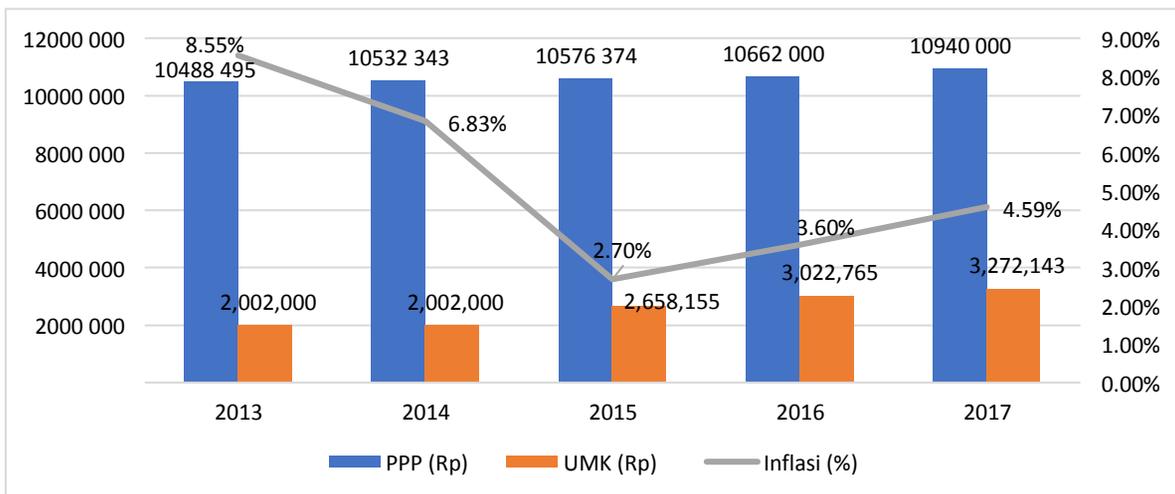


Sumber : BPS Kota Bogor (2019)

Gambar 2.22. Grafik Purchasing Power Parity (PPP) di Kota Bogor Tahun 2010-2017

Berdasarkan Gambar 4.22, diketahui bahwa PPP masyarakat Kota Bogor terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup sesuai dengan konsumsi riilnya. Terdapat beberapa faktor yang sangat berpengaruh terhadap dinamika naik turunnya kekuatan daya beli masyarakat, yaitu faktor pendapatan dan inflasi (tingginya harga barang dan jasa).

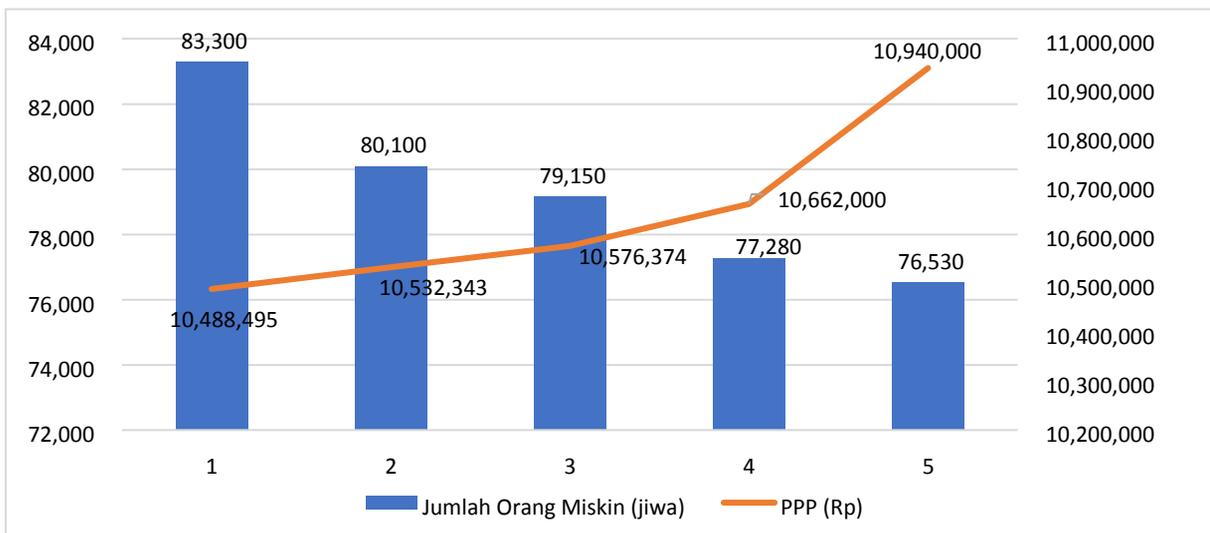
Inflasi di Kota Bogor yang cenderung mengalami peningkatan mempengaruhi kondisi **pengeluaran per kapita (PPP)** masyarakat Kota Bogor. Tingginya inflasi mendorong meningkatkan PPP masyarakat Kota Bogor. Dimana kondisi ini juga didukung oleh semakin meningkatnya Upah Minimum Regional di Kota Bogor (Gambar 2.23).



Sumber: BPS Kota Bogor, 2019

Gambar 2.23. Hubungan Tingkat PPP, Inflasi dan UMK Kota Bogor 2013 -2017

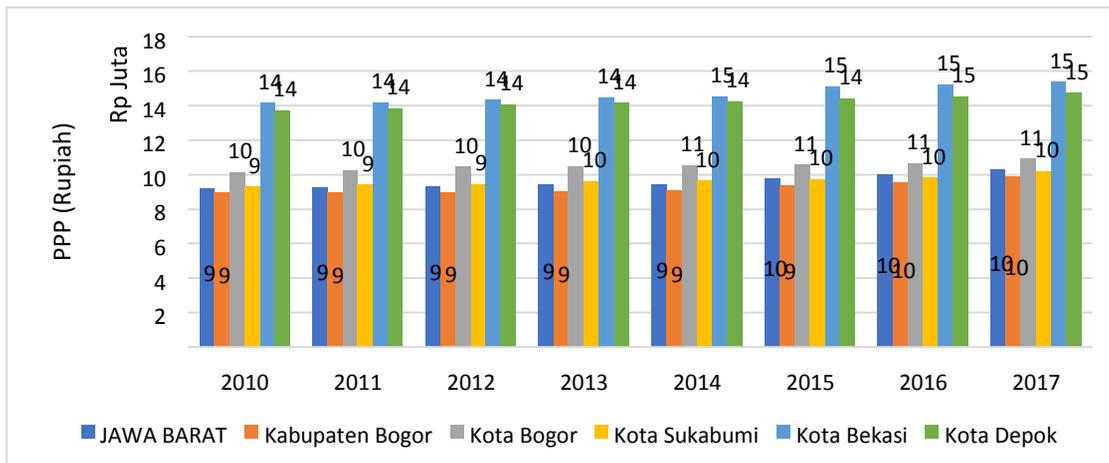
Sejalan dengan kondisi dimana daya beli masyarakat Kota Bogor terus meningkat, hal ini juga diikuti oleh kondisi jumlah orang miskin yang terus mengalami penurunan. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 2.24.



Sumber: BPS Kota Bogor, 2019

Gambar 2.24. Hubungan Tingkat PPP dan Jumlah Orang Miskin di Kota Bogor 2013 -2017

Beberapa wilayah di Jawa Barat, juga mengalami tren pengeluaran per kapita yang cenderung meningkat pada tahun 2013-2017, yaitu beberapa wilayah lain seperti Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi dan Kota Sukabumi. Data Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (PPP) di Kota Bogor dan daerah sekitarnya tahun 2010-2017 dapat dilihat pada Gambar 2.25.



Sumber : BPS Jawa Barat, 2019 (Diolah)

Gambar 2.25. Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (PPP) di Kota Bogor dan Daerah Sekitarnya Tahun 2010-2017

Tingkat inflasi yang tinggi mendorong tingkat pengeluaran per kapita masyarakat di Kota Bogor meningkat. Pada tahun 2017 inflasi tertinggi terjadi pada kelompok pengeluaran pendidikan yaitu mencapai 7,13%. Tertinggi kedua dari kelompok bahan makanan jadi sebesar 5,35% dan ketiga dari kelompok Transport dan Komunikasi sebesar 4,24%. Data inflasi Kota Bogor berdasarkan pengeluaran dapat dilihat pada Tabel 2.15.

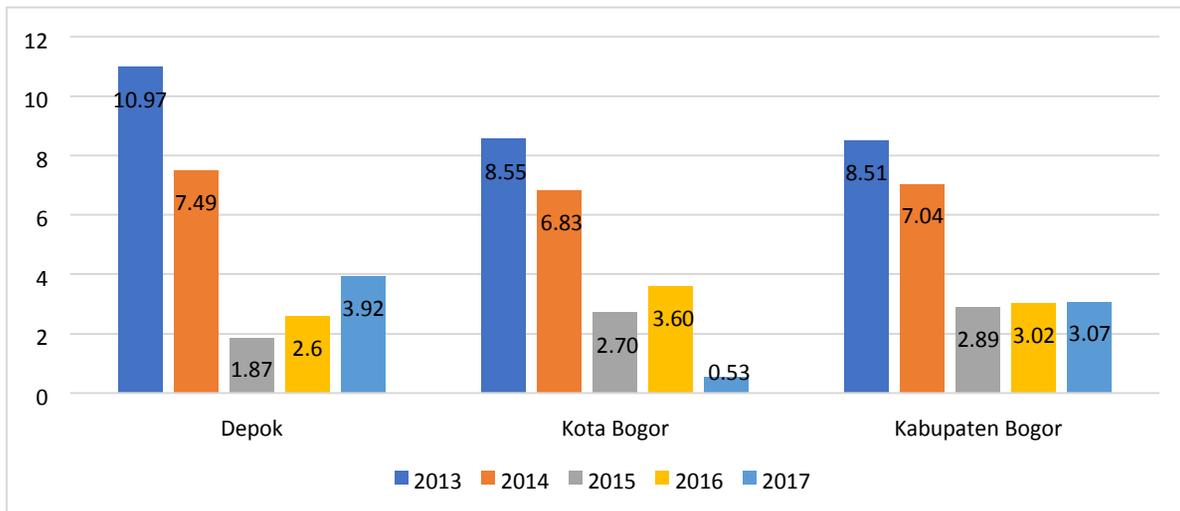
Tabel 2.15.

Inflasi Kota Bogor Menurut Kelompok Pengeluaran tahun 2013-2017

Tahun	Umum	Bahan Makanan	Makanan Jadi	Perumahan	Sandang	Kesehatan	Pendidikan	Transport dan Komunikasi
2013	8,55	9,32	6,52	5,48	1,18	2,56	4,44	22,69
2014	6,83	9,94	3,91	4,96	2,24	3,67	3,69	12,77
2015	2,70	3,25	4,93	3,64	1,27	4,82	2,17	-1,74
2016	3,60	7,16	4,29	3,46	1,63	8,96	0,76	-1,09
2017	4,59	3,96	5,35	0,47	3,81	1,56	7,13	4,24

Sumber : BPS Kota Bogor, 2019

Dibandingkan dengan wilayah sekitarnya, Kota Bogor juga cenderung memiliki tingkat inflasi yang lebih rendah. Hal ini dapat dilihat dari data pada Gambar 2.21.



Sumber: BPS Jawa Barat, 2019

Gambar 2.26. Tingkat Inflasi di Kota Depok, Kota Bogor dan Kabupaten Bogor 2013 -2017

Pada Gambar 2.26 dapat dilihat tingkat inflasi di Kota Bogor, Kabupaten Bogor dan Kota Depok. Kecenderungan tingkat inflasi dari tahun 2013 hingga tahun 2016 antara ketiganya adalah sama, mengalami penurunan, kemudian meningkat pada tahun 2016. Tetapi untuk tahun 2017, tingkat inflasi di Kabupaten Bogor dan Kota Depok meningkat, tetapi tingkat inflasi di Kota Bogor menurun.

2.3. Kemiskinan dan Gini Rasio

Kemiskinan di Kota Bogor jumlahnya mengalami penurunan dari tahun 2010 hingga tahun 2017, dari 90 ribu orang menjadi 76 ribu orang. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk, maka rasio kemiskinan di Kota Bogor pun mengalami penurunan, dari 9,49% menjadi 7,26%. Laju penurunan penduduk miskin di Kota Bogor dari tahun 2010 hingga ke 2017 rata-rata per tahunnya adalah 2,31%. Laju penurunan tertinggi adalah pada tahun 2011 ke tahun 2012 sebesar 4,61%. Laju penurunan terendah adalah dari tahun 2016 ke tahun 2017 sebesar 0,97%.



Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat tahun 2010-2018

Gambar 2.27. Jumlah Masyarakat Miskin di Kota Bogor Tahun 2010 – 2017

Rasio kemiskinan, perbandingan antara orang miskin dengan penduduk di Kota Bogor relatif tinggi dibandingkan dengan daerah lain sekitar ibukota, yaitu Kota Bekasi dan Kota Depok, tetapi relatif lebih rendah dibandingkan dengan Kabupaten Bogor.



Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat tahun 2010-2018

Gambar 2.28. Rasio Kemiskinan di Beberapa Wilayah Sekitar Kota Bogor dari Tahun 2010 - 2017

Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kota Bogor mengalami penurunan dari tahun 2010 hingga ke tahun 2013, yaitu dari 1,60 di tahun 2010 menjadi 1,13 pada tahun 2013. Selanjutnya mengalami peningkatan Indeks Kedalaman Kemiskinan di tahun 2014, menjadi 1,26. Selanjutnya, sejalan dengan menurunnya laju pengentasan kemiskinan di Kota Bogor, maka Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Kota Bogor, tahun 2016 ke 2017, juga mengalami penurunan, tahun 2015 yang sebesar 1,26 menjadi 1,08 di tahun 2016 dan menurun lagi di tahun 2017 menjadi 0,99. Ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin di Kota Bogor cenderung mendekati Garis Kemiskinan.

Begitu pula dengan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) yang mengalami penurunan dari tahun 2015 sebesar 0,33 menjadi 0,26 tahun 2016, selanjutnya menurun lagi menjadi 0,17. Dengan menurunnya P2, berarti kesenjangan diantara penduduk miskin semakin berkurang. Sebaliknya dengan nilai gini ratio, pada periode tersebut, nilai gini ratio di Kota Bogor menjadi lebih tinggi dibandingkan tahun 2014, dimana pada tahun 2014, nilai gini ratio adalah 0,36, kemudian tahun 2015 hingga tahun 2017 nilainya di atas 0,40.



Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat tahun 2010-2018

Gambar 2.29. Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan di Kota Bogor Tahun 2010 - 2017

Jumlah aparatur sipil negara di Kota Bogor dari tahun 2010 hingga tahun 2017 cenderung mengalami penurunan. Jumlah ASN di Kota Bogor berkisar sekitar 1,03 persen di tahun 2010, selanjutnya menurun terus di bawah 1%, hingga pada tahun 2017 hanya 0,68%. Rasio ini lebih rendah jika dibandingkan dengan tingkat nasional, yaitu 1,7%. Jika dibandingkan dengan negara lain, seperti Malaysia dan Brunai, rasio ini cukup rendah. Kedua negara itu masing-masing memiliki rasio sebesar 4% dan 12%. Sementara itu di Thailand dan Vietnam, rasio ASN terhadap penduduk adalah 0,55% dan 0,31%. Di Thailand dan Vietnam, penduduknya banyak yang memilih menjadi wirausaha daripada ASN.

Penduduk di Kota Bogor tidak sedikit yang menjadi wirausaha. Rasio wirausaha terhadap jumlah penduduk di Kota Bogor lebih tinggi daripada rasio ASN terhadap jumlah penduduk. Pada tahun 2010, rasio wirausaha terhadap penduduk adalah 13%, selanjutnya terus menurun, hingga 7,3% di tahun 2015. Selanjutnya meningkat kembali hingga tahun 2017, menjadi 10,6%.

Sebagai daerah *buffer zone* dari ibukota, PDRB Kota Bogor dari tahun 2010 hingga tahun 2017 selalu meningkat, dengan laju pertumbuhan tertinggi adalah pada tahun 2012 ke tahun 2013, sebesar 12,16%. Selanjutnya, walaupun PDRB terus meningkat, tetapi lajunya semakin menurun hingga ke tahun 2017. Laju pertumbuhan dari tahun

2016 ke tahun 2017 adalah sebesar 8,77%, mengalami perlambatan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Pemerintah Kota Bogor berusaha untuk mengurangi kemiskinan dan membantu masyarakatnya, salah satunya dengan memberikan bantuan sosial. Dana bantuan sosial di Kota Bogor dari tahun 2010 hingga tahun 2017 kecenderungannya mengalami penurunan. Pada tahun 2010 rasio dana bantuan social terhadap total belanja adalah 9,33%, menurun terus hingga tahun 2013, menjadi 1,55%, kemudian tahun 2016 yang sangat rendah, sebesar 0,00% dan tahun 2017 meningkat menjadi 1,25%.



Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat tahun 2010-2018

Gambar 2.30. Perkembangan Jumlah ASN, Orang Miskin, Wirausaha, Nilai PDRB dan Dana Bantuan Sosial di Kota Bogor dari Tahun 2010 - 2017

Sementara itu jika dibandingkan dengan indeks kedalaman kemiskinan di wilayah sekitarnya, indeks kedalaman kemiskinan (P1) Kota Bogor, sepanjang tahun 2010 hingga 2017 lebih tinggi dibandingkan Kota Bekasi dan Kota Depok. Nilai P1 Kota Bogor lebih rendah dari nilai rata-rata P1 di Provinsi Jawa Barat.



Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat tahun 2010-2018

Gambar 2.31. Perbandingan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kota Depok dan Kota Bekasi

Kota Bekasi dan Kota Depok memiliki nilai P1 yang rendah dibandingkan Kota Bogor dan Kabupaten Bogor dikarenakan tingkat garis kemiskinan di Kota Depok dan Kota Bekasi lebih tinggi dari Kota Bogor. Pada tahun 2017, Sementara itu, jika dilihat dari garis kemiskinan, garis kemiskinan di Kota Depok dan Kota Bekasi nilainya lebih tinggi dibandingkan dengan Kota Bogor. Pada tahun 2010, nilai garis kemiskinan di Kota Bekasi dan Kota Depok adalah Rp 332.849 dan Rp 278.530. Sedangkan Kota Bogor berada pada Rp 310.279. Selanjutnya pada tahun 2013, nilai garis kemiskinan di Kota Bekasi dan Depok adalah Rp 449.026 dan Rp 443.302, sedangkan Kota Bogor adalah Rp 360.518. Begitu pula pada tahun 2017, garis kemiskinan Kota Bekasi dan Depok lebih tinggi dari Kota Bogor, yaitu Rp 544.534 dan Rp 556.470, sedangkan Kota Bogor sebesar Rp 450.078. Oleh karena itu nilai P1 di Kota Bogor relatif lebih tinggi dibandingkan 2 kota lainnya.



Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat tahun 2010-2018

Gambar 2.32. Perbandingan Garis Kemiskinan di Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kota Depok dan Kota Bekasi

Jika dilihat dari nilai upah minimum regional, UMR, kecenderungan kota dan kabupaten di Jawa Barat memiliki nilai yang relatif sama. Pada tahun 2010, nilai UMR/UMK sekitar Rp 1 juta, sedangkan di tahun 2017 telah mencapai Rp 3 juta an. Pada tahun 2010, UMK Kota Bogor adalah Rp 971.200, sedangkan di Kabupaten Bogor, Kota Depok dan Kota Bekasi masing-masing memiliki nilai UMK sebesar Rp 1.056.914, Rp 1.157.000 dan Rp 1.155.000. Selanjutnya pada tahun 2013, nilai UMK di Kota Bogor sebesar Rp 1.751.290, sedangkan di tiga kota lainnya adalah Rp 1.804.684 untuk Kabupaten Bogor, Rp 2.169.859 di Kota Depok dan Rp 1.961.667 di Kota Depok. Pada tahun 2017 UMK di kota dan kabupaten di Jawa Barat mengalami peningkatan, begitu juga keempat wilayah ini. UMK di Kota Bogor adalah 3.272.143, nilai ini sedikit lebih

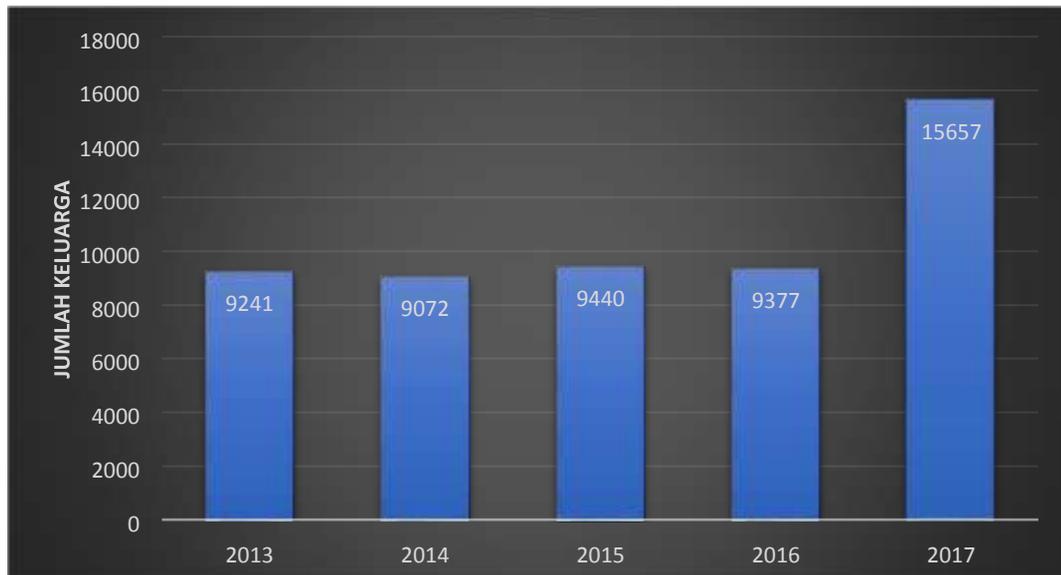
tinggi dibandingkan dengan UMK di Kabupaten Bogor (Rp 3.204.552), sedangkan jika dibandingkan dengan Kota Depok (Rp 3.297.489) dan Kota Bekasi (Rp 3.601.650) maka UMK Kota Bogor lebih rendah.



Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat tahun 2010-2018

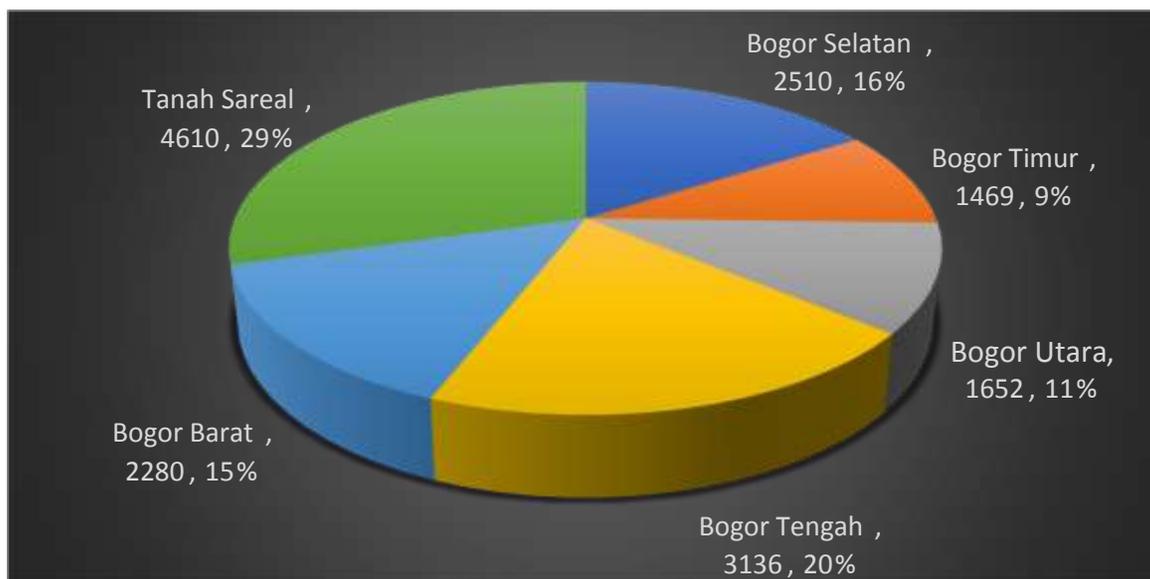
Gambar 2.33. Perbandingan UMR/UMK di Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kota Depok dan Kota Bekasi

Keluarga Sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materi yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang /maha Esa, memiliki hubungan yang selaras, serasi, dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan” (BKKBN,1994). Semnetara itu, keluarga pra sejahtera adalah keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya (*basic need*) secara minimal, seperti kebutuhan akan spiritual, pangan, sandang, papan, kesehatan dan KB. Jumlah keluarga prasejahtera di Kota Bogor dari tahun 2013 – 2017 mengalami laju meningkat, rata-rata 17,13% per tahun. Peningkatan tertinggi tahun 2016 ke 2017 sebesar 66,97%. Tahun 2017, jumlahh keluarga pra sejahtera meningkat dari 9.377 orang di tahun 2016 menjadi 15.657 keluarga di tahun 2017.



Gambar 2.34. Perkembangan Jumlah Keluarga Pra Sejahtera di Kota Bogor Tahun 2013-2017

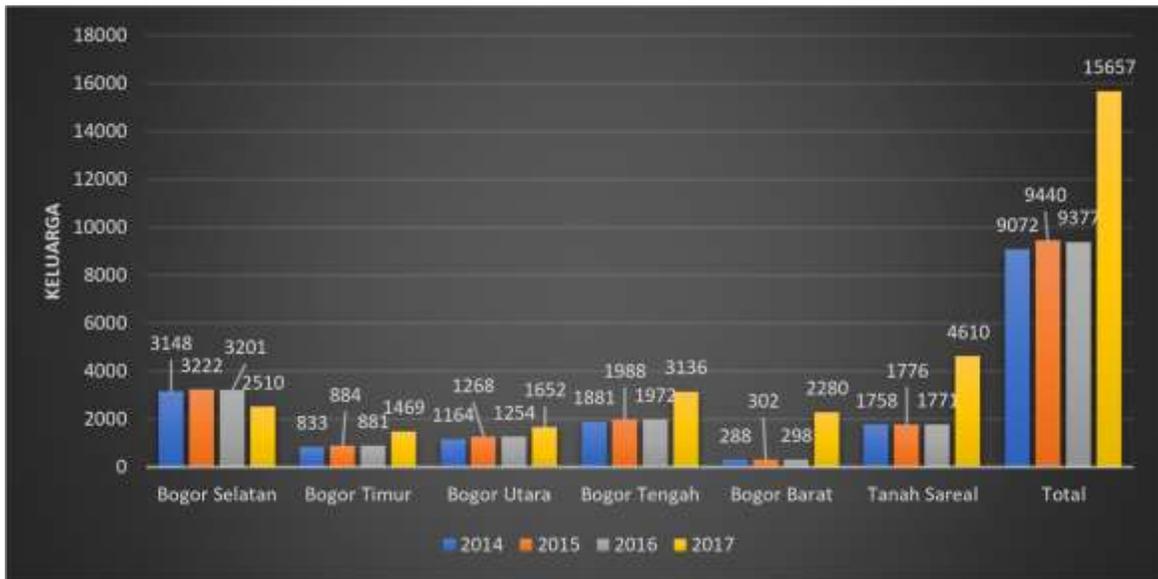
Jumlah keluarga pra sejahtera yang tertinggi di Kota Bogor pada tahun 2017 ada di Kecamatan Tanah Sereal, sekitar 29% atau sebesar 4.610 keluarga. Selanjutnya adalah Kecamatan Bogor Tengah dengan jumlah keluarga prasejahtera sebesar 3.136 keluarga atau sekitar 20%. Kecamatan Bogor Timur merupakan kecamatan yang paling sedikit terdapat keluarga pra sejahtera, yaitu 1.469 keluarga atau 9%.



Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat tahun 2010-2018

Gambar 2.35. Perbandingan Jumlah Keluarga Pra Sejahtera di KecamatanKecamatan di Kota Bogor

Perkembangan jumlah keluarga pra sejahtera di kecamatan-kecamatan di Kota Bogor dapat dilihat pada Gambar 4.36. Jumlah keluarga pra sejahtera pada tahun 2014, yang tertinggi berada di Kecamatan Bogor Selatan, sebesar 3.148 keluarga, terendah berada di Kecamatan Bogor Barat sebesar 288 keluarga.



Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat tahun 2015-2018

Gambar 2.36. Perkembangan Keluarga Pra Sejahtera di Kecamatan-Kecamatan di Kota Bogor Taun 2014-2017

Perkembangan hingga tahun 2016 relatif stabil. Selanjutnya pada tahun 2017 meningkat hampir di seluruh kecamatan, kecuali di Bogor Selatan yang mengalami penurunan sebesar 21,59%. Sedangkan peningkatan tertinggi berada di Tanah Sereal, dengan peningkatan lebih dari 600%, dari 1.771 keluarga pada tahun 2016 menjadi 4.610 keluarga di tahun 2017.

Tingkat inflasi memiliki pengaruh terhadap kemiskinan. Menurut Irawan et al, dalam penelitiannya mengenai Pengaruh Inflasi terhadap Kemiskinan di Pedesaan, inflasi memberikan beban yang relatif jauh lebih besar bagi penduduk miskin di Indonesia baik di perkotaan maupun pedesaan dibandingkan dengan yang dirasakan oleh penduduk nonmiskin. Sementara itu menurut Powers (1995), terdapat hubungan yang signifikan dan positif antara inflasi dan tingkat kemiskinan bila tingkat kemiskinan tersebut diukur dari sisi konsumsi (*consumption poverty rate*). Pada Gambar 4.37 dapat dilihat tingkat inflasi di Kota Bogor, Kabupaten Bogor dan Kota Depok. Kecenderungan tingkat inflasi dari tahun 2013 hingga tahun 2016 antara ketiganya adalah sama, mengalami penurunan, kemudian meningkat pada tahun 2016. Tetapi untuk tahun 2017, tingkat inflasi di Kabupaten Bogor dan Kota Depok meningkat, begitu juga tingkat inflasi di Kota Bogor. Tingkat inflasi di Kota Bogor tahun 2017 merupakan tingkat inflasi tertinggi diantara kota-kota tersebut, yaitu 4,59.



Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat tahun 2014-2018

Gambar 2.37. Tingkat Inflasi di Kota Depok, Kota Bogor dan Kab. Bogor 2013 -2017

Tingkat inflasi di Kota Bogor secara keseluruhan setiap bulannya **rendah** (<10%). Bahkan ada yg deflasi. Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tingkat inflasi yang paling tinggi pada tahun 2017 adalah pada sektor pendidikan, rekreasi dan olahraga, sekitar 8% pada bulan September. Sedangkan pada bulan lainnya lebih rendah lagi, secara rata-rata di bawah 4%. Permasalahannya adalah inflasi yang **fluktuatif**. Beberapa bulan di Kota Bogor, inflasi mencapai titik negative. Menurut BI, inflasi yang tidak stabil akan menciptakan ketidakpastian (*uncertainty*) bagi pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan. Sementara itu menurut Hellerstein, FRB, 1997, perekonomian stabil jika inflasi < 2,5%, inflasi moderat antara 2,5-5%, inflasi tinggi antara 5-8%, diatas 8% berarti perekonomian memasuki fase inflasi berbahaya.



Gambar 2.38. Tingkat Inflasi per Bulan di Kota Bogor pada Tahun 2017

Penduduk di Kota Bogor yang berumur 15 tahun ke atas yang bekerja selama seminggu yang lalu di kegiatan informal dan lapangan pekerjaan utama pada tahun 2017 dapat dilihat pada Gambar 4.39. Pada gambar tersebut dapat dilihat bahwa sebagian besar masyarakat di Kota Bogor bekerja di bidang perdagangan besar, eceran, rumah tangga dan hotel, mencapai 35%. Ketika terjadi inflasi yang rendah, maka ini berpengaruh pada perekonomian Kota Bogor.



Sumber : BPS Kota tahun 2010-2017

Gambar 2.39. Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu di Kegiatan Informal Menurut Kabupaten/Kota dan Lapangan Pekerjaan Utama di Kota Bogor, 2017

Gini Ratio merupakan suatu alat untuk mengukur tingkat kepincangan pembagian pendapatan relatif antar penduduk suatu negara atau wilayah yang telah diakui secara luas. Ketimpangan dalam menikmati hasil pembangunan di antara kelompok-kelompok penduduk dikhawatirkan akan menimbulkan masalah-masalah sosial. Penghitungan distribusi pendapatan menggunakan data pengeluaran sebagai proxy pendapatan. Walaupun hal ini tidak dapat mencerminkan keadaan yang sebenarnya, namun paling tidak dapat digunakan sebagai petunjuk untuk melihat arah dari perkembangan yang terjadi.

Gini ratio di Kota Bogor dari tahun 2013 hingga tahun 2017 nilainya paling tinggi diantara Kota Bekasi, Kota Depok dan Kabupaten Bogor. Nilai gini ratio Kota Bogor setiap tahunnya memiliki nilai lebih dari 0,4, kecuali pada tahun 2014 yang memiliki nilai sebesar 0,365.



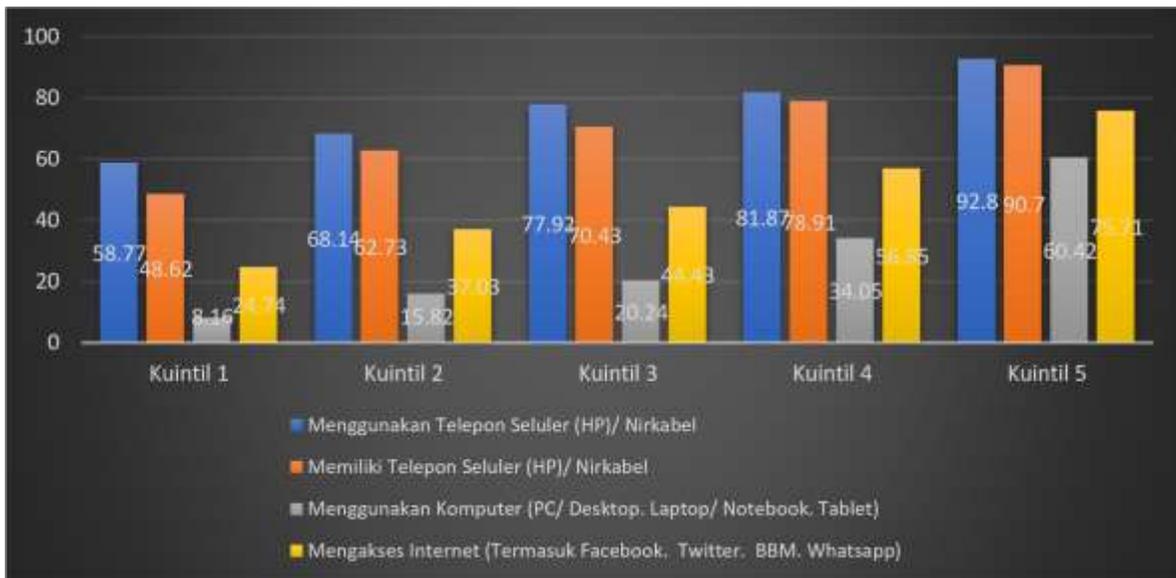
Gambar 2.40. Nilai Gini Ratio di Kota Bogor, Kota Bekasi, Kota Depok dan Kabupaten Bogor Tahun 2013 - 2017



Gambar 2.41. Rata-Rata Pengeluaran (Rupiah) Per Kapita Sebulan menurut Kelompok Barang dan Kuintil Pengeluaran, 2017

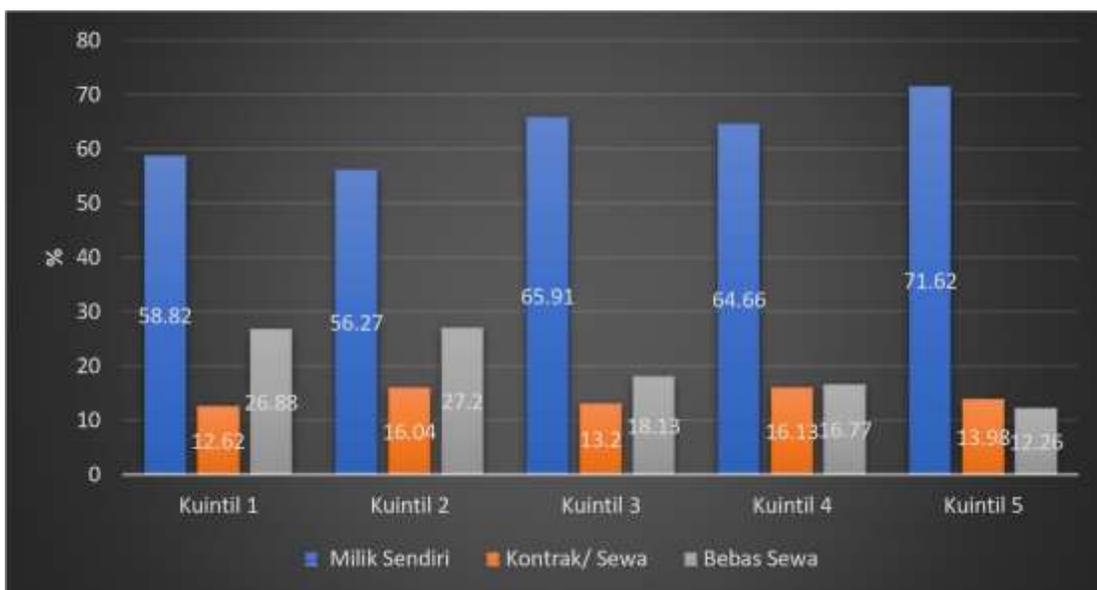
Pada Gambar 2.41 dapat dilihat rata-rata pengeluaran masyarakat di Kota Bogor berdasarkan atas pembagian pengeluaran, dari kuintil 1 (Q1) hingga kuintil 5 (Q5), dimana Q1 berarti 20% rumah tangga dengan pengeluaran perkapita terendah, sebaliknya Q5 adalah 20% rumah tangga dengan pengeluaran perkapita tertinggi. Pengeluaran makanan untuk Q1 hingga Q4 lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran non makanan. Kecenderungan pengeluaran makanan semakin menurun dengan meningkatnya pengeluaran. Hal ini dapat dilihat pada Q4 dimana pengeluaran makanan tetap lebih tinggi dari non makanan tetapi dengan perbedaan yang lebih rendah. Selanjutnya untuk Q5, pengeluaran makan lebih rendah dibandingkan dengan non makanan. Pengeluaran rata-rata Q1 adalah Rp 412 ribu, pengeluaran makanan lebih tinggi dibandingkan dengan non makanan. Begitu juga dengan Q2, dimana rata-rata pengeluaran adalah Rp 609 ribu, Q3 dengan rata-rata pengeluaran adalah Rp 931 ribu, Q4 dengan rata-rata sebesar Rp 1,45 juta.

Penggunaan teknologi, seperti computer, telepon selular, laptop dan internet di Kota Bogor, seluruh kelompok masyarakat terdapat orang yang dapat menggunakan fasilitas-fasilitas ini. Penggunaan HP merupakan kegiatan yang paling banyak digunakan di setiap kelompok pengeluaran, dari Q1 hingga Q5. Sementara itu untuk penggunaan computer, perbedaannya cukup tinggi terutama Q4 dan Q5 dibandingkan dengan Q1, Q2 dan Q3. Tetapi untuk penggunaan internet, jumlahnya lebih tinggi dibandingkan dengan yang menggunakan computer, hal ini karena internet dapat diakses dengan menggunakan telepon selular.



Gambar 2.42. Persentase Anggota RT Berusia 5 Tahun ke Atas menurut Karakteristik dan Penggunaan IT selama Tiga Bulan Terakhir, 2017

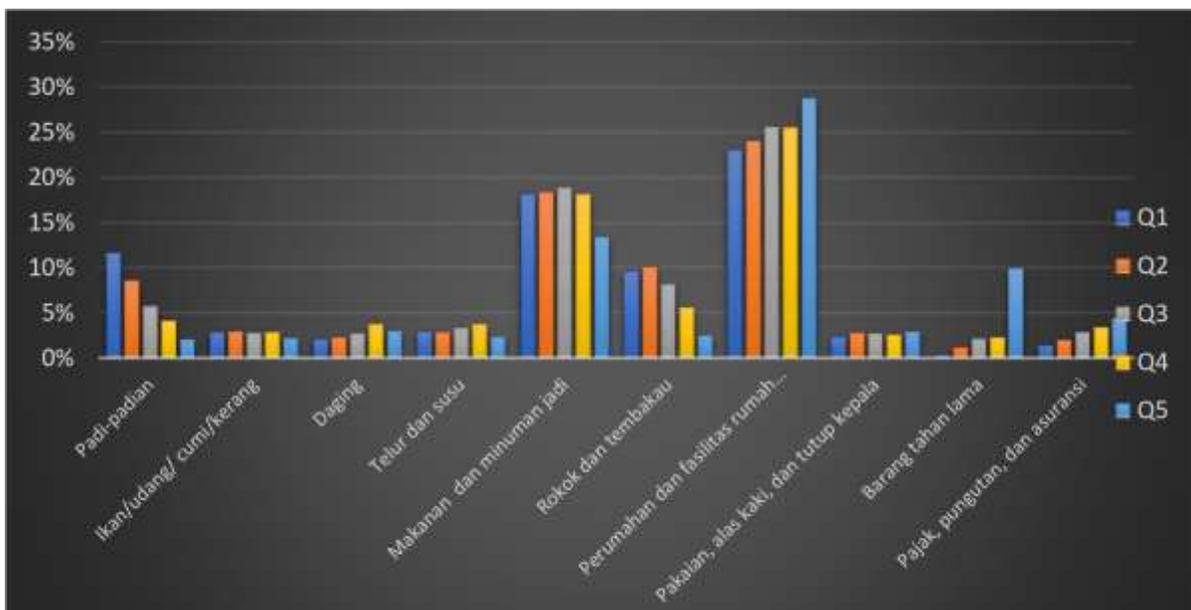
Sementara itu untuk kepemilikan rumah, dari masing-masing kelompok pengeluaran, sebagian besar telah memiliki rumah sendiri, bahkan rata-rata kepemilikan rumah di Q1 lebih tinggi dibandingkan dengan Q2, dan kepemilikan rumah kelompok Q3 lebih tinggi dibandingkan dengan Q4. Kepemilikan rumah untuk kelompok Q5 merupakan yang paling tinggi, yaitu 71,62%.



Gambar 2.43. Persentase Rumah Tangga menurut Karakteristik dan Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal yang Ditempati, 2017

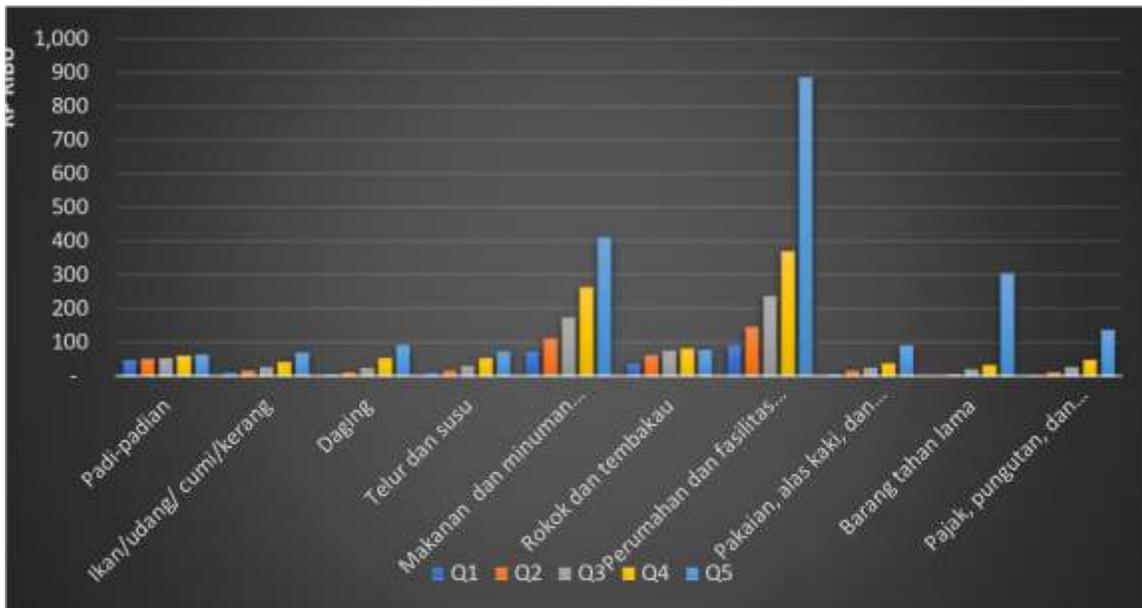
Pengeluaran untuk perumahan dan fasilitas rumah tangga merupakan pengeluaran yang paling tinggi dibandingkan dengan pengeluaran lainnya di setiap kelompok pengeluaran, dengan nilai di atas 20%, bahkan untuk kelompok Q3, Q4 dan Q5

di atas 25%. Pengeluaran selanjutnya yang tertinggi adalah pengeluaran untuk makanan dan minuman jadi dengan *share* lebih dari 15% untuk Q1 hingga Q4, sedangkan untuk Q5 lebih rendah dari 15%. Pengeluaran padi-padian *share*-nya menurun dari Q1 ke Q5, Q1 paling tinggi (11,67%), Q5 terendah (2,07%). Sementara itu untuk pengeluaran tembakau, pengeluaran tembakau Q2 paling tinggi (10,16%), Q1 (9,62%), Q5 terendah (2,56%).



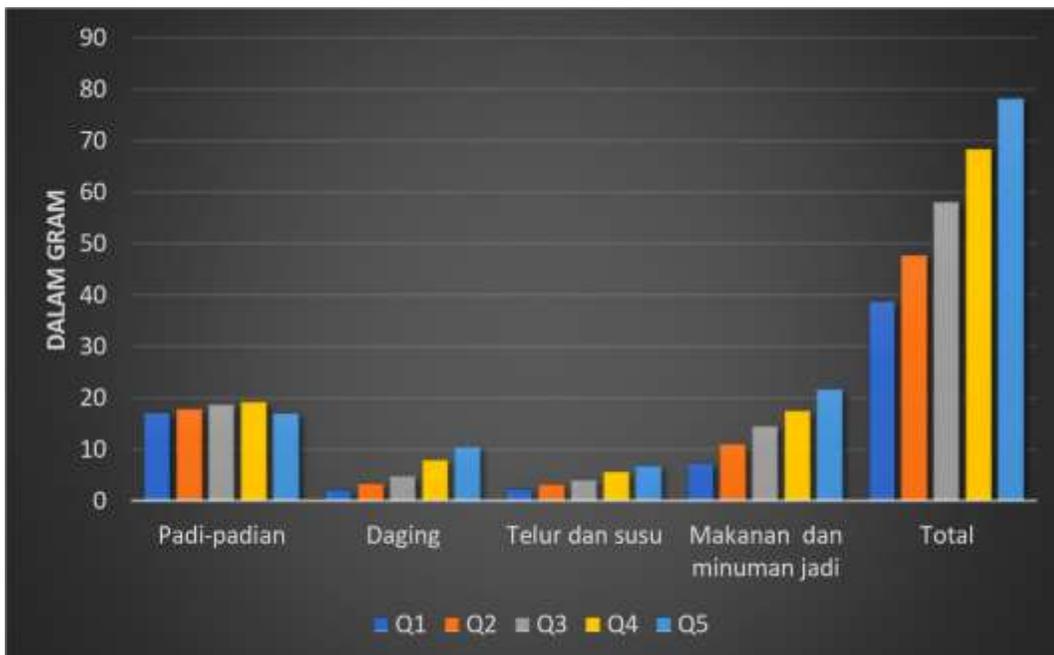
Gambar 2.44. Rata-Rata Pengeluaran (%) terhadap Total Pengeluaran Per Kapita Sebulan Beberapa Kelompok Barang dan Kuintil Pengeluaran, 2017

Sementara itu jika dilihat dari nilainya, pengeluaran tertinggi adalah untuk perumahan dan fasilitas rumah untuk Q5, yang hamper mencapai Rp 900 ribu. Begitu juga pengeluaran untuk makanan dan minuman dari Q5 yang mencapai lebih dari Rp 400 ribu. Secara umum, besarnya pengeluaran semakin meningkat dengan meningkatnya pengeluaran. Hal ini berbeda untuk kebutuhan pokok (padi-padian) dan rokok. Kedua kelompok ini jumlahnya dari setiap kelompok hampir sama.



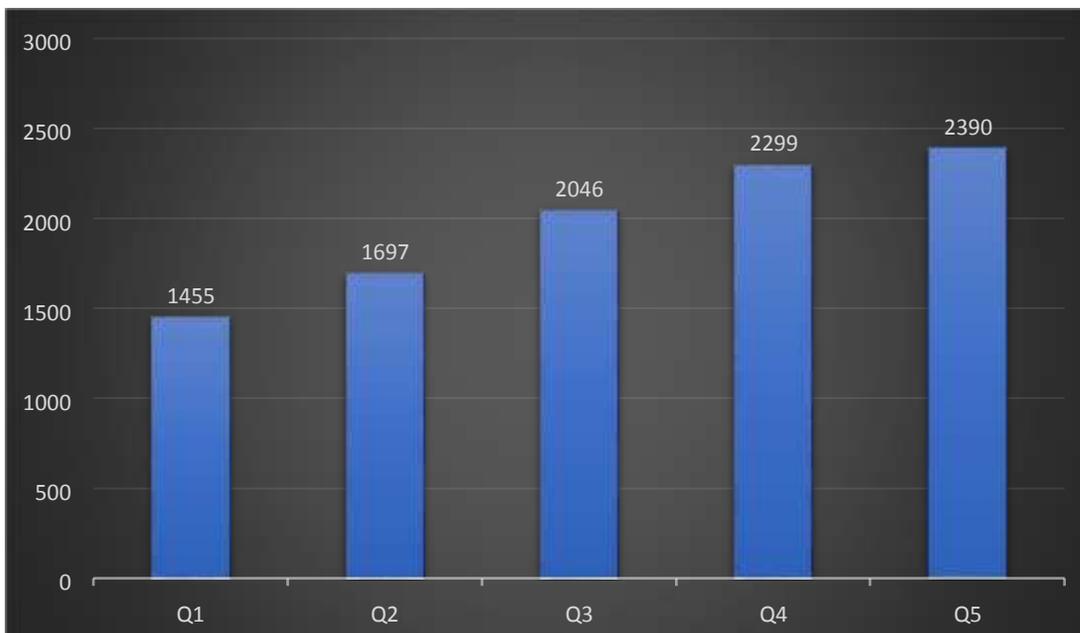
Gambar 2.45. Rata-Rata Pengeluaran (Rupiah) Per Kapita Sebulan Beberapa Kelompok Barang dan Kuintil Pengeluaran, 2017

Pengeluaran untuk kebutuhan makanan pokok, jumlah proteinnya relatif sama, berkisar antara 17 gram hingga 19 gram satu hari. Sedangkan untuk daging, telur dan makanan minuman jadi, semakin meningkat pengeluaran maka semakin meningkat konsumsi proteinnya.



Gambar 2.46 Rata-Rata Konsumsi Protein (Gram) per Kapita Sehari menurut Kelompok Barang dan Kuintil Pengeluaran, 2017

Begitu juga dengan rata-rata konsumsi kalori per kapita sehari, semakin meningkat pengeluaran maka rata-rata konsumsinya mengalami peningkatan. Asupan kalori tertinggi adalah pada kelompok Q5 sebesar 2.390 Kcal, sedangkan yang terendah adalah pada kelompok Q1, yaitu rata-rata konsumsi kalorinya sebesar 1.455 Kcal sehari.



Gambar 2.47. Rata-Rata Konsumsi Kalori (Kcal) per Kapita Sehari menurut Kuintil Pengeluaran, 2017

2.3.1. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Kota Bogor

Analisis untuk faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Kota Bogor menggunakan analisis regresi berganda. Beberapa variable yang digunakan dalam analisis factor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Kota Bogor adalah Jumlah ASN, Jumlah Wirausaha, PDRB per kapita, inflasi dan pengeluaran Pemerintah Kota Bogor untuk dana bantuan sosial.

Berdasarkan hasil pengolahan analisis regresi, model regresi ini dapat dikatakan cukup baik, karena memiliki nilai F yang signifikan pada tingkat 1%, begitu pula variablevariabelnya. Berdasarkan hasil regresi, nilai koefisien regresi adalah 0,9929, ini berarti variabel-variabel yang digunakan pada model dapat menerangkan 99,29% keragaman yang terjadi pada penentuan jumlah orang miskin di Kota Bogor, sisanya dijelaskan oleh variable variabel bebas lain yang tidak terdapat dalam model.

Berdasarkan hasil pengolahan terhadap model, didapat bahwa variabel-variabel yang ada sesuai dengan konsep ekonomi, dimana tanda dari koefisien jumlah ASN, jumlah wirausaha, PDRB per kapita dan inflasi memiliki tanda negatif. Hal ini berarti jika terjadi peningkatan terhadap varioabel-variabel tersebut, maka akan mengurangi tingkat

kemiskinan di Kota Bogor. Sementara itu nilai koefisien dana bantuan sosial atau bansos memiliki nilai negatif, ini berarti jika terjadi kenaikan dana bansos, maka orang miskin akan meningkat.

Variabel jumlah ASN memiliki nilai koefisien sebesar $-0,10$. Hal ini berarti jika jumlah ASN meningkat sebesar 1%, maka akan mengurangi jumlah masyarakat miskin sebesar 0,10%. Hal ini berarti jika terjadi peningkatan jumlah PNS, maka tingkat kemiskinan akan turun, walaupun dalam model tersebut, tidak terlalu signifikan penurunannya, karena variabel ini tidak signifikan pada level 5%.

Variabel jumlah Jumlah Wirausaha memiliki nilai koefisien sebesar $-0,01$. Hal ini berarti jika jumlah wirausaha meningkat sebesar 1%, maka akan mengurangi jumlah masyarakat miskin sebesar 0,01%. Hal ini berarti jika terjadi peningkatan jumlah wirausaha, maka tingkat kemiskinan akan turun, walaupun dalam model tersebut, tidak terlalu signifikan penurunannya, karena variabel ini tidak signifikan pada level 5%.

Variabel PDRB per kapita memiliki nilai koefisien sebesar $-0,33$. Hal ini berarti jika PDRB per kapita meningkat sebesar 1%, maka akan mengurangi jumlah masyarakat miskin sebesar 0,33%. Hal ini berarti jika terjadi peningkatan PDRB per kapita, maka tingkat kemiskinan akan turun. Variabel PDRB per kapita signifikan terhadap penurunan jumlah orang miskin.

Hal ini karena variabel PDRB per kapita signifikan pada level 5%.

Variabel inflasi memiliki nilai koefisien sebesar $-0,001$. Hal ini berarti jika inflasi meningkat sebesar 1%, maka akan mengurangi jumlah masyarakat miskin sebesar 0,001%. Hal ini berarti jika terjadi peningkatan inflasi, maka tingkat kemiskinan akan turun, walaupun dalam model tersebut, tidak terlalu signifikan penurunannya, karena variabel ini tidak signifikan pada level 5%. Penurunan ini terjadi karena inflasi yang terjadi tidak selamanya berpengaruh baik terhadap perekonomian. Terjadinya inflasi dapat meningkatkan perekonomian daerah, karena dengan adanya inflasi maka akan banyak menguntungkan produsen. Berdasarkan data BPS, jumlah wirausaha di Kota Bogor lebih tinggi dari jumlah ASN. Jumlah wirausaha mencapai 10,6%. Selain itu, 35% masyarakat di Kota Bogor bekerja di bidang perdagangan besar, eceran, rumah tangga dan hotel. Oleh karena itu, ketika terjadi inflasi yang rendah, maka ini berpengaruh pada perekonomian Kota Bogor, sehingga akan meningkatkan kemiskinan.

Variabel dana bantuan sosial memiliki nilai koefisien yang positif, sebesar 0,00. Hal ini berarti jika dana bantuan sosial meningkat sebesar 10%, maka akan meningkatkan jumlah masyarakat miskin sebesar 0,01%. Variabel ini tidak terlalu signifikan, karena variabel ini tidak signifikan pada level 5%. Selain itu nilai koefisiennya pun paling rendah

dibandingkan dengan variabel-variabel lainnya. Jika dilihat di lapangan, masyarakat kita saat ini sangat senang mendapatkan bantuan dari pemerintah. Oleh karena itu, ketika ada program bantuan untuk masyarakat miskin, maka ada masyarakat yang berada pada tahapan sejahtera I (di atas pra sejahtera) yang berubah menjadi miskin agar mereka bisa mendapatkan dana bantuan sosial.

Tabel 2.16.

Hasil Pengolahan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Jumlah Orang Miskin di Kota

Bogor				
	<i>Coefficients</i>	<i>Standard Error</i>	<i>t Stat</i>	<i>P-value</i>
Intercept	18.21999	2.707278	6.730002	0.021373
Ln (Jumlah ASN)	-0.10488	0.121238	-0.8651	0.478171
Ln (Jumlah Wirausaha)	-0.01734	0.046098	-0.37615	0.742958
Ln (PDRB per kapita)	-0.33586*	0.068647	-4.89251	0.039329
Ln (Inflasi)	-0.00183	0.001345	-1.36033	0.306755
Ln (Dana Bansos)	0.000923	0.001918	0.48105	0.677967
F	56.45377*			
<u>R Square</u>	<u>0.992964</u>			

Keterangan: *0 signifikan pada level 5%

2. 4. Pengangguran

Pengangguran adalah angkatan kerja yang tidak melakukan kegiatan kerja, atau sedang mencari pekerjaan atau bekerja secara tidak optimal. Menurut Sakernas (Survey Keadaan Angkatan Kerja Nasional), pengangguran didefinisikan antara lain: (1) Mereka yang sedang mencari pekerjaan dan saat itu tidak bekerja, (2) Mereka yang mempersiapkan usaha yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka untuk mempersiapkan suatu usaha atau pekerjaan yang baru, (3) Mereka yang tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin dalam mendapatkan pekerjaan, hal ini disebut dengan penganggur putus asa, dan (4) Mereka yang telah memiliki pekerjaan, namun belum mulai bekerja.

Penduduk yang termasuk dalam penganggur terbuka adalah mereka yang sedang mencari pekerjaan, mereka yang mempersiapkan usaha, mereka yang tidak mencari pekerjaan karena tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan mereka yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Pengangguran terbuka dimana situasi sebagian besar angkatan kerja tidak mendapatkan pekerjaan yang dapat menghasilkan pendapatan rutin. Jenis pengangguran

ini dapat dilihat dan dihitung berdasarkan jumlah orang yang menganggur. Angkatan kerja mengembang pada tingkat yang lebih cepat daripada tingkat pertumbuhan ekonomi. Karenanya semua orang tidak mendapatkan pekerjaan.

Menurut BPS pengangguran terbuka adalah penduduk usia kerja yang selama seminggu yang lalu tidak melakukan kegiatan bekerja dan sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan suatu usaha, mereka yang tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan sudah punya pekerjaan tetapi belum bekerja. Secara umum pengangguran dapat digolongkan atas 3 (tiga) bagian besar yaitu : Pengangguran Terselubung (*Disguised Unemployment*), Setengah Menganggur (*Under Unemployment*), dan Pengangguran Terbuka (*Open Unemployment*).

Bila dilihat jumlah pengangguran menurut golongan umur tahun 2013-2017 dan dilihat dari periode tahun 2013- 2014 jumlah penganggur terbuka di Kota Bogor mengalami penurunan yang cukup signifikan dengan rata-rata penurunan sebesar 17,86%, tetapi antara tahun 2014-2015 terjadi peningkatan rata-rata sebesar 76,05%, kemudian menaik kembali di tahun 2017. Perkembangan pada tahun 2017 terjadi secara umum kenaikan tingkat pengangguran secara rata-rata sebesar 8,47, untuk golongan umur yang menurun yaitu 30-34, 35-39 dan 45-49. Penurunan jumlah pengangguran tersebut pada dasarnya dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya, makin membaiknya perekonomian secara nasional sehingga terbukanya perluasan kesempatan kerja diberbagai sektor lapangan usaha yang dapat mengurangi jumlah tingkat pengangguran.

Pada Tabel 4.18 dapat dilihat data pengangguran terbuka menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan tahun 2013-2017. Pada periode tahun 2013-2014 tingkat penganggur terbuka yang berpendidikan SD proporsinya sebesar 22,31% turun menjadi sebesar 16,48%, keadaan yang sama dikuti oleh yang berpendidikan SMTP dan Universitas. Pada tahun 2015 tingkat penganggur terbuka yang mengalami penurunan pada pendidikan SMTP, dan SMTA Umum dari tahun sebelumnya. Penurunan tingkat pengangguran pada jenis pendidikan tersebut disebabkan terbukanya peluang kesempatan kerja untuk pendidikan tersebut. Pada Tahun 2015-2016 rata-rata semua tingkat pendidikan cenderung naik dengan kenaikan rata-rata sebesar 16,67%, kecuali untuk golongan pendidikan SMTP dan SMTA umum mengalami penurunan sebesar 1,8%, dan 4,01%.

Tabel 2.17.
Penganggur Terbuka (Mencari Pekerjaan) Menurut Golongan Umur di Kota Bogor,
Tahun 2013 – 2017

Golongan Umur	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
15 - 19	12,381	16,171	14,162	11,936	17,844
20 - 24	10,434	16,161	14,911	13,492	17,819
25 - 29	9,021	3,584	8,653	10,529	3,893
30 - 34	4,111	2,619	2,578	1,736	2,804
35 - 39	3,813	1,296	1,903	1,799	1,374
40 - 44	2,006	1,164	3,027	2,991	1,213
45 - 49	1,127	568	884	584	534
50 - 54	495	568	1,353	1,350	543
55 - 59	-	936	2,471	2,470	986
60 - 64	468	436	-	-	429
65+	-	-	-	-	-
Jumlah	43,856	43,503	49,942	46,886	47,438

Sumber : Kota Bogor Dalam Angka Tahun 2014-2018

Adapun yang mengalami kenaikan yang cukup besar terdapat pada pendidikan SMTA Kejuruan dengan kenaikan sebesar 2,58%, diikuti dengan golongan pendidikan Universitas 1,78%, Diploma 1,40% dan SD 0,05%. Peningkatan tersebut secara umum dapat disebabkan oleh kendala karena terbatasnya ketersediaan lapangan pekerjaan sehingga membuat kompetisi semakin ketat antar pencari kerja dan sering kali mereka melamar dan menerima pekerjaan apa saja meskipun tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikannya.

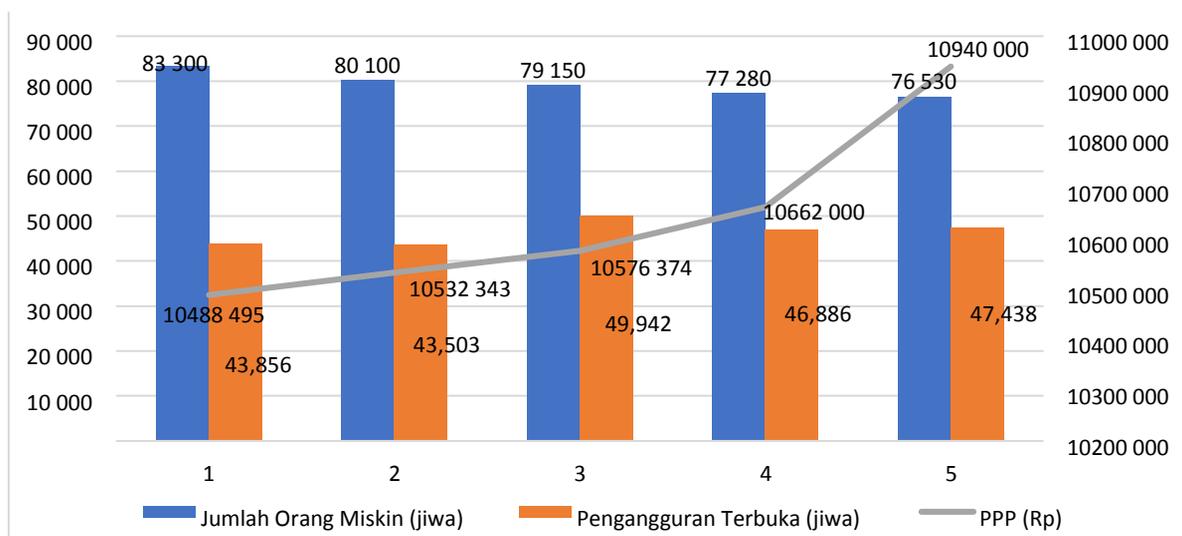
Tabel 2.18.
Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Tingkat Pendidikan di Kota Bogor
Tahun 2013 – 2017

Pendidikan	Tahun & Proporsi									
	2013	(%)	2014	(%)	2015	(%)	2016	(%)	2017	(%)
< SD	9,784	22.31	7,174	16.48	11,033	22.09	10,380	22.14	7,820	16.49
SMTA	11,072	25.25	10,148	23.31	8,207	16.43	6,859	14.63	11,152	23.51
SMTA Umum	14,318	32.65	14,662	33.68	9,900	19.82	7,416	15.82	16,097	33.93
SMTA Kejuruan	5,212	11.88	9,106	20.92	15,424	30.88	15,689	33.46	9,921	20.91
DIPLOMA I/II/III/AKADEMI	632	1.44	1,872	4.30	2,994	5.99	3,467	7.40	1,903	4.01

Pendidikan	Tahun & Proporsi									
	2013	(%)	2014	(%)	2015	(%)	2016	(%)	2017	(%)
UNIVERSITAS	2,838	6.47	568	1.30	2,384	4.77	3,074	6.56	545	1.15
Jumlah/ Total	43,85	100	43,53	100	49,94	100	46,88	100	47,43	100
	6		0		2		6		8	

Sumber : Kota Bogor Dalam Angka Tahun 2014-2018

Pada Tahun 2016-2017 rata-rata semua tingkat pendidikan cenderung menurun dengan penurunan rata-rata sebesar 6,75%, kecuali untuk golongan pendidikan SMTP dan SMTA umum mengalami kenaikan yang cukup besar yaitu 8,88%, dan 18,12%. Adapun pendidikan SMTA Kejuruan merupakan tingkat penurunan terbesar yaitu 12,55%. Dan penurunan terendah pada golongan pendidikan Diploma. Kondisi pengangguran di Kota Bogor yang terus meningkat tidak sejalan dengan kondisi daya beli masyarakat Kota Bogor terus meningkat dan kondisi jumlah orang miskin terus mengalami penurunan. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 4.48.

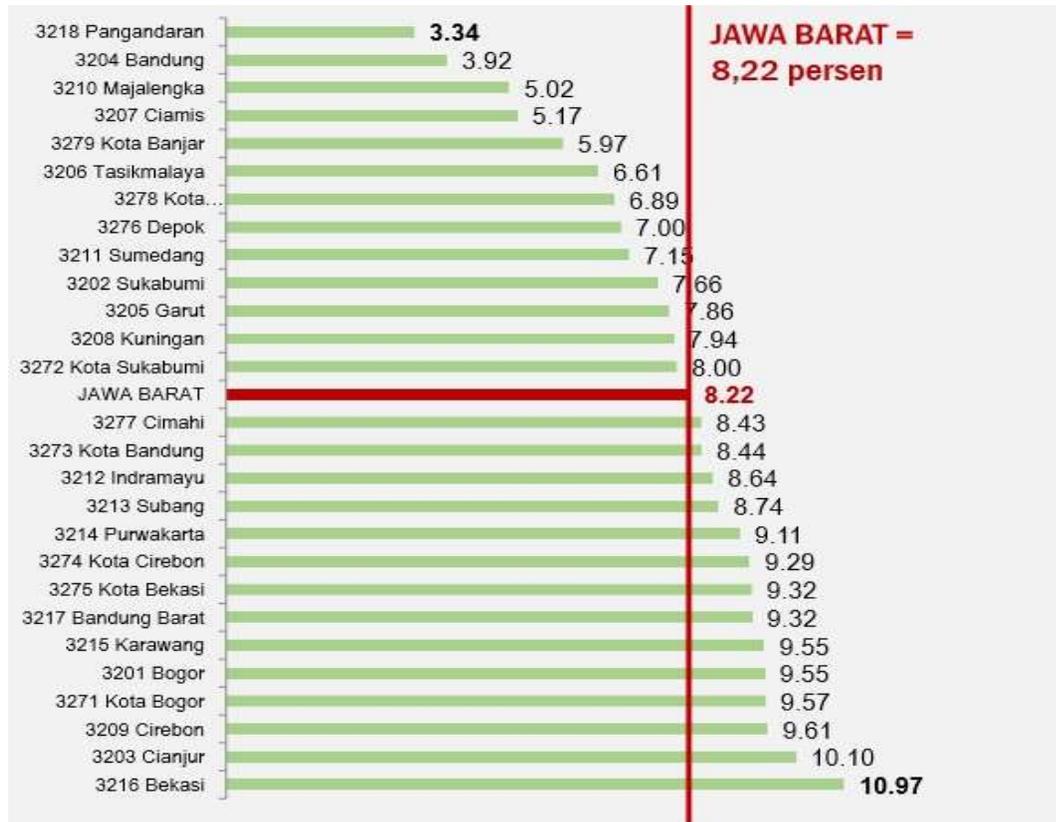


Sumber: BPS Kota Bogor, 2019

Gambar 2.48. Tingkat PPP, Jumlah Orang Miskin dan Pengangguran di Kota Bogor 2013 -2017

Pengangguran di Kota Bogor berdampak langsung terhadap angka kemiskinan. Meski mengalami penurunan tapi jika dibandingkan dengan Kota Depok, angka kemiskinan di Kota Bogor masih cukup tinggi (BPS, 2018). Angka pengangguran mempengaruhi angka kemiskinan Kota Bogor yang sejak 2012 sampai 2017 turun secara lambat hanya sekitar 1 persen. Jika dibandingkan dengan kondisi di Jawa Barat, maka berdasarkan data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kab/Kota, Agustus 2017, diketahui bahwa TPT tertinggi tercatat di Kabupaten Bekasi sebesar 10,97% dan TPT terendah Tercatat di

Kabupaten Pangandaran sebesar 3,34%. TPT Kota Bogor masih berada di atas rata-rata Propinsi Jawa Barat yaitu sebesar 9,57%. Data tingkat pengangguran di wilayah-wilayah di Jawa Barat dapat dilihat pada Gambar 4.49.



Sumber: BPS Jawa Barat (2018)

Gambar 2.49. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kab/Kota di Jawa Barat per Agustus 2017

BAB III

CAPAIAN KINERJA SASARAN RPJMD KOTA BOGOR TAHUN 2015 – 2019

**3.1. MISI 1 MEWUJUDKAN BOGOR KOTA YANG CERDAS DAN BERWAWASAN
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI**

Tabel 3.1.

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Misi I RPJMD Kota Bogor Tahun 2015 – 2019

No	Indikator Kinerja	Target RPJMD 2015 - 2019					Capaian Indikator Kinerja 2015 - 2019					Evaluasi Capaian di Akhir Tahun
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
A	MISI 1 : MEWUJUDKAN BOGOR KOTA YANG CERDAS DAN BERWAWASAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI											
	Sasaran 1 : Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang cerdas (Smart Government)											
1.	Indeks E-Government	2,91	2,91	3,13	3,21	3,29	2,91	NA	2,92	3,03	3,10	Tidak Tercapai
	Sasaran 2 : Meningkatkan pemerataan akses dan mutu pendidikan (smart people)											
1.	Rata-rata Lama Sekolah	9,83	10,28	10,32	10,36	10,4	10,28	10,28	10,29	10,30	10,32	Tidak Tercapai
2.	APK SD	113,5	113,7	113,8	113,9	114	110,5	106,57	105,55	112,6	112,64	Tidak Tercapai
3.	APK SMP	104,7	104,75	104,8	104,9	105	108,56	105,55	101,06	104,1	104,01	Tidak Tercapai
4.	Nilai Rata-Rata USBN SD	75,51	75,75	75,85	75,95	76	75,47	75,75	72,12	68,12	73,95	Tidak Tercapai
5.	Nilai Rata-Rata UN SMP	66,75	67	67,25	67,5	67,75	65	67	59,62	58,27	61,07	Tidak Tercapai
6.	Persentase Sekolah Terakreditasi A	59	62	63	64	65	60	62	70,26	73,5	60	Tidak Tercapai
	Sasaran 3 : Meningkatkan inovasi dan kreativitas masyarakat											
1.	Persentase inovasi masyarakat yang berhasil di implementasikan untuk menunjang Visi Misi Kota	NA	NA	NA	30	30	NA	NA	NA	100		

3.2. MISI 2 : MEWUJUDKAN BOGOR SEBAGAI KOTA SEHAT DAN MAKMUR

Tabel 3.2.

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Misi 2 RPJMD Kota Bogor Tahun 2015 – 2019

No	Indikator Kinerja	Target RPJMD 2015 – 2019					Capaian Indikator Kinerja 2015 - 2019					Perangkat Daerah
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
B.	MISI 2 : MEWUJUDKAN BOGOR SEBAGAI KOTA SEHAT DAN MAKMUR											
	Tujuan 1 : Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat											
	Sasaran 1 : Meningkatkan mutu layanan kesehatan masyarakat											
1.	Persentase masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan	62	62	66	100	100	65	67	76,6	95,85	94,02	Tidak Tercapai
2.	Angka Harapan Hidup saat Lahir	72,88	72,95	73	73,08	73,15	72,88	72,95	73,01	73,12	73,41	Tercapai
3.	Rasio kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup	105/100.000 kelahiran hidup	105/100.000 kelahiran hidup	105/100.000 kelahiran hidup	100/100.000 kelahiran hidup	95/100.000 kelahiran hidup	105/100.000 kelahiran hidup	110/100.000 kelahiran hidup	30/100.000 kelahiran hidup	60/100.000 kelahiran hidup	69/100.000 kelahiran hidup	Tercapai
4.	Rasio Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup	3/1.000 kelahiran hidup	3/1.000 kelahiran hidup	3/1.000 kelahiran hidup	3/1.000 kelahiran hidup	3/1.000 kelahiran hidup	3/1.000 kelahiran hidup	3/1.000 kelahiran hidup	3/1.000 kelahiran hidup	3/1.000 kelahiran hidup	2,67/1.000 kelahiran hidup	Tercapai
	Sasaran 2 : Meningkatkan kualitas lingkungan sehat di kawasan perumahan dan permukiman											
1.	Cakupan penduduk yang memiliki akses/terlayani sistem jaringan dan pengolahan air limbah skala pengolahan air limbah skala komunitas/	66,6	66,8	67	67,26	67,58	NA	66,8	72,10	67,21	69,12	Tercapai

No	Indikator Kinerja	Target RPJMD 2015 – 2019					Capaian Indikator Kinerja 2015 - 2019					Perangkat Daerah
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	kawasan/kota											
2.	Persentase rumah tangga yang terlayani air bersih/ air minum	84	86,92	90,03	94,62	98,95	82%	86,92%	90,55%	91,98%	92,58%	Tidak Tercapai
3.	Prosentase luasan kawasan kumuh sedang	70	60	50	40	30	0,42	0,42	0,42	0,42	0	Tercapai
Sasaran 3 : Meningkatnya perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat												
1.	Persentase Rumah Tangga ber-PHBS(%)	63	65	67	70	72	63,40	64,20	65,2	65,5	65,80	Tidak Tercapai
2.	Tingkat kepatuhan penerapan KTR	45	50	55	60	75	100	100	100	100	73,80	Tidak Tercapai
Tujuan 2 : Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Kota Bogor												
Sasaran 1 : Berkurangnya tingkat pengangguran												
1.	Tingkat pengangguran terbuka (TPT)	8,44	7,64	6,91	6,26	5,66	11,03	10,10	6,5	9,57	9,1	Tidak Tercapai
2.	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja	8,96	10,89	12,35	13,35	14,89	7,90	8,89	10,25	54	58,75	Tercapai
Sasaran 2 : Menurunnya tingkat kemiskinan												
1.	Angka kemiskinan	7,60	7,29	7,18	7,05	7	7,60	7,29	7,11	5,93	5,77	Tercapai
2.	Indeks gini ratio	0,33	0,33	0,32	0,32	0,31	0,47	0,43	0,43	0,41	0,41* (angka tahun sebelumnya)	Tidak Tercapai
Sasaran 3 : Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat												
1.	Prosentase penduduk rawan pangan	26,29	25,29	24,29	23,29	22,29	NA	NA	24,79	18,3	12,31	Tercapai
Tujuan 3 : Terwujudnya Stabilitas Perekonomian Masyarakat												
Sasaran 1 : Meningkatnya pertumbuhan ekonomi												
1.	Laju Pertumbuhan	6,26	6,36	6,46	6,56	6,66	6,14	6,73	6,12	6,14	6,04	Tidak Tercapai

No	Indikator Kinerja	Target RPJMD 2015 – 2019					Capaian Indikator Kinerja 2015 - 2019					Perangkat Daerah
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	Ekonomi (LPE)											
2.	Nilai investasi	2,1 T	2,2 T	2,3 T	2,4 T	2.5T	3,104 T	2,315 T	2.9T	3.1T	2,641 T	Tercapai
3.	Pertumbuhan jumlah komoditi ekspor	21	23	25	27	29	21	23	30	30	30	Tercapai
4.	PDRB per kapita (dalam juta rupiah)	31	34	36	38	40	30,88**	33,25**	37,18	37.18**		

3.3. MISI 3 : MEWUJUDKAN KOTA BOGOR SEBAGAI KOTA YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN

Tabel 3.3.

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Misi 3 RPJMD Kota Bogor Tahun 2015 – 2019

No	Indikator Kinerja	Target RPJMD 2015 – 2019					Capaian Indikator Kinerja 2015 - 2019					Perangkat Daerah
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
C.	MISI 3 : MEWUJUDKAN KOTA BOGOR SEBAGAI KOTA YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN											
	Sasaran 1 : Terkendalinya tata ruang kota Bogor											
1.	Tingkat konsistensi pemanfaatan ruang (Prosentase pemanfaatan ruang di kawasan lindung dan kawasan budidaya yang sesuai RTRW)	75	80	85	87	90	NA	80	86	88		
2.	Tingkat konsistensi pemanfaatan ruang (Prosentase ketercapaian Rencana Struktur Ruang)	75	80	85	87	90	NA	80	86	89		

No	Indikator Kinerja	Target RPJMD 2015 – 2019					Capaian Indikator Kinerja 2015 - 2019					Perangkat Daerah
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
Sasaran 2 : Berkurangnya tingkat kemacetan												
1.	Peningkatan kecepatan rata-rata jalan arteri dan kolektor (150 ruas jalan arteri dan kolektor)	22,15	25,50	28,15	32,75	35,15	24,65	26,1	34,84	35,39		
Sasaran 3 : Meningkatnya prosentase luasan dan kualitas ruang terbuka hijau												
1.	Prosentase ruang terbuka hijau publik	NA	5,85	5,90	5,925	6	5,70	5,73	5,8	5,89	6,12	Tercapai
Sasaran 4 : Meningkatnya kualitas pelayanan persampahan												
1.	Prosentase volume sampah terangkut ke TPA	71	72	73	74	75	72,2	74	74,34	75,85	75,85	Tercapai
2.	Prosentase reduksi sampah	3,5	3,8	4,1	4,4	4,7	3,2	3,2	4,1	6,26	6,89	Tercapai
Sasaran 5 : Terkendalanya kualitas lingkungan												
1.	Indeks kualitas air	52	52,5	53	54	55	50	27,33	34,44	49,67	51,67	Tidak Tercapai
2.	Indeks kualitas udara	78	78,5	79	79,5	80	70,6	78,56	85,3	85,86	81,76	Tercapai

3.4. MISI 4 : MEWUJUDKAN BOGOR SEBAGAI KOTA YANG BERORIENTASI PADA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF

Tabel 3.4.

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Misi 4 RPJMD Kota Bogor Tahun 2015 – 2019

No	Indikator Kinerja	Target RPJMD 2015 – 2019					Capaian Indikator Kinerja 2015 - 2019					Perangkat Daerah	
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
D.	MISI 4 : MEWUJUDKAN BOGOR SEBAGAI KOTA YANG BERORIENTASI PADA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF												
	Sasaran 1 : Berkembangnya sektor kepariwisataan												
1.	Jumlah kunjungan wisatawan	4.348. 953	4.783. 848	5.262. 053	5.788. 456	6.367. 303	4.786. 023	5.310. 071	6.106. 582	7.965 .987	9.160 .885		Tercapai
	Sasaran 2 : Berkembangnya usaha masyarakat di sektor ekonomi kreatif												
2.	Jumlah wirausahawan ekonomi kreatif yang produktif	253	194	148	57	164	NA	40	148	57 (3 subs ektor)	170 (14 subs ektor - di luar kulin er)		Tercapai

3.5. MISI 5 : MEWUJUDKAN BIROKRASI PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN TRANSPARANSI

Tabel 3.5.

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Misi 5 RPJMD Kota Bogor Tahun 2015 – 2019

No	Indikator Kinerja	Target RPJMD 2015 – 2019					Capaian Indikator Kinerja 2015 - 2019					Perangkat Daerah	
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
E.	MISI 5 : MEWUJUDKAN BIROKRASI PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN TRANSPARANSI												
	Sasaran 1 : Terciptanya birokrasi pemerintah yang efektif, efisien, dan akuntabel												
1.	Penilaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	CC	CC	B	BB	A	CC	CC	B	B			
2.	Hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah	2,8	2,9	3	3,1	3,2	3,1	3,1	3,1	3,1			

No	Indikator Kinerja	Target RPJMD 2015 – 2019					Capaian Indikator Kinerja 2015 - 2019					Perangkat Daerah
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
3.	Indeks Reformasi Birokrasi	NA	NA	CC	B	BB	NA	NA	B	B	B (66,10)	Tidak Tercapai
4.	Opini BPK (Hasil pemeriksaan BPK)	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	Tercapai
5.	Level Maturitas SPIP	1	1	1	2	3	1	1	1	1	3	Tercapai
Sasaran 2 : Terciptanya birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik secara prima												
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	2,65	3,2	3,3	3,4	3,5	3,1	3,2	3,21	3,39		

3.6. MISI 6 : MENGOKOHKAN PERAN MORAL AGAMA DAN KEMANUSIAAN UNTUK MEWUJUDKAN MASYARAKAT MADANI

Tabel 3.6.

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Misi 6 RPJMD Kota Bogor Tahun 2015 – 2019

No	Indikator Kinerja	Target RPJMD 2015 – 2019					Capaian Indikator Kinerja 2015 - 2019					Perangkat Daerah
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
F.	MISI 6 : MENGOKOHKAN PERAN MORAL AGAMA DAN KEMANUSIAAN UNTUK MEWUJUDKAN MASYARAKAT MADANI											
Sasaran 1 : Meningkatnya nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat												
1.	Angka kriminalitas	<0,14 2	<0,14 3	<0,14 4	<0,14 5	<0,14 6	0,142	0,143	0,14 4	<0,14 5	<0,14 6	Tercapai
2.	Prevalensi HIV/AIDS	5	4,5	4	3,5	3	0,29	0,36	0,15	0,15	0,46	Tercapai
3.	Prosentase penurunan kasus narkoba	10	10	10	10	10	6,32	23,78	21,99	21,99		
Sasaran 2 : Meningkatnya nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan bermasyarakat												
1.	Prosentase tanggap penanganan bencana	85	87	90	95	100	100	100	100	100	100	Tercapai
Sasaran 3 : Meningkatnya nilai-nilai kebhinekaan dan keharmonisan antar umat beragama, antar suku,ras, dan golongan												
1.	Prosentase deteksi dini permasalahan intoleransi	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai

No	Indikator Kinerja	Target RPJMD 2015 – 2019					Capaian Indikator Kinerja 2015 - 2019					Perangkat Daerah	
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
2.	Prosentase pencegahan dan penanganan terjadinya konflik SARA	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai
3.	Prosentase tingkat kemudahan mendirikan tempat ibadah	80	85	90	95	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai

Tabel 4.1
Capaian Kinerja Program

Bidang Urusan Pendidikan

No	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Pada Akhir Periode Perencanaan	Target RPJMD Tahun ke					Capaian Target RPJMD Tahun ke					Evaluasi di Akhir Tahun 2019
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
1	Peningkatan Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase APK PAUD	40,87	59	55	56	57	58	59	36,6	46,56	47,03	49,06	49,06	Tidak Tercapai
		Persentase Akreditasi satuan pendidikan PAUD -PAUD formal (%)	74	79	75	76	77	78	79	48,7	49	51	100	80,4	Tercapai
		-PAUD nonformal(%)	18	23	19	20	21	22	23	20	21	22	24	26,5	Tercapai
2	Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun	Angka partisipasi kasar SD/MI/paket A	113,33	114	113,5	113,57	113,8	113,9	114	97,8	106,5	105,53	112,64	112,64	Tidak Tercapai
		Angka partisipasi kasar SMP/MTS/paketb	104,66	105	104,7	104,75	104,8	104,9	105	107,26	103,6	103,95	104,01	104,01	Tidak Tercapai
		Presentase ruang kelas SD/MI yang memadai(%)	77,31	86	79	80	82	84	86	82	82	95	99,01	99	Tercapai
		Presentase jumlah ruang kelas SMP atau mts yang memadai(%)	87,25	96	88	90	92	94	96	88	89	95,65	99,7	100	Tercapai
		Nilai rata rata ujian akhir standar nasional (USBN) SD	75,47	76	75,51	75,75	75,85	75,95	76	75,47	75,75	72,12	68,12	73,95	Tidak Tercapai
		Nilai rata rata Ujian Nasional Tingkat SMP	65	67,75	66,75	67	67,25	67,5	67,75	65	67	59,62	58,27	61,07	Tidak Tercapai
3	Peningkatan	Presentase Pendidik TK yang memiliki	45	54	47	48	49	51	59	33	35	36	38	43,39	Tidak Tercapai

No	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Pada Akhir Periode Perencanaan	Target RPJMD Tahun ke					Capaian Target RPJMD Tahun ke					Evaluasi di Akhir Tahun 2019	
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
	Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	sertifikasi kompetensi (%)														
		Presentase Pendidik SD yang memiliki sertifikasi kompetensi (%)	53	60	54	55	57	58	67	46	49	54	55	56,35	Tidak Tercapai	
		Persentase pendidik SMP yang memiliki sertifikasi kompetensi (%)	62,77	67	63	64	65	66	67	40	42	55,3	56	59,04	Tidak Tercapai	
4	Pendidikan Non Formal	Presentase jumlah kelulusan peserta didik yang mengikuti ujian kesetaraan (%)	90	100	92	94	69	98	100	100	100	100	100	100	Tercapai	
		Presentase satuan pendidikan non formal yang sudah terakreditasi(%)	60	21	17	18	19	20	21	20	21	24	28	26,5	Tercapai	
		Presentase kelulusan paket A(%)	NA	100	92	94	69	98	100	100	100	100	100	100	Tercapai	
		Presentase kelulusan paket B(%)	NA	93	89	90	61	92	93	100	100	100	100	100	Tercapai	
		Presentase kelulusan paket C (%)	NA	95	91	92	63	94	95	100	100	100	100	100	Tercapai	
5	Manajemen Layanan Pendidikan	Presentase satuan pendidikan yang terakreditasi A	58	65	59	62	63	64	65	59	60	70,26	73,5	60	Tidak Tercapai	
		Presentase guru berprestasi disemua jenjang (%)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Tercapai	
		Siswa berprestasi														
		Tingkat provinsi	45	60	56	57	58	59	60	60	46	36	37	21	70	Tercapai
		Tingkat nasional	11	16	12	13	14	15	16	16	12	10	13	18	62	Tercapai
		Tingkat internasional	14	19	15	16	17	18	19	19	15	16	7	22	34	Tercapai

No	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Pada Akhir Periode Perencanaan	Target RPJMD Tahun ke					Capaian Target RPJMD Tahun ke					Evaluasi di Akhir Tahun 2019
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
		Satuan pendidikan/lembaga yang berprestasi													
		Tingkat provinsi	2	5	2	2	3	4	5	1	1	2	3	2	Tidak Tercapai
		Tingkat nasional	1	2	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	Tidak Tercapai
		Jumlah pendidik/tutor berprestasi tingkat provinsi	1	2	1	1	1	1	2	1	2	1	2	2	Tercapai
		Jumlah lembaga kursus yang terakreditasi	NA	30	16	17	18	29	30	13	15	18	13	32	Tercapai
		Jumlah siswa yang menerima BOS kota	113.433	114.171	113.583	113.783	113.933	114.046	114	94,55	95,24	111,02	109,642	108.314	Tidak Tercapai
		Terpenuhinya dokumen evaluasi pelajar siswa disatuan pendidikan	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Tercapai
		Penurunan jumlah tawuran pelajar	7	5	12	11	7	6	5	9	7	6	2	3	Tercapai

Bidang Urusan Kesehatan

No	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Pada Akhir Periode Perencanaan	Target RPJMD Tahun ke					Capaian Target RPJMD Tahun ke					Evaluasi di Akhir Tahun 2019
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
1	Pelayanan Kesehatan	Presentase penduduk miskin yang memiliki JKN	30	100	62	66	70	90	100	65	70	88,78	95,85	94,02	Tidak Tercapai
	Penduduk Miskin	Presentase cakupan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan masyarakat miskin	100	100	100	100	100	100	100	100	100	73,63	79,5	100	Tercapai
		Presentase kunjungan dokter paada keluarga pra sejahtera (home visite)	NA	85	81	82	83	84	85	64,5	91,8	90	93	84	Tidak Tercapai
2	Peningkatan Kesehatan Ibu Dan Anak	Prosentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan ibu bersalin sesuai standar	92	94	92	92,5	93	93,5	94	92,8	93,3	92,1	96,05	99,1	Tercapai
		Prosentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	100	100	100	100	100	100	100	99,1	99,6	99,4	100	100	Tercapai
3	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Prosentase anak balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (kunjungan balita)(%)	90,3	95	91	92	93	94	95	91	95,8	93,9	90	93,6	Tidak Tercapai
4	Upaya Kesehatan Masyarakat	Prosentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	96	97,5	96	96	96,5	97	97,5	97,8	96,1	99,57	100	100	Tercapai
		Persentase kunjungan rawat jalan gigi dalam wilayah puskesmas yang	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai

No	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Pada Akhir Periode Perencanaan	Target RPJMD Tahun ke					Capaian Target RPJMD Tahun ke					Evaluasi di Akhir Tahun 2019	
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
		tertangani(%)														
		Persentase pemeriksaan laboratorium dipuskesmas(%)	10	20	13	15	18	20	20	13	15	18	20	20	Tercapai	
		Persentase calon jamaah haji yang memenuhi syarat kesehatan (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai	
		Persentase kelompok olahraga yang dibuat	69	83	72	75	78	80	83	72	75	78	80	80,08	Tercapai	
		Persentase kasus KTA yang di tangani (%)	11	23	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai	
		Jumlah penjarangan gangguan refraksi pada anak sekolah(%)	20	100	40	50	60	70	80	40	50	60	70	90	Tercapai	
		Persentase keluarga mandiri (%)	81,8	92	83	85	87	90	92	83	85	80	90	92	Tercapai	
		Persentase pengobat tradisional yang memenuhi syarat (%)	20	75	50	60	65	70	75	50	60	64	70	75	Tercapai	
5	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Persentase posbindu yang dibina (%)	85	93	87	89	90	92	93	87	89	76,3	100	100	Tercapai	
		Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	100	100	100	100	100	100	100	100	41,8	52,7	76,3	100	100	Tercapai
		Persentase pelayanan kesehatan lansia yang sesuai standar	30	100	44	58	72	86	100	100	41,8	52,7	76,3	100	100	Tercapai
		Presentase puskesmas ramah lansia (%)	35	60	40	45	50	55	60	60	100	100	100	100	100	Tercapai
6	Perbaikan Gizi Masyarakat	Persentase balita gizi buruk	0,47	0,15	0,37	0,3	0,25	0,2	0,15	0,35	0,6	0,07	0,07	0,07	Tercapai	
		Persentase balita gizi kurang	8	6	8	7,5	7	6,5	6	6	8	5	5,27	4,11	2,46	Tercapai

No	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Pada Akhir Periode Perencanaan	Target RPJMD Tahun ke					Capaian Target RPJMD Tahun ke					Evaluasi di Akhir Tahun 2019
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
		Persentase balita pendek (%)	2,48	2	2,37	2,28	2,2	2	2	9,3	5,9	1,22	0,9	3,84	Tidak Tercapai
		Persentase cakupan ASI eksklusif (%)	76,4	90	70	75	80	85	90	77	49,5	50,7	49,95	72,72	Tidak Tercapai
		Persentase cakupan balita gizi buruk yang mendapat pelayanan kesehatan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai
		Persentase Balita mendapat kapsul Vitamin A (%)	90,41	95	91	92	93	94	95	91	94,9	97,2	93,5	95,26	Tercapai
		Persentase Balita yang ditimbang (%)	70	100	80	85	90	95	100	80	93,4	88,25	77,6	78,54	Tidak Tercapai
		Persentase remaja putri mendapat Fe (%)	0	35	15	20	25	30	35	15	11,7	17,07	24,77	30,68	Tidak Tercapai
		Persentase Ibu hamil KEK (%)	7	4	5,7	5	4,5	4	4	19	3,9	5,67	3,99	6,8	Tidak Tercapai
7	Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular	Persentase angka kesembuhan TBC (cure rate) (%)	84	86	85	85	86	86	86	85	86	85,6	81,22	83	Tidak Tercapai
		Menurunnya angka kesakitan (IR) akibat DBD (per 100,000 penduduk)	75	45	60	55	50	47	45	101	112	78	66	57	Tidak Tercapai
		Persentase lokasi bebas jentik nyamuk DBD (%)	93,5	95,4	95	95,1	95,2	95,3	95,4	94	91,79	92,1	93	91,6	Tidak Tercapai
		Persentase penderita DBD yang ditangani (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai
		Persentase pelayanan kesehatan dengan orang TBC	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	115	Tercapai
		Persentase penemuan kasus baru BTA positif TBC (CDR) (%)	91,4	92	91,52	91,64	91,76	91,88	92	91,52	107	108,3	115	114	Tercapai

No	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Pada Akhir Periode Perencanaan	Target RPJMD Tahun ke					Capaian Target RPJMD Tahun ke					Evaluasi di Akhir Tahun 2019
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
		Persentase angka konversi TBC (%)	82	87	83	84	85	86	87	83	86	84	79,6	83	Tidak Tercapai
		Persentase keberhasilan pengobatan TBC (success rate)	91	90	86	87	88	89	90	85	86	86,3	89,3	84	Tidak Tercapai
		Prevalensi hiv/aids	<5	3	<5	4,5	4	3,5	3	0,29	0,36	0,15	0,42	0,46	Tercapai
		Persentase penemuan diare balita (%)	96,7	95	91	92	93	94	95	96,8	115,8	113,6	109	110,7	Tercapai
		Persentase penemuan kasus pneumonia Balita(%)	78,6	100	80	85	90	95	100	80	76,8	63,02	100	63,33	Tidak Tercapai
		Presentase cakupan imunisasi dasar lengkap pada bayi	80	85	21	82	83	84	85	81	87	94,2	94,8	95,8	Tercapai
		Persentase desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai
		Persentase pengetahuan Komprehensif HIV AIDS Usia 15-24 tahun(%)	68,4	95	70	75	80	85	95	70	84,56	75	76	83,3	Tidak Tercapai
		Persentase konseling teshiv (VCT/PITC)(%)	6,6	30	10	15	20	25	30	10	48,7	13,4	15,07	30,48	Tercapai
		Persentase ODHA yang mendapat ART(%)	45,4	85	65	70	75	80	85	65	48,91	18,4	21,9	23,4	Tidak Tercapai
8	Pencegahan Dan	Prevalensi hipertensi	25,8	23,38	25,28	24,77	24,28	23,79	23,38	1,18	3,91	4,25	4,4	4,55	Tercapai
		Prevalensi diabetes militus	6,9	4,4	6,3	5,9	5,3	4,8	4,4	0,25	0,89	0,81	1,3	1,54	Tercapai

No	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Pada Akhir Periode Perencanaan	Target RPJMD Tahun ke					Capaian Target RPJMD Tahun ke					Evaluasi di Akhir Tahun 2019
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	Pengendalian Penyakit Tidak Menular	Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan penyakit tidak menular Terintegrasi	60	100	70	80	90	95	100	70	90	100	100	100	Tercapai
		Persentase posbindu yang melaksanakan pelayanan penyakit tidak menular terintegrasi	25	55	35	40	45	50	55	35	40	89,28	89,28	89,28	Tercapai
		Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	80	100	85	90	95	100	100	90	95	100	100	100	Tercapai
9	Pengadaan, Peningkatan Dan Perbaikan Sarana Dan Prasarana Puskesmas/Pu skesmas Pembantu Dan Jaringannya	Rasio puskesmas per 30,000 penduduk	1 : 41.667	1 : 30.000	1 : 41.667	1 : 39.334	1 : 37.000	1 : 34.667	1 : 30.000	1 : 43.663	1 : 44.362	1 : 40.423	1 : 43.873	1:43.87 3	Tidak Tercapai
		Persentase puskesmas/pustu terbangun	86	100	86,9	90,2	93,4	96,7	100	100	100	140	140	96,7	Tidak Tercapai
		Persentase puskesmas dengan perawatan	50	100	50	67	84	100	100	100	100	82,3	82,3	100	Tercapai
		Persentase puskesmas dengan SIMPUS/SIR	0	100	4,2	25	64	80	100	4,2	25	64	88	96	Tidak Tercapai
10	Standarisasi Pelayanan	Persentase sarana kesehatan Dasar milik pemerintah yang terakreditasi nasional	0	100	0	16,7	48	72	100	0	0	48	68	68	Tidak Tercapai

No	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Pada Akhir Periode Perencanaan	Target RPJMD Tahun ke					Capaian Target RPJMD Tahun ke					Evaluasi di Akhir Tahun 2019
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	Kesehatan	Jumlah puskesmas dengan sistem pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	0	12	4	4	8	8	12	20 (masih dalam proses kajian)	4 (masih dalam proses kajian)	0	0	0	Tidak Tercapai
		Persentase sarana kesehatan swasta yang terakreditasi	65	90	75	80	85	90	90	60,56	12,5	88,89	78	95	Tercapai
11	Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Institusi yang Menerapkan 100% KTR(%)	22,49	75	45	50	55	60	75	45	50	55	72,6	73,8	Tidak Tercapai
		Persentase Rumah Tangga ber-PHBS(%)	61,7	72	63	65	67	70	72	63,4	65	64,2	65,5	65,8	Tidak Tercapai
		Persentase RW Siaga(%)	34,8	82,5	34,8	35	35	40	45	35	33,71	35,1	35,6	57,48	Tidak Tercapai
		Persentase posyandu purnama mandiri(%)	55	75	55	60	65	70	75	60,3	60,16	65,5	86,65	89,27	Tercapai
12	Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase akses jamban keluarga(%)	79,3	82,5	80,5	81	81,5	82	82,5	70	42,6	68	72,7	74,21	Tidak Tercapai
		Persentase akses SPAL yang memenuhi syarat(%)	27,6	31,5	29,5	30	30,5	31	31,5	29,5	29,03	50	28,51	29,62	Tidak Tercapai
		Persentase Rumah sehat(%)	79,5	82,5	80,25	81	81,75	82,5	82,5	70,2	79,4	82	80,5	79,53	Tidak Tercapai
		Persentase akses pengelolaan sampah(%)	66,9	70,5	68,7	68,8	70	70,2	70,5	68,7	72,21	61,7	61,81	80,9	Tercapai
		Persentase kelurahan STBM(%)		90	40	60	70	80	90	40	60	70	80	100	Tercapai
		Persentase air minum yang memenuhi	75	93	89	90	91	92	93	89	88,4	98,6	100	98,8	Tercapai

No	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Pada Akhir Periode Perencanaan	Target RPJMD Tahun ke					Capaian Target RPJMD Tahun ke					Evaluasi di Akhir Tahun 2019
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
13		syarat(%)													
		Persentase akses minum(%)	87,4	100	89	92	95	98	100	89	88,4	98,6	98,65	98,65	Tidak Tercapai
		Persentase POS upaya kesehatan kerja (UKK) yang dibina	60	100	70	80	90	100	100	70	42,8	28	100	100	Tercapai
		Persentase TTU yang memenuhi syarat	54	64	56	58	60	62	64	65	67	69,2	72,45	64,47	Tercapai
		Persentase TPM yang memenuhi syarat	58	68	60	62	64	66	68	56,24	75,9	66,95	66,96	59,72	Tidak Tercapai
	Pengawasan Obat Dan Makanan	Persentase jenis obat dengan tingkat kesiediaan minimal 18 bulan(%)	97	100	100	100	100	100	100	100	98,9	100	99,3	98,6	Tidak Tercapai
		Persentase produk makanan dan farmasi yang diuji memenuhi syarat kesehatan(%)	90	100	95	98	99	100	100	74	94,6	72,2	74	88,9	Tidak Tercapai
		Persentase sarana industri rumah tangga pangan(IRTP) yang di bina dan memenuhi syarat kesehatan(%)	90	95	95	95	95	95	95	95	90,66	86,25	90,86	74,85	Tidak Tercapai
	14	Manajemen Kesehatan	Persentase puskesmas yang minimal memiliki 10 jenis jabatan fungsional tertentu		95	70	76	85	90	95	100	100	100	100	56
Persentase puskesmas yang minimal memiliki 7 jenis jabatan pelaksana				95	40	45	75	90	95	NA	NA	NA	NA	90	Tidak Tercapai
Persentase rekrutment tenaga kesehatan sesuai standar dan kompetensi				95	40	45	75	90	95	NA	NA	75	100	80	Tidak Tercapai

No	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Pada Akhir Periode Perencanaan	Target RPJMD Tahun ke					Capaian Target RPJMD Tahun ke					Evaluasi di Akhir Tahun 2019
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
		Proses tenaga kesehatan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai kompetensi		95	40	45	75	90	95	NA	NA	75	100	90	Tidak Tercapai
		Jumlah tenaga kesehatan dan sertifikasi terintegrasi		95	40	45	75	90	95	NA	NA	80	100	90	Tidak Tercapai

Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Pada Akhir Periode Perencanaan	Target RPJMD Tahun ke					Capaian Target RPJMD Tahun ke					Evaluasi di Akhir Tahun 2019
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
1	Pembangunan Jalan Dan Jembatan	Jumlah panjang ruas jalan utama (arteri,kolektor,&lokal) terbangun sesuai arahan RTRW 2011-2031(km)	266,468	272.018	266,818	2701,418	270.418	271,418	272,018	266.868	270.122	270.245	270.245	270.245	Tidak Tercapai
		Jumlah simpang yang meningkat kapasitasnya	0	4	0	0	0	2	4	0	1	1	1	1	Tidak Tercapai
		Jumlah panjang ruas jalan yang di lebarkan/ditingkatkan kapasitasnya (km)	0	5,74	0	0	1,8	3,4	5,74	3,148	5,986	6,914	7,381	7,380	Tercapai
2	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan	Jumlah panjang ruas jalan yang ditingkatkan strukturnya/kelasnya (km)	48,587	58,9	50,587	51,857	54,857	56,857	58,587	53,824	58,425	63,535	70,926	80,787	Tercapai
		Persentase panjang jalan berkondisi mantap(baik&sedang)(%)	86	88,5	86,5	87	87,5	88	88,5	87,6	88,15	88,32	88,59	88,79	Tercapai
3	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong Gorong	Penurunan jumlah lokasi rawan genangan	16	4	16	12	9	6	4	17	19	27	27	2	Tidak Tercapai
4	Pembangunan Prasarana Pedestrian Dan Pesepeda	Panjang prasarana pedestrian yang meningkat kapasitasnya (pelebaran prasarana	0,545	24.813	5.399	10,253	15,107	19,961	24,813	6,758	10,841	14,683	16,012	17,878	Tidak Tercapai

No	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Pada Akhir Periode Perencanaan	Target RPJMD Tahun ke					Capaian Target RPJMD Tahun ke					Evaluasi di Akhir Tahun 2019
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
		pedestrian)(km)													
		Panjang prasarana pedestrian jalan utama terbangun (km)	249,402	271,062	250,62	255,292	260,762	266,592	271,062	252,334	257,468	258,307	259,288	260,541	Tidak Tercapai
		Jalur sepeda yang di kembangkan (koridor)	0	3	0	1	2	2	3	0	1	1	2	2	Tidak Tercapai
		Rasio sarana dan prasarana terhadap beban layan(%)	65	90	70	75	80	85	90	70	75	75	80	80	Tidak Tercapai
5	Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi,Rawa,Dan Jaringan Pengairan Lainnya	Panjang saluran irigasi berkondisi baik (km)	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	Tercapai
6	Pengembangan,Pengelolaan,Dan Konservasi Sungai,Danau Dan Sumber Daya Air Lainnya	Panjang sungai berkondisi baik(KM)	174,54	184,54	176,54	178,54	180,54	182,54	184,54	180.245	183.965	189.040	193.086	197.192	Tercapai
		Panjang sungai yang di tingkatkan kapasitasnya (km)	0	5	0	2	3	4	5	0	0	0	0	0	Tidak Tercapai
		Jumlah situ/danau/kolam retensi berkondisi baik	5	7	5	6	6	7	7	3	5	6	5	0	Tidak Tercapai
7	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah	Prosentase cakupan penduduk yang memiliki akses/ terlayani sistem jaringan dan	66,4	67,58	66,6	66,8	67	67,26	67,58	NA	66,8	72,1	67,21	69,02	Tercapai

No	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Pada Akhir Periode Perencanaan	Target RPJMD Tahun ke					Capaian Target RPJMD Tahun ke					Evaluasi di Akhir Tahun 2019
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
		pengolahan air limbah skala komunitas/kawasan/kota													
		Prosentase cakupan layanan air bersih non PDAM(%)	NA	1,65	1,07	1,07	1,37	1,46	1,65	NA	1,07	1,82	0,54	0,85	Tidak Tercapai
		Jumlah penduduk berakses air minum bersih (nonpdam)(intervensipertahun) (SR)	NA	4179	2679	2679	3,179	3,679	4,179	NA	2,679	2,746	2,746	2,746	Tidak Tercapai
		Prosentase rumah tangga berakses air minum bersih(PDAM)	NA	97,3	82	85,85	88,75	93,16	97,3	82	85,85	90,55	91,44	92,58	Tidak Tercapai
8	Perencanaan Tata Ruang	Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan tata ruang		100	20	40	80	75	100	20	40	50	50	5	Tidak Tercapai
9	Pengaturan,Pembinaan,Pe ngawasan Jasa Konstruksi	Presentase penyediaan konstruksi yang mendapat pembinaan teknis	NA	90	50	60	70	80	90	50	60	70	80	100	Tercapai

No	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Pada Akhir Periode Perencanaan	Target RPJMD Tahun ke					Capaian Target RPJMD Tahun ke					Evaluasi di Akhir Tahun 2019	
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
10	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang	Rasio keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang		4,2083333	1 : 10.000	1 : 9000	1 : 8000	1 : 7000	1 : 6000	-	-	-	1 : 7000	1:6000	Tercapai	
11	Lingkungan Sehat Perumahan	Panjang jalan lingkungan berkondisi baik (n2)	548,153	1.048.153	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	NA	264.239	316.342	503.344	580.303	Tercapai	
		Panjang saluran pembuangan air hujan perumahan berkondisi baik (n2)	767.400	867.400	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	NA	67.891	87.781	137.446	152.221	Tercapai	
		Jumlah jembatan jalan lingkungan yang terbangun(unit)	17	47	6	6	6	6	6	6	NA	15	26	40	52	Tercapai
		Jumlah lokasi rawan longsor yang di bangun tptnya (lokasi)	NA	600	120	120	120	120	120	120	NA	330	469	745	844	Tercapai
12	Pemanfaatan Ruang	Prosentase kecapaian target indikasi program rencana tata ruang		100	20	40	60	80	100	20	40	60	80	0	Tidak Tercapai	

Bidang Urusan RSUD

No	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Pada Akhir Periode Perencanaan	Target RPJMD Tahun ke					Capaian Target RPJMD Tahun ke					Evaluasi di Akhir Tahun 2019
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
1	Pelayanan Kesehatan	Presentase tempat tidur kelas III RSUD (%)	0	50	40	43	45	47	50	43,7	71,5	68,81	-	61,32	Tercapai
	Penduduk Miskin	BOR kelas III RSUD	NA	87	75	80	83	85	87	75	83,78	85	85,29	75	Tidak Tercapai
		Persentase masyarakat miskin yang terlayani di RSUD kota Bogor	NA	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Pengadaan Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit	Persentase pemakaian tempat tidur (BOR) di RSUD(%)	50	85	73,55	75	77	80	85	73,5	85,7	87	81,05	74	Tidak Tercapai
		Persentase sarana prasarana (fisik dan alkes) sesuai standar RS kelas B dan IPTEK	NA	75	45	57,5	65	70	75	45	64,3	76	75,5	72,9	Tidak Tercapai
3	Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase pelayanan minimal RSUD Kota Bogor	NA	75	NA	NA	70	72	75	NA	NA	81,8	91,4	90,7	Tercapai
4	Pengembangan Layanan Unggulan	Peningkatan pelayanan pasien kanker,jantung,dan gagal ginjal	NA	53.000	26,841	37,452	44.200	48.700	53.000	26841	37452	47310	73419	37.604	Tidak Tercapai

Bidang Urusan : Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

No	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Pada Akhir Periode Perencanaan	Target RPJMD Tahun ke					Capaian Target RPJMD Tahun ke					Evaluasi di Akhir Tahun 2019
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
1	Lingkungan Sehat Perumahan	Pengurangan kawasan kumuh dari kumuh sedang ke kumuh ringan dalam hal infrastruktur	0	17	3	6	9	14	17	10	4	16	16	17	Tercapai
		Prosentase peningkatan jumlah hunian Rusunawa/Rusunami(%)	60	98	60	60	69	89	98	89,96	92,5	44,84	76,61	77,63	Tidak Tercapai
		Prosentase cakupan ketersediaan rumah layak huni	71,5	85,5	74,3	77,1	79,9	82,7	85,5	99,06	98,114	78,4	70,59	73,20	Tidak Tercapai
2	Pengelolaan Areal Pemakaman	Luas TPU yang terkelola dengan baik(Ha)	46	46,25	46,05	46,1	46,15	46,2	46,25	46,05	46,1	46,15	46,2	46,25	Tercapai
		Prosentase pelayanan penguburan dan ambulance (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Peningkatan Utilitas Perkotaan	Prosentase luas kawasan pemukiman yang sudah dilayani PJU	69	74	70	71	72	73	74	70	71	72	73,65	87,15	Tercapai
4	Penataan Dan Pengaturan Bangunan Dan Gedung	Prosentase pelayanan penyelenggaraan bangunan gedung pada tahun tersebut	NA	90	90	90	90	90	90	100	100	100	99,32	100	Tercapai
5	Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Prosentase kesesuaian antara IMB dengan bangunan di lapangan (%)	90	98	90	92	94	96	98	96,94	98,47	98,9	99,74	99,40	Tidak Tercapai

No	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Pada Akhir Periode Perencanaan	Target RPJMD Tahun ke					Capaian Target RPJMD Tahun ke					Evaluasi di Akhir Tahun 2019
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
		Prosentase pencegahan jumlah bangunan baru tidak berizin (%)	70	80	72	74	76	78	80	77,86	88,83	88,83	82,32	72,80	Tidak Tercapai
		Tindak lanjut atas pengaduan tata ruang(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai
6	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang	Rasio keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan,pemanfaatan dan pengendalian ruang		1:6000	1 : 10.000	1 : 9000	1 : 8000	1 : 7000	1 : 6000	-	-	-	-	1:6000	Tercapai
7	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (Rth)	Luas taman, jalur hijau, dan furniture hijau kota lainnya yang dibangun (HA)	39,69	43	0,81	0,22	0,4	0,93	0,93	0,84	0,22	0,39	0,73	1,62	Tercapai
		Luas taman, jalur hijau, dan furniture hijau kota lainnya yang dipelihara dan di tingkatkan kualitasnya (HA)	39,69	42,08	39,69	40,53	40,75	41,15	42,08	40,16	40,38	40,75	41,15	43,48	Tercapai
8	Penataan Prasarana Sarana Umum Perumahan	Prosentase PSU yang di serahkan pengembang	NA	50	NA	50	50	50	50	NA	NA	0	33	0	Tidak Tercapai
9	Perencanaan Pembangunan Sarana Prasarana	Tingkat penyusunan dokumen perencanaan pembangunan saran prasarana		100	20	40	60	80	100	40	60	60	100	100	Tercapai

Bidang Urusan : Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat

No	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Pada Akhir Periode Perencanaan	Target RPJMD Tahun ke					Capaian Target RPJMD Tahun ke					Evaluasi di Akhir Tahun 2019
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
1	Pemeliharaan Kamtibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal	Persentase penegakan perda KTR	70	80	72	74	78	80	80	85	90	90	90	93	Tercapai
		Persentase bangunan melanggar yang di tertibkan	0	98	90	92	96	98	98	98	98	98	98	95	Tidak Tercapai
		Tingkat penegakan Perda ketertiban umum	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai
2	Peningkatan Keiagaan Dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Tingkat waktu tanggap (Response time)	75	95	78	80	85	90	95	95	95	95	95	75	Tidak Tercapai

Badan Penanggulangan Bencana daerah

No	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Pada Akhir Periode Perencanaan	Target RPJMD Tahun ke					Capaian Target RPJMD Tahun ke					Evaluasi di Akhir Tahun 2019	
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
1	Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Jumlah kelurahan tangguh bencana	0	8	-	2	2	2	2	2	NA	2	4	5	5	Tercapai
		Jumlah kelompok masyarakat (stakeholders kebencanaan) yang memperoleh pengetahuan dan keterampilan kebencanaan	0	23	0	9	4	5	5	5	NA	9	4	5	7	Tercapai
2	Tanggap Darurat Bencana	Tingkat penanganan kejadian bencana	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai
3	Pemulihan Pasca Bencana	Prosentase pelaksanaan kegiatan non fisik yang mendukung pemulihan pasca bencana	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai
4	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penanggulangan Bencana	Tingkat penguatan kelembagaan	0	100	80	90	-	-	100	80	90	90	100	100	100	Tercapai

Kantor Kesbangpol

No	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Pada Akhir Periode Perencanaan	Target RPJMD Tahun ke					Capaian Target RPJMD Tahun ke					Evaluasi di Akhir Tahun	
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
1	Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Frekuensi dialog lintas agama (minimal 1x sebulan)	NA	>12	>12	>12	>12	>12	>12	>12	>12	>12	>12	>12	Tercapai	
		Prosentase deteksi permasalahan intoleransi yang tertangani	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai
		Prosentase tingkat kemudahan mendirikan tempat ibadah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	Tercapai
		Prosentase pembinaan terhadap aperatur dan masyarakat	NA	0,25	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,25	0,5	0,5	0,5	0,5		
		Jumlah pelanggaran norma agama	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tercapai
		Jumlah konflik SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tercapai
		Prosentase pembinaan terhadap LSM dan ormas	NA	50	10	10	10	10	10	0	10	10	10	10	10	Tercapai
2	Pendidikan Politik Masyarakat	Tingkat partisipasi dalam pemilu kota (%)	75	78	0	0	0	78	0	0	0	0	75,85	Tidak ada Pemilu	-	
		Tingkat partisipasi dalam pemilu provinsi (%)	66	70	0	0	0	0	70	0	0	0	75	Tidak ada Pemilu	-	
		Tingkat partisipasi dalam pemilu nasional(%)	75	78	0	0	0	0	78	0	0	0	0	83,87	Tercapai	

No	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Pada Akhir Periode Perencanaan	Target RPJMD Tahun ke					Capaian Target RPJMD Tahun ke					Evaluasi di Akhir Tahun
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
3	Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan	Angka kriminalitas	0,142	<0,146	<0,142	<0,143	<0,144	<0,145	<0,146	NA	0,00049	0,00051	0,00048	0,00047	Tercapai

Bidang Urusan : Sosial

No	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Pada Akhir Periode Perencanaan	Target RPJMD Tahun ke					Capaian Target RPJMD Tahun ke					Evaluasi di Akhir Tahun 2019
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
1	Pemberdayaan Fakir Miskin, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya	Persentase jumlah fakir miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang direhab dan berdaya	43	63	55	57	59	61	63	43,1	44,39	72,7	91,42	75,32	Tercapai
		Prosentase jumlah anjal Gepeng dan PSK yang berdaya	63	75	63	69	71	73	75	103,87	202,29	70,33	18,8	63,79	Tidak Tercapai
		Persentase korban bencana yang mendapatkan bantuan non fisik	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Pembinaan Panti Asuhan/Jompo	Presentase panti asuhan/yayasan yang terbina (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	93,98	100	Tercapai
3	Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, Pak, Narkoba Dan Penyakit Sosial Lainnya)	Persentase jumlah eks penyandang penyakit sosial yang dibina (%)	30	67	30	61	63	65	67	29,9	60,75	108,21	19	22,72	Tidak Tercapai
4	Pembinaan Anak	Prosentase jumlah anak	13	41	13	32	35	38	41	13,22	32,25	21,22	2,08	36,70	Tidak

No	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Pada Akhir Periode Perencanaan	Target RPJMD Tahun ke					Capaian Target RPJMD Tahun ke					Evaluasi di Akhir Tahun 2019
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	Terlantar	terlantar / anak jalanan yang di bina													Tercapai
5	Pembinaan Para Penyandang Cacat Dan Trauma	Prosentase penyandang cacat trauma yang dibina	4	12	4	6	8	10	12	3,96	5,66	2,96	8,25	17,52	Tercapai
6	Pembedayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Prosentase jumlah lembaga kesejahteraan sosial sosial yang dibina	100	100	100	100	100	100	100	-	-	35,51	41,74	100	Tercapai
		Jumlah makam pahlawan yang terpelihara/terawat	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060	1060	1060	1060	1061	1061	Tercapai
		Jumlah PSKS yang terbina		267	251	261	263	265	267	243	228	228	268	302	Tercapai
		Jumlah PSKS yang menerima bantuan	6	18	10	12	14	16	18	10	1	1	3	5	Tidak Tercapai
7	Pemberdayaan Fakir Miskin, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya	Jumlah pengurusan/pemulasaraan mayat telantar	24	48	24	30	42	48	48	-	-	-	-	-	Menjadi Tusi Kecamatan

Bidang Urusan : Pemberdayaan Masyarakat Desa

No	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Pada Akhir Periode Perencanaan	Target RPJMD Tahun ke					Capaian Target RPJMD Tahun ke					Evaluasi di Akhir Tahun
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
1	Pengembangan Lembaga Ekonomi Kelurahan	Jumlah pelaku usaha yang mampu menggunakan teknologi tepat guna (orang)	240	540	300	360	420	480	540	300	360	420	480	807	Tercapai
		Persentase KK miskin yang meningkat pendapatannya (%)	65	90	70	75	80	90	90	70	75	80	90	90	Tercapai
		Jumlah pengurus UEK SP yang mendapat pelatihan	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204	-	UEK SP sudah berbadan hukum menjadi koperasi
		Jumlah penerima KUBE Gakin	2.762	2.887	2.787	2.812	2.837	2.862	2.887	2.787	2.812	2.837	2.862	-	KUBE Gakin sudah berbadan hukum
		Jumlah santri yang mendapat pelatihan usaha ekonomi syariah	400	900	500	600	700	800	900	500	600	700	800	920	Tercapai
2	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan	Persentase keswadayaan masyarakat dalam pembangunan	0,7	0,76	0,72	0,73	0,74	0,75	0,76	0,72	0,73	0,74	0,75	0,76	Tercapai

No	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Pada Akhir Periode Perencanaan	Target RPJMD Tahun ke					Capaian Target RPJMD Tahun ke					Evaluasi di Akhir Tahun
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
		Masyarakat dan kelompok binaan yang mengikuti Lomba kelurahan (orang)	150	650	250	350	450	550	650	250	350	450	550	650	Tercapai
		Persentase partisipasi masyarakat	80	90	80	85	85	90	90	85	90	90	95	90	Tercapai
		Persentase pemutakhiran data profil kelurahan	80	90	80	85	85	87	90	80	85	85	90	90	Tercapai

Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Pada Akhir Periode Perencanaan	Target RPJMD Tahun ke					Capaian Target RPJMD Tahun ke					Evaluasi di Akhir Tahun 2019
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
1	Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terselesaikan (%)	65	75	67	69	71	73	75	70	85	75	75	70	Tidak Tercapai
2	Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	Jumlah perempuan yang memperoleh pendidikan politik (orang)	500	750	550	600	650	700	750	550	600	650	700	750	Tercapai
		Persentase kepala keluarga perempuan yang di bina (%)	NA	45	25	30	35	40	45	30	30	50	40	45	Tercapai
		Persentase posyandu berstrata mandiri	NA	45	25	30	30	40	45	13	19	22,37	47,74	48,25	Tercapai
		Jumlah perempuan yang berperan aktif di tiap kelurahan dalam kegiatan P2WKSS (KK)	500	1000	600	700	800	900	1.000	600	700	800	900	1.000	Tercapai
3	Penguatan Kelembagaan Pengarutamaan Gender Dan Anak	Jumlah instansi terkait yang memahami perlindungan dan hak-hak anak	10	20	12	14	16	18	20	12	14	16	18	27	Tercapai
		Persentase perempuan berpolitik(%)	NA	15	5	7	10	12	15	17,8	17,8	17,8	17,8	22	Tercapai

No	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Pada Akhir Periode Perencanaan	Target RPJMD Tahun ke					Capaian Target RPJMD Tahun ke					Evaluasi di Akhir Tahun 2019	
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
		Jumlah aparatur pimpinan wilayah yang memahami perlindungan dan hak-hak anak	74	74	74	74	74	74	74	74	0	74	74	74	74	Tercapai
		Jumlah orang tua yang memahami perlindungan dan hak-hak anak	0	238	68	136	170	204	238	238	68	136	170	204	238	Tercapai
		Jumlah anak yang memahami perlindungan dan hak hak anak	100	272	136	170	204	238	272	272	136	170	204	238	272	Tercapai
		Jumlah satuan pendidikan yang memahami perlindungan dan hak-hak anak	0	36	12	18	24	30	36	36	12	18	24	30	36	Tercapai
		Jumlah peserta pelatihan perencanaan penganggaran dan resnponsif gender (PPRG)	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	35	30	30	Tercapai
4	Peningkatan Peran Perempuan Di Kelurahan	Jumlah anggota organisasi perempuan yang berperan	150	650	250	350	450	550	650	650	250	350	450	550	650	Tercapai

No	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Pada Akhir Periode Perencanaan	Target RPJMD Tahun ke					Capaian Target RPJMD Tahun ke					Evaluasi di Akhir Tahun 2019
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
		aktif terhadap perlindungan hak-hak perempuan dan anak (orang)													
		Jumlah lingkungan ramah anak (LRA)	74	104	80	86	92	98	104	80	86	72	78	84	Tidak Tercapai

Bidang Urusan : Ketenagakerjaan

No	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Pada Akhir Periode Perencanaan	Target RPJMD Tahun ke					Capaian Target RPJMD Tahun ke					Evaluasi di Akhir Tahun 2019
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
1	Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Presentase peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja(%)	67,41	67,22	63,08	64,34	64,62	65,9	67,22	55.10	64.79	64.79	63,91	89,48	Tercapai
2	Perlindungan Dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Jumlah pekerja anak	100	100	100	100	100	100	100	25	25	Balai Pengawasan Provinsi			-
		Jumlah angka kecelakaan kerja	344	289	333	322	311	300	289	247	-	Balai Pengawasan Provinsi			-
3	Peningkatan Kesempatan Perluasan Kerja Dan Transmigrasi	Jumlah penyerapan tenaga kerja	1.308	1.514	1,347	1387	1,482	1.470	1.514	2033	1309	2781	2189	2.590	Tercapai
		Persentase pencari kerja terserap dipasar kerja (%)	7,88	16,86	8,96	9,19	10,89	11,59	14,63	7.90	8.89	10.25	53.86	58,75	Tercapai
		Jumlah wirausaha baru	128	944	253	194	148	57	164	0	0	487	103	141	Tercapai
		Prementase pencari kerja yang dilatih di BLK yang terserap di pasar kerja	26	29	27	27	28	28	39te	21	36	21	152	81,08	Tercapai
4	Pembinaan Hubungan Industri Dan Lembaga Ketenagakerjaan	Penetapan besaran UMK	2.493.941	3.852.048	2.634.632	3.022.365	3.272.143	3.550.275	3.852.048	2.658.155	3.022.765	3.557.150	3.842.790	4.169.806	Tercapai

Bidang Urusan : Transmigrasi

No	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Pada Akhir Periode Perencanaan	Target RPJMD Tahun ke					Capaian Target RPJMD Tahun ke					Evaluasi di Akhir Tahun 2019
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
1	Pembinaan Dan Penempatan Transmigrasi	Jumlah KK transmigrasi yang mengikuti transmigrasi (KK)	34	2	3	2	2	2	2	2	0	0	0	5	Tercapai

Bidang Urusan : Ketahanan Pangan

No	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Pada Akhir Periode Perencanaan	Target RPJMD Tahun ke					Capaian Target RPJMD Tahun ke					Evaluasi di Akhir Tahun 2019	
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
1	Peningkatan Ketahanan Pangan	Ketersediaan energi per kapita (AKE= 2,200 kkal/hr)	2.318	2.220	2.298	2.278	2.259	2.239	2.220	2318	2394,6	2482,7	2512,8	2592,9	Tercapai	
		Ketersediaan protein per kapita (AKP= 57 gr/kap/hari)	91,1	57	84,28	77,46	70,46	63,82	57	91,1	102,3	105,3	89,4	110,30	Tercapai	
		Prosentase tertanganinya penduduk rawan pangan	27,29	22,29	26,29	25,29	24,29	23,29	22,29	-	-	24,79	18,30	12,31	Tercapai	
		Ketersediaan data informasi pasokan dan harga pangan daerah (beras, kacang, daging, minyak goreng, tepung, gula, ubi, cabe, dan jagung)	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	Tercapai
		Penguatan cadangan pangan CPP kab/kota 100 ton	-	91,19	57,59	65,69	74,09	82,69	91,19	4,46	0	2	5,4	8,18	Tidak Tercapai	

No	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Pada Akhir Periode Perencanaan	Target RPJMD Tahun ke					Capaian Target RPJMD Tahun ke					Evaluasi di Akhir Tahun 2019
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
		Konsumsi energi per kapita (AKE= 2,000 kkal/hr)	1.797	1.966	1.831	1.864	1.898	1.932	1.966	2087	2019	2013,4	1.809	2.080	Tercapai
		Prosentase konsumsi protein per kapita (AKP= 52 gr/kap/hr)	53,3	52	53,04	52,78	52,52	52,26	52	59,3	56,8	63,6	50,8	60,30	Tercapai
		Skor PPH konsumsi	82,6	97,1	85,5	88,4	91,3	94,2	97,1	82,3	78,3	82,7	88,7	83,70	Tidak Tercapai
		Prosentase tingkat keamanan pangan		95	75	80	85	90	95	94,62	86,37	87,1	91,53	93,96	Tidak Tercapai

Bidang Urusan : Lingkungan Hidup

No	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Pada Akhir Periode Perencanaan	Target RPJMD Tahun ke					Capaian Target RPJMD Tahun ke					Evaluasi di Akhir Tahun 2019
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
1	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Per Sampahan	Prosentase volume sampah terangkut (%)	70,37	75,37	71,37	72,37	73,37	74,37	75,37	72,2	74	74,38	75,85	75,85	Tercapai
2	Perbaikan Optimalisasi , Operasional Dan Pemeliharaan Fungsi TPA	Prosentase volume sampah yang diolah di TPA(%)	98,16	98,16	98,16	98,16	98,16	98,16	98,16	98,16	98,16	98,16	98,16	98,95	Tercapai
3	Peningkatan Pengelolaan Sampah Berbasis 3R	Reduksi sampah(%)	3,2	4,7	3,5	3,8	4,1	4,4	4,7	3,2	3,2	4,1	6,26	6,89	Tercapai
		Jumlah TPS 3R di daerah yang belum terlayani oleh angkutan (lokasi)	13	18	14	15	16	17	18	24	25	26	26	26	Tercapai
		Jumlah bank sampah(lokalasi)	10	70	15	15	15	15	0	56	72	233	253	334	Tercapai
4	Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan	Tingkat indeks kualitas air (%)	52	55	52	52,5	53	54	55	50	27,33	34,44	49,67	51,67	Tidak Tercapai
		Tingkat indeks udara (%)		80	78	78,5	79	79,5	80	70,56	78,56	85,3	85,86	81,76	Tercapai
		Prosentase ketersediaan informasi status kerusakan lahan		100	20	40	60	80	100	0	0	10,58	26,21	97,10	Tidak Tercapai

No	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Pada Akhir Periode Perencanaan	Target RPJMD Tahun ke					Capaian Target RPJMD Tahun ke					Evaluasi di Akhir Tahun 2019
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
		/tanah untuk produksi biomassa													
		Prosentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran / perusakan lingkungan hidup yang di tindak lanjuti(%)		100	60	70	80	90	100	100	100	100	100	100	Tercapai
		Jumlah usaha/kegiatan yang diawasi memenuhi ketentuan pengelolaan lingkungan	400	1000	120	120	120	120	120	150	274	300	200	120	Tercapai
		Prosentase usaha/kegiatan yang telah menyediakan tempat sampah terpilah (khusus untuk kegiatan usaha yang memiliki izin lingkungan)	-	100	20	40	60	80	100	0	0	60	80	60	Tidak Tercapai

No	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Pada Akhir Periode Perencanaan	Target RPJMD Tahun ke					Capaian Target RPJMD Tahun ke					Evaluasi di Akhir Tahun 2019	
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
5	Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Alam	Jumlah pengendalian pemanfaatan air tanah di kota Bogor (kegiatan usaha)	180	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	185		
		Prosentase peningkatan rata-rata debit air dari sumber mata air(%)	0	10	0	0	10	10	10	10	0	0	10	10	10	Tercapai
		Jumlah bangunan konservasi air tanah (unit)	1.306	1.806	100	100	100	100	100	100	175	295	40	120	35	Tidak Tercapai
		Jumlah kawasan perlindungan, pelestarian dan pengembangan keanekaragaman hayati	13	48	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	Tercapai
		Persentase sekolah yang menjadi keanekaragaman hayati	NA	1,42	0,28	0,57	0,85	1,14	1,42	1,42	0,26	0,57	0,85	1,14		
		Persentase kelurahan yang menjadi kelurahan keanekaragaman hayati	NA	36,76	7,35	14,7	22,05	33,33	36,76	36,76	-	-	-	-	-	

No	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Pada Akhir Periode Perencanaan	Target RPJMD Tahun ke					Capaian Target RPJMD Tahun ke					Evaluasi di Akhir Tahun 2019	
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
6	Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen informasi kualitas lingkungan	2	2	2	2	2	2	2	2	4	2	2	5		
7	Mitigasi Dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah inventarisasi GRK (dokumen)		5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Tercapai
		Jumlah kampung iklim		5	1	1	1	1	1	1	2	2	3	3	2	Tercapai
		Jumlah biodiesel yang dihasilkan(liter)	152.303	184.303	32.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Jenis energi terbarukan yang dikembangkan (jenis)		1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Kemitraan Lingkungan Hidup	Jumlah sekolah yang difasilitasi dan dibina teknis Program Adiwiyata dan sekolah berbudaya lingkungan	56	100	60	70	80	90	100	100	100	100	170	180	100	Tercapai
		Jumlah sosialisasi lingkungan hidup (tema)	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Tercapai
		Jumlah kampanye lingkungan hidup		5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2

No	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Pada Akhir Periode Perencanaan	Target RPJMD Tahun ke					Capaian Target RPJMD Tahun ke					Evaluasi di Akhir Tahun 2019
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
9	Peningkatan Pengelolaan Sampah Berbasis 3R	Reduksi sampah (%)	3,2	4,7	3,5	3,8	4,1	4,4	4,7	3,2	3,2	4,1	6,26	6,89	Tercapai
		Jumlah kelompok masyarakat (pokmas) pengelola sampah berbasis 3R	23	88	16	16	16	16	1	-	-	-	-		

Bidang Urusan : Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

No	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Pada Akhir Periode Perencanaan	Target RPJMD Tahun ke					Capaian Target RPJMD Tahun ke					Evaluasi di Akhir Tahun 2019
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
1	Penataan Administrasi Kependudukan	Prosentase penduduk yang memiliki KK	38,03	85,4	41,32	70,05	75,3	80,25	85,4	100	100	100	100	100	Tercapai
		Prosentase penduduk yang memiliki E-KTP	69,86	73,1	67,72	70,85	71,25	72,05	73,1	90,58	93	95	99,3	99,89	Tercapai
		Prosentase anak yang memiliki Kartu Identitas Anak (KIA)	NA	26,2	23,38	23,38	24,96	25,15	26,2	0	0	20	30	35	Tercapai
		Prosentase pelayanan E-KTP-el kurang dari 2 jam	NA	90	75	75	80	85	90	20	20	0	0	0	Tidak Tercapai
		Presentase penduduk yang pindah datang	NA	0,45	0,3	0,3	0,35	0,4	0,45	6,9	0,8	1,3	1,4	1,57	Tercapai
		Prosentase penduduk yang pindah keluar	NA	0,45	0,3	0,3	0,35	0,4	0,45	7,7	1,03	1,9	2	2,3	Tercapai
		Prosentase penduduk yang pindah antar kelurahan dan kecamatan	NA	0,8	0,5	0,5	0,6	0,7	0,8	0,5	0,6	0,7	0,85	0,90	Tercapai
		Prosentase penduduk yang ber-akta kelahiran	79,49	88	80,69	82	84	86	88	92,87	93,1	93,84	94,07	94,07	Tercapai
		Prosentase penduduk yang ber-akta kematian	56,9	66	58,2	60	62	64	66	2,08	15,75	11,59	21,03	34,78	Tidak Tercapai
		Prosentase penduduk ber-	46,89	63,15	62,19	62,71	62,94	63,02	63,15	53	53	54	55	55,2	Tidak

No	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Pada Akhir Periode Perencanaan	Target RPJMD Tahun ke					Capaian Target RPJMD Tahun ke					Evaluasi di Akhir Tahun 2019
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
		akta perkawinan													Tercapai
		Prosentase penduduk ber- akta perceraian	27,85	44,02	48,79	44,16	44,62	44,51	44,02	37	38,5	40,5	42	43	Tidak Tercapai
		Prosentase bayi lahir pulang bawa akta	NA	95	0	70	80	90	95	0	80	82	91	92	Tidak Tercapai
		Prosentase database kependudukan yang valid dan update	NA	91	65	85	87	89	91	85	90	95	100	100	Tercapai
		Prosentase data dan informasi kependudukan yang di manfaatkan oleh pengguna	NA	64,5	0	58	60	62,5	64,5	60	65	70	75	80,44	Tercapai

Bidang Urusan :Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Pada Akhir Periode Perencanaan	Target RPJMD Tahun ke					Capaian Target RPJMD Tahun ke					Evaluasi di Akhir Tahun 2019
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
1	Keluarga Berencana	Tingkat penurunan TFR	2,23	2	2,17	2,1	2,04	2,02	2	1,89	1,89	2,04	2,04	2,122	Tidak Tercapai
		Kesertaan ber-KB (akseptor)	79.805	124.805	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	37.528	-514	1.591	1.800	-1.519
2	Peningkatan Ketahanan Dan Pemberdayaan Keluarga	Kelompok kegiatan (poktan)	5.139	5.205	12	12	12	12	12	-	-	18	24	26	Tercapai
3	Kesehatan Reproduksi Remaja	Pusat Informasi dan konseling (PIK) Remaja	24	42	6	6	6	-	-	28	0	7	0	0	59 (Tercapai)

Bidang Urusan : Perhubungan

No	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Pada Akhir Periode Perencanaan	Target RPJMD Tahun ke					Capaian Target RPJMD Tahun ke					Evaluasi di Akhir Tahun 2019
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
1	Peningkatan Pelayanan Angkutan	Operasional (Jumlah) Koridor bts Trans Pakuan	3	7	4	5	6	7	7	3	4	5	5		
		Jumlah trayek Feeder	23	30	23	23	23	30	30	23	23	23	22		
		Jumlah Becak laik jalan	1.725	331	1.036	838	680	523	331	857	682	607	566		
		Jumlah koridor bus sekolah	0	4	0	0	0	1	3	0	0	0	2		
		Angkutan wisata dalam kota (paket)	0	4	0	0	0	2	2	0	0	1	0		
2	Peningkatan Aksebilitas Pelayanan Jasa Transportasi	Jumlah jalan utama yang menerapkan off street parking	NA	2	NA	NA	NA	2 lokasi		0	0	0	1		
		Peningkatan kecepatan rata-rata jalan arteri dan kolektor yang dilalui oleh Angkutan umum	NA	35,15	NA	NA	28,15	32,75	35,15	24,65	26,1	34,84	35,39	30,94	Tidak Tercapai
		Prosentase ketersediaan prasarana	70	90	70	75	80	85	90	75	80	85	85		

No	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Pada Akhir Periode Perencanaan	Target RPJMD Tahun ke					Capaian Target RPJMD Tahun ke					Evaluasi di Akhir Tahun 2019
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
		& sarana perhubungan berkondisi baik													
3	Peningkatan Keselamatan Dan Keamanan Transportasi	Jumlah alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL)terpasang	51	86	8	7	9	7	7	8	7	13	13		
		Persentase fasilitas lalu lintas terpasang dalam kondisi baik	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
		Persentase kendaraan bermotor yang laik jalan	85	90	85	87	88	89	90	97,07	88,66	97,37	87,82		
4	Peningkatan Kompetensi SDM Transformasi	Persentase kelompok masyarakat/pelaku transportasi yang di bina	50	75	55	60	65	70	75	55	60	65	88,43		
5	Pengembangan Transportasi Ramah Lingkungan	Persentase kendaraan bermotor yang lulus uji emisi gas buang	93,14	99	95,14	96	97	98	99	97,8	96,14	98,02	87,82	97,61	Tidak Tercapai
		Persentase angkutan umum berbahan bakar ramah lingkungan	35	55	35	40	45	50	55	35	40	-	-		

No	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Pada Akhir Periode Perencanaan	Target RPJMD Tahun ke					Capaian Target RPJMD Tahun ke					Evaluasi di Akhir Tahun 2019
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
6	Pembangunan Pendestrian Dan Jalur Sepeda	Persentase ruas jalan yang menyediakan pedestrian	0,71	3,28	1,35	1,99	2,03	3,28	3,28	-	-	-	-		
		Persentase jalur sepeda	-	0,7	-	-	0,25	0,5	0,7	-	-	-	-		

Bidang Urusan : Komunikasi dan Informasi

No	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Pada Akhir Periode Perencanaan	Target RPJMD Tahun ke					Capaian Target RPJMD Tahun ke					Evaluasi di Akhir Tahun 2019	
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
1	Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Massa	Jumlah ruang publik yang disediakan, infrastruktur jaringan informasi dan komunikasi (lokasi)	0	40	9	5	10	36	40	10	5	7	10	5	Tidak Tercapai	
		Prosentase SIM yang telah terintegrasi lintas PD(%)	1,94	20,39	3,88	12,62	15,53	18,45	20,39	3,88	12,62	15,53	18,45	20,59	Tercapai	
		Prosentase PD yang menyediakan data dan informasi melalui media elektronik	50		60	70	80	90	100	90,7	90,9	87,8	90,2	100	Tercapai	
		Ketersediaan SDM yang mempunyai kompetensi di bidang TIK(orang/PD)	NA	10	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Tercapai
		Prosentase pengamanan informasi daerah yang terselenggara dengan baik(persandian)	NA	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai

Bidang Urusan : Usaha Kecil dan Menengah

No	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Pada Akhir Periode Perencanaan	Target RPJMD Tahun ke					Capaian Target RPJMD Tahun ke					Evaluasi di Akhir Tahun 2019	
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
1	Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif	Persentase UMKM yang produktif	NA	30	10	15	20	25	30	-	-	-	-	30	Tercapai	
		Jumlah kelompok usaha mendapat bantuan permodalan	75	476	75	78	81	83	87	87	75	162	81	84	87	Tercapai
2	Peningkatan Kualitas Pelebagaan Koperasi	Jumlah koperasi aktif	301	726	85	85	85	85	85	395	465	498	528	517	Tercapai	
		Jumlah lembaga keuangan mikro yang menjadi lembaga mikro berbadan hukum	136	272	27	27	27	27	28	28	27	58	0	7	17	Tidak Tercapai
3	Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah	Jumlah promosi yang di lakukan	25	25	5	5	5	5	5	5	7	7	5	5	Tercapai	
		Jumlah kemitraan dan kerja sama UMKM	3	13	5	7	9	11	13	13	5	7	10	11	13	Tercapai
4	Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima	Persentase PKL yang terelokasikan berdasarkan zona	0	100	100	100	100	100	100	100	0	10	10	10	100	Tercapai
		Penetapan jalan utama sebagai zona bebas PKL(lokal)		2		2	1	1	1	2	0	2	1	1	2 (dewi sartika, otista)	Tercapai

No	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Pada Akhir Periode Perencanaan	Target RPJMD Tahun ke					Capaian Target RPJMD Tahun ke					Evaluasi di Akhir Tahun 2019
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
		Persentase penataan zona PKL sehingga tidak mengganggu ketertiban umum		100	20	40	60	80	100	0	40	60	80	100	Tercapai
5	Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Jumlah jenis produk wira usaha baru/UMKM baru yang terserap pasar	19	2	2	2	2	2	2	-	-	-	-	2	Tercapai

Bidang Urusan : Penanaman Modal

No	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Pada Akhir Periode Perencanaan	Target RPJMD Tahun ke					Capaian Target RPJMD Tahun ke					Evaluasi di Akhir Tahun 2019	
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
1	Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal	Nilai realisasi investasi (dalam triliun rupiah)	NA			1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	3,1	2,3	2,9	2,1	2,641	Tercapai
		Jumlah promosi penanaman modal	4	20		4	4	4	4	4	4	4	6	4	4	Tercapai
		Tingkat pelayanan promosi dan investasi berbasis internet	100	100		100	100	100	100	100	-	-	77	63,97	100	Tercapai
		Persentase perizinan dan non perizinan yang dapat dilayani sesuai dengan SOP (%)		100		70%	75%	80%	85%	90%	25,28%	35,84%	54,01%	64%	75%	Tidak Tercapai
		Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat terhadap pelayanan perizinan (%)		100		98	98	98	98	98					100%	Tercapai
2	Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal	Persentase perizinan dan non perizinan yang dapat dilayani sesuai dengan SOP (%)	-	100		70%	75%	80%	85%	90%	25,28%	35,84%	54,01%	64%	75%	Tidak Tercapai
		Tingkat tindak lanjut pengaduan msasyarakat			98	98	98	98	98	98					100%	Tercapai

No	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Pada Akhir Periode Perencanaan	Target RPJMD Tahun ke					Capaian Target RPJMD Tahun ke					Evaluasi di Akhir Tahun 2019
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
		terhadap pelayanan (%)													
		Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan		70	71	72	73	74	75	74,25	78,79	75,53	88,51	82,78%	Tercapai

Bidang Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

No	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Pada Akhir Periode Perencanaan	Target RPJMD Tahun ke					Capaian Target RPJMD Tahun ke					Evaluasi di Akhir Tahun 2019
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
1	Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Jumlah siswa yang mengikuti seleksi dan diklat PASKIBRA	200	300	255	250	275	280	300	265	275	275	358	315	Tercapai
		Jumlah pemuda yang mengikuti PPAN dan BPAP	30	80	40	50	60	70	80	40	50	60	50	50	Tidak Tercapai
		Jumlah pemuda yang mengikuti kegiatan jumlah pelapor	30	40	32	34	36	38	40	60	34	36	38	38	Tidak Tercapai
		Jumlah pemuda kota bogor yang mengetahui cara berwirausaha	0	60	-	-	60	60	0	0	100	100	50	Tidak Tercapai	
		Jumlah organisasi pemuda (OKP) yang mengikuti kegiatan	30	60	30	30	20	60	60	68	68	78	36	40	Tidak Tercapai
		Jumlah pemuda yang mengetahui bahaya HIV/AIDS	68	100	-	92	92	100	100	0	92	0	100	100	Tercapai
		Jumlah pemuda yang mengikuti kegiatan jambore komunitas	55	100	80	80	80	100	100	0	80	100	100	50	Tidak Tercapai

No	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Pada Akhir Periode Perencanaan	Target RPJMD Tahun ke					Capaian Target RPJMD Tahun ke					Evaluasi di Akhir Tahun 2019
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
2	Pengembangan Dan Keserasian Kebijakan Pemuda	Jumlah pemuda yang memahami tentang undang undang kepemudaan	55	100	80	80	80	100	100	0	0	0	0	0	Tidak Tercapai
3	Pembinaan Dan Pemaasyarakatatan Olahraga	Jumlah atlet dengan cabang olahraga yang diikutsertakan dalam POPWIL (2 tahun sekali)	114	127	127	-	127	-	127	0	149	0	140	145	Tercapai
		Jumlah atlet dengan cabang olahraga yang diikutsertakan dalam POPDA (2 tahun sekali)	116	130	-	130	-	130		116	0	204	0	0	Tercapai
		Jumlah atlet dengan cabang olahraga yang diikutserakan dalam pekan olahraga pondok pesantren daerah (POSPEDA)		150		150	-	-	-	0	0	-	60	20	Tercapai
		Jumlah atlet yang diikutsertakan dalam	120	60	0	0	60	0	0					0	Tercapai

No	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Pada Akhir Periode Perencanaan	Target RPJMD Tahun ke					Capaian Target RPJMD Tahun ke					Evaluasi di Akhir Tahun 2019
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
		pekan olahraga pondok pesantren daerah tingkat wilayah (POSPEDAWIL)													
		Jumlah atlet yang diikutsertakan dalam pekan olahraga pondok pesantren daerah tingkat nasional (POSPEDANAS)	0	2	0	25	0	0	2	0	0	0	0	0	Tidak Tercapai
4	Peningkatan Sarana Dan Prasarana	Jumlah lapangan yang direnovasi	7		300	5	5		5	6	4	4	3	3	Tidak Tercapai
		Presentase sarana prasarana olahraga yang digunakan untuk kegiatan olahraga (%0	7	25	5	5	5	5	5						
		Jumlah sarana kreatifitas yang didukung ruang publik	0	3		1	1	1						1	Tercapai

Bidang Urusan Kebudayaan

No	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Pada Akhir Periode Perencanaan	Target RPJMD Tahun ke					Capaian Target RPJMD Tahun ke					Evaluasi di Akhir Tahun 2019
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
1	Pengelolaan Keberagaman Budaya	Presentae peningkatan jumlah pelaku seni budaya (komunikas dan sanggar) yang aktif	NA	50	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	Tercapai

Bidang Urusan : Pariwisata

No	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Pada Akhir Periode Perencanaan	Target RPJMD Tahun ke					Capaian Target RPJMD Tahun ke					Evaluasi di Akhir Tahun 2019
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
1	Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan(%)	NA	50	10%	10%	10%	10%	10%	10%	11%	16%	38%	15%	Tercapai
		PAD sector Pariwisata (Pajak Hotel, Restauran, Hiburan)									137.000.000.000	185.000.000.000	193.851.398.631	250.145.365.364	256.154.792.524
		Prosentase Peningkatan PAD dari sektor pariwisata	NA	50	10%	10%	10%	10%	10%						

Bidang Urusan Kearsipan

No	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Pada Akhir Periode Perencanaan	Target RPJMD Tahun ke					Capaian Target RPJMD Tahun ke					Evaluasi di Akhir Tahun 2019
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
1	Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Persentase SKPD yang menyelenggarakan kearsipan secara tertib(%)	NA	NA	20	40	60	80	100	58,62	47,82	12,5	60		
		Prosentase arsip yang terkelola dalam sistem informasi manajemen arsip daerah	NA	NA	50	60	70	80	90	53,83	53,83	68,55	75		
		Jumlah arsip yang ditertibkan	121	121	241	483	966	1499	1932	590	4428	300	278		
2	Penyelamatan Dan Pelestarian Arsip Daerah	Penyelamatan dan pelestarian arsip daerah	NA	NA	10	20	30	40	50	52,67	52,67	52,67	49,07		
		Penyelamatan dan pelestarian arsip daerah	28	28	57	115	330	345	460	404	450	250	241		

Bidang Urusan Perpustakaan

No	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Pada Akhir Periode Perencanaan	Target RPJMD Tahun ke					Capaian Target RPJMD Tahun ke					Evaluasi di Akhir Tahun 2019
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
1	Penggembangan Budaya Baca Dan Pembinaan Perpustakaan	Jumlah pengunjung perpustakaan umum dan keliling (orang)	37	37.000	49	61	73,1	85.000	97000	49,04	45,01	74,62	25.421		
		Jumlah koleksi dan judul buku	44,32	44.320	47,62	503.290	54.220	57.520	60.820	57650	64120	66900	67990	75.519	Tercapai
		Peningkatan fungsi perpustakaan	NA	20	20	40	60	80	100	50	60	62,5	80		
2	Peningkatan Sarana Dan Prasarana Perpustakaan	Pemenuhan sarana dan prasarana (Sapras) perpustakaan sesuai standard	NA	20	20	40	60	80	100	20	40	61,98	70		

Bidang Urusan : Pertanian

No	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Pada Akhir Periode Perencanaan	Target RPJMD Tahun ke					Capaian Target RPJMD Tahun ke					Evaluasi di Akhir Tahun 2019
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
1	Peningkatan Produksi Pertanian, Peternakan Dan Perikanan	Prosentase rata-rata peningkatan produksi pertanian, peternakan, dan perikanan pertahun(%)		15	3	3	3	3	3	8,74	4,03	11,01	4,36	3,05	Tercapai
		Peningkatan status kelompok tani (kelompok)		50	10	10	10	10	10	22	4	14	15	10	Tercapai
2	Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian, Peternakan Dan Perikanan	Peningkatan jumlah produk olahan yang dibina (produk)	24	89	13	13	13	13	13	9	13	17	13	13	Tercapai
3	Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Hewan Zoonosis Dan Penyediaan Pangan Hewani Sesuai Dengan Kriteria Aman, Sehat, Utuh, Dan Halal	Jumlah kasus penyakit zoonosis pertahun		10	10	10	10	10	10	0	0	0	0	0	Tercapai
		Persentase penurunan cemaran pada sampel pangan hewani(%)	50	25	45	40	35	30	25	10,8	15,6	17,5	22,2	24	Tercapai

Bidang Urusan : Perdagangan

No	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Pada Akhir Periode Perencanaa n	Target RPJMD Tahun ke					Capaian Target RPJMD Tahun ke					Evaluasi di Akhir Tahun 2019
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
1	Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan Dan Perdagangan	Persentase jumlah kasus konsumen yang terselesaikan	115	240	15	20	25	30	35	21	41	32	45	41,6	Tercapai
		Persentase pelaku usaha yang tertib niaga	32	87	11	11	11	11	11	11	NA	NA	11	11	33
2	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Haki	200	390	50	50	30	30	30	50	50	30	30	30	Tercapai
		Halal	590	1090	100	100	100	100	100	100	100	100	70	25	Tidak Tercapai
3	Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Persentase pertumbuhan sub sektor perdagangan besar dan eceran	22	26	23	24	25	25	25	23	24	25	25		Menunggu data dari BPS (PDRB)
		Rata rata persentase kenaikan harga bahan pokok	12	12	12	12	12	13	12	12	12	12	18	8,25	Tidak Tercapai (Kenaikan harga rata-rata bahan pokok dapat diatasi dengan tidak melebihi angka 12% (Hasil perhitungan terlampir)

No	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Pada Akhir Periode Perencanaa n	Target RPJMD Tahun ke					Capaian Target RPJMD Tahun ke					Evaluasi di Akhir Tahun 2019
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
4	Peningkatan Dan Perkembangan Ekspor	Jumlah produk berkualitas ekspor (berkomoditi)	19	29	21	23	25	27	29	21	23	30	30	30	Tercapai

Bidang Urusan : Perindustrian

No	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Pada Akhir Periode Perencanaan	Target RPJMD Tahun ke					Capaian Target RPJMD Tahun ke					Evaluasi di Akhir Tahun 2019
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
1	Perkembangan Industri Kecil Dan Menengah	Jumlah IKM yang produktif	700	1075	775	850	925	1000	1.075	775	850	925	1000	1.303	Tercapai
2	Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Jumlah IKM yang menerapkan teknologi	12	37	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	Tercapai

Sekretariat Dewan

No	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Pada Akhir Periode Perencanaan	Target RPJMD Tahun ke					Capaian Target RPJMD Tahun ke					Evaluasi di Akhir Tahun 2019
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase rancangan yang disetujui menjadi perda (%)	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80		

Sekretariat Daerah

No	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Pada Akhir Periode Perencanaan	Target RPJMD Tahun ke					Capaian Target RPJMD Tahun ke					Evaluasi di Akhir Tahun 2019
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
1	Penataan Perundang- Undangan	Prosentrase penerbitan perda dan perwali	NA	95	80	85	85	90	95	80	85	85	90	95	Tercapai
		Presentaseproduk hukum daerah yang ditetapkan sesuai SOP(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Penegakan Hukum Dan Penerapan HAM	Prosentase penyelesaian perkara hukum (TUN dan perdata)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai
3	Pengembangan Kapasitas Kecamatan Dan Kelurahan	Prosentase kecamatan dan kelurahan kinerja baik (%)	90	95	85	87	90	93	95	85	87	90	93	95	Tercapai
		Jumlah kelurahan berpresentasei tingkat kota,provinsi, dan nasional	NA	15	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	Pemantapan Otonomi Daerah Dan Sistem Administrasi Pemerintahan Daerah	Prosentase pelaksanaan pengadministrasian batas wilayah sesuai	80	95	75	80	85	90	95	100	100	100	100	95	Tercapai

No	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Pada Akhir Periode Perencanaan	Target RPJMD Tahun ke					Capaian Target RPJMD Tahun ke					Evaluasi di Akhir Tahun 2019
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
		ketentuan													
5	Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Prosentase hasil rekomendasi hasil rekreda yang ditindak lanjuti	70	100	85	90	90	95	100	85	90	90	95	100	Tercapai
6	Pemningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Indeks evaluasi kinerja penyelenggara pemerintah daerah	2,8	3,2	2,8	2,9	3	3,1	3,2	2,8	2,9	3	3,1	3,39	Tercapai
		Ketetapan waktu penyampaian	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu
7	Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Perentase tertib administrasi pengelolaan keuangan dan aset daerah lingkup sekretarian daerah	100	100	100	100	100	100	100	85	90	95	95	-	
8	Kejasama Pembangunan	Prosentase kerjasama yang diimplementasik sesuai kesepakatan	80	100	83	85	90	95	100	83	85	90	95	100	Tercapai
9	Kerjasama Informasi Dengan Media Masa	Prosentase tingkat pencapaian penyampaian informasi/publik (%)	NA	100	80	85	90	95	100	80	85	90	92	96	Tidak Tercapai

No	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Pada Akhir Periode Perencanaan	Target RPJMD Tahun ke					Capaian Target RPJMD Tahun ke					Evaluasi di Akhir Tahun 2019
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
10	Peningkatan Kualitas Pelayanan Keprotokolan	Rprosentase pemenuhan kebutuhan dasar oprasional PD	NA	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai
11	Pengembangan Sistem Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Mengengah	Prosentase rekomendasi pengembangan perekonomian daerah yang di tindak lanjuti	NA	95	70	80	85	90	95	70	80	85	90	95	Tercapai
12	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Persentase BUMD yang sehat	NA	50	NA	NA	50	50	50	75	75	75	75	50	Tercapai
13	Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan Perdagangan	Kesesuaian antara kondisi riil intalase daerah terhadap pryeksi inflansi tahun ke -n	NA	< Proyeksi RKPD	proyeksi RKPD	proyeksi RKPD	proyeksi RKPD	proyeksi RKPD	proyeksi RKPD	NA	NA	NA	NA	2,71	Tercapai
		Tingkat pemantauan dan pengendalian infasi daerah	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai
14	Pemberdayaan Lembaga Sosial	Opresentase lembaga sosial yang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

No	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Pada Akhir Periode Perencanaan	Target RPJMD Tahun ke					Capaian Target RPJMD Tahun ke					Evaluasi di Akhir Tahun 2019
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
		berpartisipasi aktif dalam pembangunan													
15	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	C	A	CC	CC	B	BB	A	BB	BB	B	B		
		Prosentase OPD yang mendapat nilai B pada pemilihan AKIP	50	90	70	75	80	85	90	3	5	49	76	100	Tercapai
16	Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	Prosentase pemeringkatan jabatan untuk setiap jabatan pada perangkat daerah (PD)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
17	Penataan Tata Laksana	Indeks kepuasan masyarakat pada seluruh OPD yang memberikan layanan publik	2,5	3,25	2,65	2,8	2,95	3,1	3,25	2,65	3,2	3,3	3,3	3,34	Tercapai
		Persentase PD yang menetapkan SOP pelayanan publik (%)	50	100	60	70	80	90	100	73	95	100	100		
18	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks kepuasan masyarakat pada	2,5	3,25	2,65	2,8	2,95	3,1	3,25	2,65	3,2	3,3	3,3	3,34	Tercapai

No	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Pada Akhir Periode Perencanaan	Target RPJMD Tahun ke					Capaian Target RPJMD Tahun ke					Evaluasi di Akhir Tahun 2019
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
		seluruh SKPD yang memberikan pelayanan/publik													
19	Penataan Dan Penguatan Organisasi	Organisasi perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran (%)	NA	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai
20	Penerapan Reformasi Birokrasi	Indeks RB	NA	BB	100	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	B	B (66,10)	Tercapai
21	Pengendalian Pembangunan	Konsistensi antara rencana kegiatan PD dan implementasinya	NA	NA	NA	97	85	95	100	NA	96	81	90	100	Tercapai
22	Pengendalian Bangunan	Tingkat tertib administrasi pelaksanaan kegiatan pembangunan (%)	97	>97	>97	>97	>97	>97	>97	100	100	100	100	100	Tercapai

Bidang Urusan : Pengawasan

No	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Pada Akhir Periode Perencanaan	Target RPJMD Tahun ke					Capaian Target RPJMD Tahun ke					Evaluasi di Akhir Tahun 2019	
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
1	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Level maturitas penerapan SPIP	1	3	1	1	1	2	3	1	1	1	2	3	Tercapai	
		Peningkatan level kapabilitas APIP	1	3	1	1	2	2	3	1	1	2	2	3	Tercapai	
		Penetapan PD berpredikat WBK	0	5	0	0	0	2	3	0	0	0	0	0	Tidak Tercapai	
		Tingkat kesesuaian laporan aksi PPK dengan data dukung (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai
		Opini BPK atas LKPD kota bogor	WDP	WTP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	Tercapai
		Tindak lanjut rekomendasi tamuan aparatus pengawasan internal (inspektorat kota Bogor)(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai
2		Tindak lanjut rekomendasi tamuan aparatus pengawasan internal (inspektorat provinsi jawa barat)	70,72	74	70,72	71	72	73	74	55,17	81,05	83,64	93,29	100	Tercapai	

No	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Pada Akhir Periode Perencanaan	Target RPJMD Tahun ke					Capaian Target RPJMD Tahun ke					Evaluasi di Akhir Tahun 2019
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
		Tindak lanjut rekomendasi tamuan aparat pengawasan eksternal (BPK)(%)	83,2	89	85	86	87	88	89	95,97	98,64	98,88	100	100	Tercapai
		Tidak adanya auditor yang di bebaskan sementara karna kekuarangan angka kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tercapai
3	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Hasil evaluasi LKIP SKPD yang memenuhi kriteria minimal "B"	40	65	45	50	55	60	65	2,9	5,4	29,7	75	97,3	Tercapai

Bidang Urusan : Perencanaan

No	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Pada Akhir Periode Perencanaan	Target RPJMD Tahun ke					Capaian Target RPJMD Tahun ke					Evaluasi di Akhir Tahun 2019
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
1	Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase keselarasan renstra SKPD dengan RPJMD	75	90	80	85	90	95	100	80	85	90	95	77,78	Tidak Tercapai
		Prosentase keselarasan program pembangunan daerah di RKPD dengan RPJMD	NA	100	82	84	86	88	90	82	84	86	88	90	Tercapai
		Persentase keselarasan renja SKPD dengan RKPDP	75	100	80	85	90	95	100	80	85	90	95	77,78	Tidak Tercapai
		Persentase program dalam renja/renja perubahan yang terakomodir dalam RKA/RKA perubahan	NA	90	82	84	86	88	90	80	80	80	80,5		
		Persentase anggaran dalam RKPDP/RKPD perubahan yang terakomodir dalam KUA- PPAS DAN KUPA-PPASP	NA	90	82	84	86	88	90	80	80	80	80,5	88,67	Tidak Tercapai

No	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Pada Akhir Periode Perencanaan	Target RPJMD Tahun ke					Capaian Target RPJMD Tahun ke					Evaluasi di Akhir Tahun 2019
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
		Jumlah pendanaan dari pemerintah pusat/provinsi yang terakomodir dalam APBD/APBDP	NA	15	10	12	13	14	15	-	-	-	4,3	48,21 (persentase)	
		Presentase program pembangunan daerah yang di danai dari pemerintah pusat atau provinsi	NA	10	3	5	7	10	10	-	-	-	4,3		
		Presentase usulan masyarakat yang terakomodir dalam APBD	NA	90	60	65	70	75	80	60	65	70	74,49	86	Tercapai
		Rasio keterwakilan masyarakat dalam kegiatan musrenbang	NA	01:10,0	01:10,0	01:10,0	01:10,0	01:10,0	01:10,0	1:10.000	1:10.000	1:10.000	1:10.000	2,6:10.000	Tercapai
		Persentase keterwakilan gender dalam kegiatan musrenbang	NA	30	10	15	20	25	30	10	15	20	25	31,75	Tercapai

No	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Pada Akhir Periode Perencanaan	Target RPJMD Tahun ke					Capaian Target RPJMD Tahun ke					Evaluasi di Akhir Tahun 2019
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
		Persentase penarapan E planing, E Budgeting, dan E Monev	NA	80	30	40	70	100	100	30	40	70	100	100	Tercapai
2	Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	Persentase keselarasan rencana program pembangunan sosial budaya dan pemerintahan dengan RPJMD	80	97	80	90	93	95	97	80	90	93	95	93	Tidak Tercapai
		Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan sosial budaya	80		80	90	93	95	97	80	90	93	95		
3	Perencanaan Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam	Persentase keselarasan rencana pembangunan prasarana sarana wilayah dan sda dengan RPJMD	80	97	80	90	93	95	97	80	90	93	95	100	Tercapai
		Persentase ketersediaan dokumen /perencanaan bangunan prasarana sarana wilayah dan sda	80	97	80	90	93	95	97	80	90	93	95	93	Tidak Tercapai

No	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Pada Akhir Periode Perencanaan	Target RPJMD Tahun ke					Capaian Target RPJMD Tahun ke					Evaluasi di Akhir Tahun 2019
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
4	Program Perencanaan Bangunan Ekonomi	Persentase keselarasan rencana program pembangunan daerah sektor ekonomi dengan RPJMD	80	97	80	90	93	95	97	80	85	90	90	93	Tidak Tercapai
		Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan ekonomi	80	97	80	90	93	95	97	80	85	90	90		
5	Program Pengendalian Pembangunan Daerah	Persentase indikator kinerja sasaran pembangunan daerah dalam RPJMD yang mencapai target	80	97	80	90	93	95	97	80	90	93	95	61,11	Tidak Tercapai
		Persentase indikator kinerja program prioritas pembangunan daerah dalam RPJMD yang mencapai target	80	97	80	90	93	95	97	80	90	93	95		
6	Kerjasama Pembangunan	Jumlah pendanaan dari CSR/TJSLP	NA	10,5 Milyar	NA	NA	3 Milyar	3,5 Milyar	4 Milyar		158,882,000	4,227,730,000	2,193,744,450	4,910,000,000	Tercapai

No	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Pada Akhir Periode Perencanaan	Target RPJMD Tahun ke					Capaian Target RPJMD Tahun ke					Evaluasi di Akhir Tahun 2019
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
		Presentase program pembangunan daerah yang didanain dari CSR	NA	10	NA	NA	5	8	10	-	9,02	6,25	18,275	40,62	Tercapai
7	Perencanaan Tata Ruang	Presentase konsistensi antara rencana tata ruang wilayah(RTRW)dengan RPJMD	NA	90	80	85	87	90	90	80	85	87	88		
8	Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase ketercapaian indikator kinerja program penataan ruang	NA	90	80	85	87	90	90	80	85	87	90	100	Tercapai
9	Penelitian Dan Pengembangan	Jumlah inovasi masyarakat yang telah di inventarisir	NA	60	-	-	20	40	60	-	-	54	44	46	Tidak Tercapai
		Persentase inovasi masyarakat yang di implementasikan untuk menunjang visi misi kota	NA	60	-	-	-	30	30	-	-	-	100	30,43	Tercapai
		Jumlah penghargaan yang diberikan oleh pemerintah daerah atas inovasi masyarakat	NA	9	-	-	3	3	3	-	-	12	0	20	Tercapai

No	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Pada Akhir Periode Perencanaan	Target RPJMD Tahun ke					Capaian Target RPJMD Tahun ke					Evaluasi di Akhir Tahun 2019
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
10	Pengembangan Data Dan Informasi	Prosentase dokumen perencanaan yang dapat diakses oleh publik melalui media elektronik	NA	97	60	70	80	90	100	80	90	93	95	100	Tercapai
		Jumlah data yang telah terintegrasi dengan data SKPD melalui sistem informasi Manajemen data	8766	9266	8766	8766	8766	9016	9266	8766	8766	8766	9016	9016	Tercapai
11	Perencanaan Tata Ruang	Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan tata ruang			20	40	50	75	100						

BAPENDA

No	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencana an	Target Pada Akhir Periode Perencana an	Target RPJMD Tahun ke					Capaian Target RPJMD Tahun ke					Evaluasi di Akhir Tahun	
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
1	Peningkatan Dan Pengembang an Pengelolaan Keuangan Daerah	Target PAD	315.010.0 39.893	754.739.728 .200	535.373.902 .900	583.069.233 .600	635.230.953 .200	692.280.153 .600	754.439.728 .200	627.594.065 .141	783.873.587 219,30	978.197.741 .947,33	912.197.971.2 88	1.013.756.0 16.431	Tercapai	
		Target pendapatan pajak daerah	344.501.0 00.000	550.000.000 .000	388.811.965 .615	466.700.000 .000	488.800.000 .000	541.000.000 .000	550.000.000 .000	398.435.398 .328	492.138.653 .391	555.475.409 .588	592.978.746.8 62	689.495.90 4.284	Tercapai	
		Piutang pajak daerah menurun(%)	0,76	3	3	3	3	3	3	3	16,87	-2,41	11,20	9,92	16,64	Tidak Tercapai
		WP Yang diklarifikasi/di periksa	60 WP	70 WP	60 WP	60 WP	70 WP	70 WP	70 WP	70 WP	43 WP	45 WP	48 WP	129 WP	176 WP	Tercapai
		Presentase WP yang membayar pajak daerah secara Online(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai

No	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencana an	Target Pada Akhir Periode Perencana an	Target RPJMD Tahun ke					Capaian Target RPJMD Tahun ke					Evaluasi di Akhir Tahun
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
		WP pajak daerah lainnya bertambah	7,68	10	10	10	10	10	10	15,02	22,73	10,85	10,18	8,76	Tidak Tercapai
		Presentase WP pajak daerah (PBB) bertambah(%)	1,52	2	2	2	2	2	2	1,63	1,52	1,44	2,24	0,98	Tidak Tercapai

BPKAD

No	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Pada Akhir Periode Perencanaan	Target RPJMD Tahun ke					Capaian Target RPJMD Tahun ke					Evaluasi di Akhir Tahun 2019
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
1	Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Dokumen keuangan(APBD dan DPA SKAPD),laporan keuangan,dan pelayanan keuangan yang dihasilkan secara tepat waktu(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
		Tingkat tertib administrasi pengelolaan keuangan (ketepatan waktu penyampaian dokumen laporan keuangan daerah) (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
2	Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah	Persentase laporan, inventarisasi, pemeliharaan, dan pengamanan barang milik daerah	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
		Tingkat tertib pengelolaan aset daerah	100	100	100	100	100	100	100	100	79	79	79	80	

Bidang Urusan: Kepegawaian

No	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Pada Akhir Periode Perencanaan	Target RPJMD Tahun ke					Capaian Target RPJMD Tahun ke					Evaluasi di Akhir Tahun
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
1	Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur	Persentase aparatur yang terlayani administrasi, data, dan informasi kepegawaian(%)	90	100	95	95	100	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai
		Persentase aparatur yang memiliki kompetensi dasar sesuai kebutuhan (%)	50	85	60	65	75	80	85	94,47	95,47	93,59	97,79		
2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase proyek perubahan yang di implementasikan oleh aparatur sipil negara (ASN) untuk peningkatan efektivitas dan efisiensi kinerja (%)	NA	30	-	-	20	25	30	-	-	28,05	36,8		

No	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Pada Akhir Periode Perencanaan	Target RPJMD Tahun ke					Capaian Target RPJMD Tahun ke					Evaluasi di Akhir Tahun
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
		Persentase peningkatan kompetensi aparatur	60	85	65	70	75	80	85	61,21	66,92	84,27	91,84		
3	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase ketaatan pejabat yang wajib melaporkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) secara tepat waktu (%)	NA	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai

BAB V

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN (IKK)

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada akhir periode masa jabatan. Indikator kinerja daerah disusun berdasarkan indikator program prioritas yang telah ditetapkan (*outcomes*) atau kompositnya (*impact*). Indikator kinerja daerah dibagi dalam tiga aspek meliputi (i) aspek kesejahteraan masyarakat, (ii) aspek pelayanan umum, dan (iii) aspek daya saing daerah. Hasil evaluasi capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan selama lima tahun Pemerintah Kota Bogor dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5.1
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah (IKK)

NO	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OutCome)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019	
			Target	Realisasi								
A	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT											
I.	KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI											
I.1	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Admiistrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian											
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,15	6,26	6,14	6,36	6,73	6,46	6,12	6,56		6,66	
2.	Laju Inflasi	4,06	4,05	2,73	4,05	3,6	4,05	4,59	4,04	3,69	4,04	
3.	PDRB per kapita ADHB	4,4	4,4	4,4	5,5	5,05	4,52	4,52	38,5	38,5	26,7	
4.	PDRB ADHK	6.063.388,37	6.419.936,37	25.298,60	6.791.108,38	27.002,25	7.176.903,24	28.654,97	7.557.321,36		7.992.362,71	
5.	Miskin (%)	8,97	8,3	7,6	8,19	7,29	8,08	7,8	7,97	5,93	7,86	
6.	IPM	76,7	77,77	73,65	78,27	74,5	78,77	75,16	79,27	75,59	79,77	
7.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	9,33	8,44	11,03	7,64	10,01	6,91	6,5	6,26	9,28	5,66	
8.	Indeks Gini	0,34	0,33	0,47	0,33	0,43	0,32	0,431	0,32	0,41	0,31	0,41* angka tahun sebelumnya
9.	Indeks Daya Beli (Rp)	67,86	68,89	10.576,37	69,15	10.662	69,41	10.940	69,67		69,93	

NO	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OutCome)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019	
			Target	Realisasi								
II.	FOKUS KESEJAHTERAAN MASYARAKAT											
II.1	Pendidikan											
1.	Angka Melek Huruf	99,03	99,09	98,82	99,15	99,33	99,2	99,35	99,26	99,35	99,32	
II.2	Kesehatan											
1.	Angka Usia Harapan Hidup	69,3	69,41	72,88	69,51	72,95	69,62	73,01	69,73	73,21	69,83	73,41
B	ASPEK PELAYANAN UMUM											
I.	PELAYANAN URUSAN WAJIB											
I.1	Pendidikan											
1.	Angka rata-rata lama sekolah	9,93	9,97	10,2	10,02	10,28	10,06	10,29	10,11	10,30	10,15	10,32
2.	Angka Partisipasi Kasar SD/Paket A	113,33	113,5	110,5	113,7	106,57	113,8	105,55	113,9	112,60	114	112,64
3.	Angka Partisipasi Kasar SMP/Paket B	104,66	104,7	108,56	104,75	105,55	104,8	101,06	104,9	104,1	105	104,01
4.	Angka Partisipasi Kasar SMA/Paket C	129	129,5	115,27	130	116,64	130,5	116,9	131	104,93	131,5	
5.	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/Paket A	97,18	98	103,98	98,5	98,3	99	96	99,5	108,05	100	99,30
6.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/Paket B	89,6	90	99,41	90,5	74,3	91	90	91,5	94,14	92	94,14
7.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/Paket C	99,94	99,95	103,99	99,96	78,6	99,97	88	99,98	88	100	

NO	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OutCome)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019	
			Target	Realisasi								
8.	Angka Pendidikan yang ditamatkan SD/MI/Sederajat (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
9.	Angka Pendidikan yang ditamatkan SLTP/MTs/Sederajat (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
10.	Angka Pendidikan yang ditamatkan SLTA/MA/SMK/Sederajat (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
11.	Kualifikasi tenaga pendidik yang sekurang-kurangnya S1/DIV (orang)	72,14	72,15	85	72,16	88,5	72,17	85	72,18	87,87	72,19	86,52
12.	Rasio rombel dengan ruang kelas SD	1 : 1,64	1 : 1,51	1:1,35	1 ; 1,38	1:1,29	1 : 1,26	1:1,35	1 : 1,13	1:1,36	1:1	
13.	Rasio rombel dengan ruang kelas SMP	1 : 1,05	1 : 1,04	1:1	1 ; 1,03	1:1	1 : 1,02	1:1	1 : 1,01	1:1	1:1	
14.	Rasio rombel dengan ruang kelas SMA	1 : 1,12	1 : 1,10	1:1	1 ; 1,08	1:1	1 : 1,06	1:1	1 : 1,04	1:1	1:1	
15.	Sekolah kondisi bangunan baik	91,6	91,7		91,8		91,9		92		92,1	

NO	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OutCome)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019	
			Target	Realisasi								
16.	Persentase sekolah yang memiliki Lab IPA (SMP, SMA) dengan sarana prasarana yang baik	54,03%	55%	58	56%	61	57%	63	58%	66	59%	
17.	APK PAUD usia 4-6 tahun	65,19%	70%	36,68	73%	37,03	77%	38,2	79%	49,04	80%	49,06
18.	Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Anak Usia Dini	22,70%	23%	22,72	24%	41,92	25%	42,3	26%	46,82	27%	
I.2	Kesehatan											
1.	Prevalensi HIV/AIDS	< 0,5	< 0,5	0,29	< 0,5	0,36	< 0,5	0,15	< 0,5	0,42	<0,5	0,46
2.	Persentase balita gizi buruk	0,47	0,5	0,35	0,4	0,07	0,3	0,07	0,3	0,07	0,3	0,07
3.	Jumlah balita gizi buruk	378	350		340		330		320		300	54
4.	Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup	13	12	105	11	110	10	30	10	30	10	69
5.	Angka Kematian Bayi (AKB)	62	58	3,2	55	3	53	3,7	51	2,95	49	2,67
6.	Angka kematian balita	61,5	61,5	3,6	61	3,1	60,5	4,6	60	3,35	59	2,5
7.	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
8.	Persentase pasien gakin yang terlayani di pelayanan dasar	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

NO	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OutCome)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019	
			Target	Realisasi								
	dan rujukan											
9.	Rasio puskesmas per satuan penduduk (per 30.000 penduduk)	0,72	0,72	0,68	0,71	0,67	0,71	0,69	0,7	0,68	0,7	0,68
10.	Rasio klinik yang memenuhi persyaratan per 25.000 penduduk	3,38	3,44	2,24	3,57	2,20	3,7	2,17	3,82	2,96	3,92	3,35
11.	Rasio Pustu per satuan penduduk	0,87	0,96	0,16	0,96	0,16	1,02	0,07	1,07	0,06	1,11	0,84
12.	Rasio dokter per 100.000 penduduk	7,96	8,52	0,25	9,04	0,26	9,53	0,07	11,23	0,32	11,88	17
13.	Rasio bidan per satuan penduduk	11,15	11,42	92	11,68	7	11,82	46	11,95	48	12,06	48
14.	Prevalensi Tuberkulosis per 100.000 penduduk	0,006	0,005	0,011	0,005	0,011	0,005	0,0209	0,005	0,0322	0,005	0,018
15.	Rasio perawat per satuan penduduk	10,85	11,71	207	12,53	209	13,29	231	14	236	14,65	252
16.	Akreditasi Rumah Sakit	0	1	0	1	0	1	7	1	13	1	14
17.	Cakupan kunjungan ibu hamil	95,97	96	96,5	96,5	97,6	97	98,5	97,5	96,6	98	100,3

NO	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OutCome)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019	
			Target	Realisasi								
18.	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditandatangani	75,61	76	71,1	77	79,2	78	79,1	79	74,1	80	86,7
19.	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	91,99	92	92,8	92,5	93,3	93	94	93,5	96	94	99,1
20	Cakupan pelayanan nifas	95,68	96	93,7	96,5	95,5	97	95,1	97,5	97,6	98	100,3
21.	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	54,5	60	63,8	63	85,3	65	72,9	68	78,1	69	90,2
22.	Cakupan kunjungan bayi	94,96	95,5	94,9	96	97,4	96,5	98	97	97,2	97,5	103,2
23.	Cakupan peserta KB aktif	60,07	68,16	80,8	75,64	125,19	82,62	110,86	89,11	109,71	95,22	77,1
24.	Cakupan pelayanan anak balita	86,6	91	87,2	92	86,5	93	93,9	94	90,1	95	91
25.	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin	14	30	100	50	100	70	100	80	100	100	100
26.	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

NO	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OutCome)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019	
			Target	Realisasi								
27.	Cakupan penjangkauan kesehatan siswa SD dan setingkat	96,86	100	97,72	100	96	100	95	100	100	100	100
28.	Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk < 15 tahun	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
29.	Persentase penemuan pnemonia balita	78,6	80	100	85	100	90	100	95	100	100	100
30.	Persentase penemuan pasien baru TB, BTA (positif)	91,4	81	105	82	103,3	83	103,3	84	115	85	94,5
31.	Persentase penderita DBD yang ditangani	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
32.	Persentase penanganan diare	70,4	75	116	80	115	85	96,54	90	109	95	100
33.	Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
34.	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

NO	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OutCome)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019	
			Target	Realisasi								
35.	Cakupan desa/kelurahan mengalami Kejadian Luar Biasa (KLB) yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
36.	Cakupan desa/kelurahan siaga aktif	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68
37.	Indeks Kepuasan Masyarakat (%)	75	77	3,7	79	3,2	81	3,21	83	3,32	85	83,71
1.3	Pekerjaan Umum											
1.	Jumlah danau/situ dan kolam retensi kondisi baik	5	5	3	6	5	6	6	7	5	7	7
2.	Panjang saluran, sungai, dan jaringan irigasi dengan kapasitas memadai dan berkondisi baik (km)	174,54	176,54	180,245	178,54	183,965	180,54	189,04	182,54	193,09	184,54	197,1921
3.	Persentase panjang jalan berkondisi mantap (baik & sedang) dari seluruh panjang jalan (%)	86	86,5	87,65	87	88,15	87,5	88,32	88	88,58	88,50	88,79
4.	Jumlah rumah tangga berakses air minum bersih (non PDAM)	840	2.679	1.840	2.679	2.679	3.179	2.746	3.679	2.746	4.179	2.746

NO	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OutCome)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019	
			Target	Realisasi								
5.	Cakupan rumah tangga yang dilayani Sanimas (SR)	4.700	6.200	670	7.700	1.850	9.200	2.547	10.700	3.335	12.200	
6.	Jumlah TPU yang tertata dengan baik (lokasi)	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
7.	Jumlah PJU baru	12.000	13.000	18.723	14.000	11.294	14.500	21.149	15.000	58.927	15.500	69.721 10.550
8.	Persentase pemeliharaan PJU	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
9.	Penambahan jumlah sambungan IPAL ke rumah penduduk (SR)	381	50	393	70	406	100	422		422	600	488
I.4	Perumahan Rakyat											
1.	Pengurangan jumlah titik lokasi kawasan kumuh (titik)	43	3	10	3	3	3	16	3	16	3	17
2.	Peningkatan jumlah rumah layak huni	-	272	563	340	208	408	3.240	476	900	544	1.922
I.5	Lingkungan Hidup											
1.	Persentase penanganan sampah (terangkut & 3R)	73,57	74,87		76,17		77,47		78,77		80,07	
2.	Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) persatuan penduduk	0,001	0,001		0,001		0,001		0,001		0,001	

NO	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OutCome)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019	
			Target	Realisasi								
3.	Wilayah layanan persampahan	70,40%	71,40%	72,20%	72,40%	74%	73,40%	74,38%	74,40%	75,65%	75,40%	
4.	Jumlah taman yang tertata dengan baik	200	12		12		12		12		12	
5.	Persentase titik lokasi eks PKL yang difungsikan sebagai RTH	16	1		1		1		1		1	
6.	Persentase usaha/kegiatan yang telah memiliki dokumen lingkungan yang sudah melaksanakan kewajiban sesuai ketentuan pengelola lingkungan	-	20		40		60		80		100	
7.	Persentase penegakan hukum	-	50		60		70		80		100	
8.	Jumlah sekolah yang dibina untuk menjadi sekolah berbudaya lingkungan	50	60	60	70	100	80	170	90	180	100	
9.	Jumlah hutan kota yang terbangun (unit)	1	-		1		1		1		1	
10.	Jumlah mata air yang dilindungi	34	8	7	8	3	8	10	8		8	

NO	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OutCome)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019	
			Target	Realisasi								
11.	Jumlah bangunan konservasi air tanah (sumur resapan, sumur pantau, sumur imbuhan, sumur bioretensi) (unit)	1.306	100		100		100		100		100	
12.	Jumlah usaha/kegiatan yang dipantau penggunaan air tanah	180	200		200		200		200		200	
13.	Jumlah perusahaan yang memiliki IPLC	30	5		5		5		5		5	
1.6	Kependudukan dan Catatan Sipil											
1.	Cakupan penerbitan KK	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
2.	Cakupan penerbitan KTP	82	83	90,58	84	93	85	95	86	99,3	87	
3.	Cakupan penerbitan kutipan akta kelahiran	57	63	92,87	72	93,1	79	93,84	86	94,07	92	
4.	Cakupan penerbitan kutipan akta kematian	5	7	84	10	120	12	144	15	160	17	

NO	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OutCome)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019	
			Target	Realisasi								
1.7.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak											
1.	Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)	67	72		73		73	90,9	74		74	
2.	Indeks Pembangunan Gender (IDG)	66	68		70		72	67,37	74		76	
3.	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan terselesaikan (%)	110	67	70	69	85	71	75	73	75	210	
4.	Tingkat pendidikan SLTP/MTs/Sederajat yang ditamatkan perempuan (%)	50	55		60		65		70		75	
5.	Tingkat pendidikan SMU/MA/Sederajat yang ditamatkan perempuan (%)	48	52		56		60		64		68	
1.8	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera											
1.	Jumlah keluarga prasejahtera dan sejahtera I	68.837	67.837	-	66.837	-	65.837	40.213	64.837	38.349	63.837	25.724
2.	Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif	111.183	120.183	117.333	129.183	116.819	138.183	118.410	147.183	120.210	156.183	118.691

NO	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OutCome)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019	
			Target	Realisasi								
3.	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	6.485	6.535	6.297	6.585	6.383	6.635	6.478	6.685	6.308	6.735	6.541
4.	Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB	223	243	270	263	249	283	281	303	233	323	287
5.	Rasio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB) 1 Petugas di setiap 2 (dua) Desa/Kelurahan	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68
6.	Rasio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) 1 (satu) petugas di setiap Desa/Kelurahan	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68
7.	Cakupan penyediaan alat dan obat Kontrasepsi untuk memenuhi permintaan 30% setiap tahun	30%	30%	0	30%	0	30%	56,57%	30%	31,49	30%	50,11%

NO	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OutCome)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019	
			Target	Realisasi								
1.9	Sosial											
1.	Jumlah lembaga keagamaan yang berpartisipasi aktif dalam pembangunan	1.392	1.532		1.685		1.853		2.038		2.242	
2.	persentase panti jompo dan anak yang terkelola dengan baik	88	90	100	92	100	94	100	96	100	98	100
3.	Jumlah lanjut usia yang menerima bantuan	50	180	75	180	42	180	150	180	100	180	100
4.	Jumlah penyandang cacat yang ,menerima bantuan	110	100	63	100	63	100	33	100	212	100	177
5.	Persentase korban bencana yang ditangani	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
6.	Jumlah Anjal Gepeng, PSK yang ditangani:											
i.	Anjal	123	125	50	129	619	132	140	135	14	138	82
ii.	Gepeng	186	190		195	151	200	257	205	42	210	112
iii.	PSK	98	100	46	104	110	107	70	110	19	113	21
7.	Jumlah WKSBM di Kota Bogor yang terbentuk	16	10		10		10		10		12	
8.	PMKS yang memperoleh bantuan sosial	18.690	19.064	15.963	19.445	15.831	19.834	21.763	20.231	55.734	20.635	59.539
9.	PMKS yang ditangani	18.943	19.322	15.963	19.708	15.831	20.102	21.763	20.505	55.734	20.915	59.539

NO	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OutCome)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019	
			Target	Realisasi								
10.	PSM yang aktif	100	125		150		175		200		225	
11.	Karang Taruna yang aktif	20	10		10		10		10		10	
12.	Persentase makan pahlawan yang dipelihara	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
13.	Persentase korban bencana yang ditangani	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
I.10.	Ketenagakerjaan											
1.	Jumlah penyerapan tenaga kerja	1.308	1.347	2.033	1.387	955	1.428	2.781	1.470	3.873	1.514	2.590
2.	Upah Minimum Kota sesuai Kriteria Hidup Layak (Rp)	2.002.000	2.493.941	3.022.765	2.634.632	3.272.143	2.775.773	3.557.146	2.916.914	3.557.146	3.058.055	4.169.806
I.11.	Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah											
1.	Jumlah UMKM yang produktif	11.297	12.427	25	13.669	25	15.036	35	16.540	40	18.194	
2.	Jumlah koperasi aktif	301	85	395	85	472	85	501	85	528	85	517
3.	Jumlah produk yang tersertifikasi yang dihasilkan UMKM:											
	a. Halal	590	100		100		100		100		100	
	b. Haki	200	50		50		50		50		50	
I.12.	Penanaman Modal											

NO	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OutCome)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019	
			Target	Realisasi								
1.	Nilai realisasi PMA dan PMDN (dalam Miliar Rupiah)	3.583	3.941	3.104	4.335	2.315	4.769	2.930	5.246	3.103	5.770	2.641
I.13.	Kebudayaan											
1.	Jumlah grup seni budaya yang aktif	40	42	50	45	50	48	50	50	50	52	40
2.	Jumlah cagar budaya yang diinventarisir	0	0	485	0	485	0	485	0	485	1	485
3.	Jumlah cagar budaya yang ditetapkan perda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Jumlah gelar budaya	30	32	76	33		33	63	34	32	36	31
I.14.	Kepemudaan dan Olahraga											
1.	Jumlah organisasi pemuda yang dibina	68	68	68	68	68	68	68	68	68		
2.	Jumlah Atlet yang berprestasi:											
	a. POPDA	52	0	0	55	2	0	0	60	180	0	
	b. POPWIL	17	20	116	0	0	22	122	0	0	22	
3.	Jumlah sarana dan prasarana olahraga	379	381	455	383	477	385	481	387	481	389	
4.	Persentase keikutsertaan pada cabang olahraga											
	a. POPDA	60	0	0	85	71	0	0	90	76	90	0
	b. POPWIL	100	100	100	0	0	100	100	0	0	100	145

NO	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OutCome)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
I.15	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri											
1.	Jumlah LSM, ORMAS, dan OKP yang dibina (kegiatan)	1	1	25	1	20	1	23	1	20	1	
I.16.	Kemasyarakatan											
1.	Jumlah qori/qorih	30	45	45	60	85	75	131	90	177	105	
2.	Jumlah tempat ibadah yang mendapatkan bantuan	154	167	172	180	240	193	311	206	393	219	
3.	Jumlah zakat terkumpul di BAZ (Rp Milyar)	3.515.154.578	4.015.154.57	3.135.168.	4.515.154.57	4.721.043.	5.015.154.57	5.667.229.	5.515.154.57	4.633.235.	6.015.154.	
4.	Jumlah TQP dan MDA	39	39	456	39	497	45	391	45	418	51	
I.17.	Statistik											
1.	Database yang valid, mudah diakses, dan termutakhirkan secara rutin (OPD)	12	18	44	26	44	32	44	38	44	44	
I.18.	Perpustakaan											
1.	Jumlah pengunjung perpustakaan umum dan keliling (orang)	37.000	49.000	49.039	61.000	45.011	73.000	74.623	85.000	25.421	97.000	97.000

NO	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OutCome)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
I.19.	Komunikasi dan Informasi											
1.	Jumlah Pengembangan Infrastruktur Jaringan telekomunikasi (titik)	10	20	60	45	71	45	77	46	83	46	5
2.	Jumlah pembangunan dan pengembangan Control Room (paket)	1	-	1	1	1	-	1	-	1	1	
3.	Pengembangan aplikasi sistem informasi manajemen (SIM)	23	5	54	5	40	5	9	5	25	5	
II.	PELAYANAN URUSAN PILIHAN											
II.1.	Pertanian											
1.	Produksi Tanaman Hias (Tangkai/Pot)	556.000	564.000	840.257	573.000	520.310	581.000	581.483	589.000	615.953	597.000	
2.	Produksi ikan hias (ekor)	14.768.300	16.000.000	15.252.000	17.000.000	18.856.000	18.000.000	17.552.000	19.000.000	18.578.560	20.000.000	0
3.	Jumlah hewan yang dipotong di RPH (ekor)	174.526	460.080	385.450	550.800	447.749	623.520	632.664	732.240	867.465	822.960	
4.	Jumlah produk olahan pertanian binaan	24	32	32	45	45	58	62	71	81	84	

NO	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OutCome)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019	
			Target	Realisasi								
5.	Produk hasil pertanian binaan yang dipasarkan	34	63	43	77	59	91	81	105	62	119	
II.2.	Pariwisata											
1.	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	3.769.787	4.146.766	2.159.930	4.561.442	5.486.924	5.017.586	5.486.924	5.519.345	7.573.402	6.071.280	8.709.412
2.	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara	183.807	202.188	19.531	222.406	388.709	244.647	388.709	269.112	392.585	296.023	451.473
3.	Jumlah kompepar	1	1	1	1	6	1	1	1	6	1	6
II.3.	Industri											
1.	Jumlah sentra IKM	0	1		1		1		1		1	
2.	Jumlah Industri Kreatif	172	192		217		252		292		342	
3.	Jumlah IKM yang produktif	700	775	775	850	880	925	925	1.000	1.000	1.075	1.303
II.4.	Perdagangan											
1.	Peningkatan nilai ekspor	19	21	21	23	23	25	26	27	30	29	18

NO	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OutCome)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019	
			Target	Realisasi								
C.	ASPEK DAYA SAING DAERAH											
I.	KEMAMPUAN EKONOMI											
1.	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	658,45	660,95	499.115	663,45		665,96		668,96		670,96	
2.	Pengeluaran konsumsi non pangan per kapita	395.070	396.570	1.324.986	398.070		399.576		401.076		402.576	
II.	FASILITAS WILAYAH/INFRASTRUKTUR											
II.1.	Perhubungan											
1.	Jumlah kegiatan pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan sarana perhubungan	4	12	9	14	7	17	15	14	14	11	
2.	Persentase Lulus Uji kendaraan bermotor wajib uji	97,5	97,8	97,07	98,1	88,66	98,4	97,37	98,7	87,82	99	97,61
3.	Rata-rata waktu tempuh di lokasi rawan kemacetan (menit/km)	2,99	2,91	2,43	2,83	2,3	2,75	1,72	2,68	1,7	2,61	
4.	Operasional koridor angkutan massal (koridor transpakuan)	3	4	3	5	4	6	5	7	5	7	

NO	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OutCome)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019	
			Target	Realisasi								
II.2.	Penataan Ruang											
1.	Kesesuaian IMB dengan bangunan di lapangan (%)	90	90		92		94		96		98	99,43
2.	Tindak lanjut atas pengaduan pelanggaran tata ruang	100	100		100		100		100		100	100
3.	Tingkat konsistensi pemanfaatan ruang (%)	0	90	90	90	99,77	90	98,9	90	99,74	90	
II.3.	Sumberdaya Manusia											
1.	Rasio lulusan S1/S2/S3	0,13	0,15	0,042	0,17	0,042	0,19	0,066	0,21	0,066	0,23	

BAB VI

CAPAIAN KINERJA STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Penerapan SPM dalam pembangunan di Kota Bogor adalah sebagai berikut:

6.1.1. PENDIDIKAN

Di dalam rancangan Peraturan Pemerintah tentang Standar Pelayanan Minimal, terdapat dua jenis pelayanan dasar yang menjadi SPM Bidang Pendidikan yakni (1) pendidikan dasar; dan (2) pendidikan anak usia dini. Capaian kinerja kedua jenis pelayanan dasar tersebut tercantum pada tabel di bawah.

Tabel 6.6

Capaian Standar Pelayanan Minimal Pendidikan

Pelayanan Dasar	2017	2018	2019
1. Pendidikan Dasar	109,01%	103,38%	112,65%
2. Pendidikan Kesenjangan	1,88%	27,93%	1,42%
3. Pendidikan Anak Usia Dini	37,03%	47,90%	49,66%

6.1.2. KESEHATAN

Di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, terdapat dua belas jenis pelayanan dasar yang wajib diselenggarakan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota secara minimal. Capaian kinerja Pemerintah Kota Bogor terkait pelayanan dasar yang menjadi SPM tersebut sebagaimana tercantum pada tabel di bawah.

Tabel 6.7

Capaian Standar Pelayanan Minimal Kesehatan

Pelayanan Dasar	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
1) Pelayanan kesehatan ibu hamil	50,76%	99,60%	100,3%
2) Pelayanan kesehatan ibu bersalin	49,98%	96,05%	99,1%

Pelayanan Dasar	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
3) Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	55,85%	100,70%	103,5%
4) Pelayanan kesehatan balita	59,72%	90,10%	100%
5) Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	75,65%	100,00%	100%
6) Pelayanan kesehatan pada usia produktif	11,01%	100,00%	78,67%
7) Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	72,45%	100,00%	100%
8) Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	19,81%	100,00%	69,8%
9) Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	26,08%	100,00%	102,91%
10) Upaya kesehatan jiwa pada orang dengan gangguan jiwa berat	63,96%	100,00%	89,2%
11) Pelayanan kesehatan orang dengan TB	100%	100,00%	110,8%
12) Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	89%	96,00%	86,38%

6.1.3. PEKERJAAN UMUM

Di dalam rancangan Peraturan Pemerintah tentang Standar Pelayanan Minimal, terdapat dua jenis pelayanan dasar yang menjadi SPM Bidang Pekerjaan Umum yakni (1) pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan (2) penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik. Capaian kinerja kedua jenis pelayanan dasar tersebut tercantum pada tabel di bawah.

Tabel 6.8

Capaian Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum

Pelayanan Dasar	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
1. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	90,55%	91,98%	92,75%
2. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	72,1%	67,21%	69,12%

Di dalam rancangan Peraturan Pemerintah tentang Standar Pelayanan Minimal, terdapat dua jenis pelayanan dasar yang menjadi SPM Bidang Perumahan Rakyat yakni

(1) penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana; dan (2) penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena program pemerintah kota. Capaian kinerja kedua jenis pelayanan dasar tersebut tercantum pada tabel di bawah.

Tabel 6.9
Capaian Standar Pelayanan Minimal Perumahan Rakyat

Pelayanan Dasar	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana (kota)	100%	100%	100%
2. Penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena program pemerintah kota	0,68%	100%	100%

6.2.5. KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Di dalam rancangan Peraturan Pemerintah tentang Standar Pelayanan Minimal, terdapat lima jenis pelayanan dasar yang menjadi SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yakni (1) pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum; (2) pelayanan informasi rawan bencana; (3) pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana; (4) pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan (5) pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran. Namun dikarenakan terdapat kesulitan dalam menginterpretasikan kelima jenis pelayanan dasar tersebut, maka dalam laporan ini masih menjelaskan pencapaian SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012, dimana terdapat dua pelayanan dasar yang masih terkait yakni (1) pemeliharaan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat; dan (2) penanggulangan bencana kebakaran. Capaian kinerja kedua jenis pelayanan dasar tersebut tercantum pada tabel di bawah.

Tabel 6.10
Capaian Standar Pelayanan Minimal Ketentraman,
Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Pelayanan Dasar	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
1. Pemeliharaan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat			
a. Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	6 Kecamatan 11.850 Ha	6 Kecamatan 11.850 Ha	6 Kecamatan 11.850 Ha
b. Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	100%	100%	100%
c. Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat	100%	100%	100%
2. Penanggulangan bencana kebakaran			
a. Cakupan pelayanan bencana kebakaran	6 Kecamatan 11.850 Ha	6 Kecamatan 11.850 Ha	6 Kecamatan 11.850 Ha
b. Tingkat waktu tanggap	95%	87%	75%
c. Persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi	54%	52%	58%
d. Jumlah mobil pemadam kebakaran di atas 3000 – 5000 liter pada WMK	9 unit	9 unit	9 unit
3. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum			
a. Warga negara yang terkena dampak gangguan ketenteraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah kabupaten/kota dan peraturan kepala Daerah kabupaten/kota	100% (tidak ada yang terdampak)	100% (tidak ada yang terdampak)	100% (tidak ada yang terdampak)

4. Pelayanan Informasi Rawan Bencana			
a. Warga negara yang berada di kawasan rawan bencana dan menjadi korban bencana	100%	100%	100%
5. Pelayanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana			
a. Warga negara yang berada di kawasan rawan bencana dan menjadi korban bencana	100%	100%	100%
6. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana			
a. Warga negara yang berada di kawasan rawan bencana dan menjadi korban bencana	100%	100%	100%
b. Warga negara yang menjadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran	100%	100%	100%

6.2.6. SOSIAL

Di dalam rancangan Peraturan Pemerintah tentang Standar Pelayanan Minimal, terdapat lima jenis pelayanan dasar yang menjadi SPM Bidang Sosial yakni (1) rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti; (2) rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti; (3) rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti; (4) rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan (5) perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana. Capaian kinerja kedua jenis pelayanan dasar tersebut tercantum pada tabel di bawah.

Tabel 6.11

Capaian Standar Pelayanan Minimal Sosial

Pelayanan Dasar	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
1) Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	NA	22%	17,52%
2) Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	NA	18,05%	36,70%

Pelayanan Dasar	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
3) Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	NA	31,94%	32,36%
4) Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	NA	21,53%	55,72%
5) Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana	NA	100%	100%

Permensos 9 Tahun 2018 diundangkan 6 Juli 2018

BAB X

PENUTUP

Evaluasi RPJMD dibutuhkan untuk melaksanakan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah untuk periode RPJMD selanjutnya. Evaluasi RPJMD Kota Bogor Tahun 2015– 2019 dilakukan dengan mengevaluasi pencapaian target setiap indikator sasaran pada setiap misi. Selain mengevaluasi ketercapaian target yang telah ditentukan, dilakukan juga identifikasi permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian setiap indikator sasaran yang ada. Evaluasi juga dilakukan dengan menilai apakah setiap indikator sasaran telah tepat menjadi indikator .

Hasil evaluasi pencapaian target setiap indikator sasaran pada setiap misi, didapatkan bahwa sebagian besar indikator pada seluruh misi belum mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini mungkin juga terjadi karena evaluasi ketercapaian dinilai hingga tahun 2018 sementara target yang telah ditentukan ialah target di akhir tahun RPJMD, yaitu tahun 2019. Akan tetapi, dari hasil evaluasi yang ada dapat dilihat gap kondisi terakhir pencapaian target terhadap target di akhir tahun RPJMD. Gap tersebut dapat menjadi masukan terhadap Pemerintah Kota Bogor dalam melaksanakan program-program pembangunan.

Hasil identifikasi permasalahan pencapaian target yang telah dilakukan menunjukkan permasalahan-permasalahan yang menyebabkan ketidaktercapaian target dan faktor-faktor apa yang menyebabkan target tersebut tidak tercapai. Hasil identifikasi permasalahan dalam pencapaian target ini dapat menjadi masukan dalam menentukan solusi-solusi pemecahan masalah agar target setiap indikator dapat tercapai. Sementara itu, dilihat dari hasil identifikasi permasalahan, terdapat beberapa indikator yang telah mencapai target namun tetap memiliki masalah dalam pencapaiannya. Hasil ini dapat juga dapat menjadi masukan dalam pemecahan masalah agar pencapaian target lebih maksimal.

Sedangkan dari evaluasi indikator, hampir 90% indikator pada seluruh misi dinilai tidak tepat sebagai indikator sasaran karena masih bersifat output. Indikator yang telah ditetapkan merupakan indikator program atau indikator kegiatan. Selain itu, dari hasil penilaian didapatkan bahwa terdapat juga beberapa indikator yang tidak terkait dengan sasaran yang ditetapkan. Oleh karena itu, indikator-indikator tersebut direkomendasikan untuk menjadi indikator pada sasaran. Hasil evaluasi dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Kota Bogor dalam menentukan indikator-indikator sesuai tingkatannya pada penyusunan RPJMD periode selanjutnya.

Selain itu, ditemukan beberapa hal berikut dalam pelaksanaan evaluasi RPJMD Kota Bogor Tahun 2015 - 2019 :

1. Terdapat inkonsistensi penetapan sasaran dalam dokumen RPJMD Kota Bogor Tahun 2015 – 2019
2. Beberapa data ketercapaian indikator tidak didapatkan, sehingga sulit dilakukan evaluasi ketercapaian
3. Tidak jelasnya definisi dan metode perhitungan atau pengukuran setiap indikator sehingga sulit untuk menentukan data dan pengukurannya.



BAPPEDA KOTA BOGOR TAHUN 2019